



SURAT - PERINTAH
Nomor : Sprin /1557 /VII /2011

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) sebagai pelaksanaan kurikulum Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPRA) XLVI Lemhannas RI Tahun 2011, perlu dikeluarkan Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI.

Dasar : 1. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
2. Surat Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor : Skep/288/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Perangkat Kendali Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVI Lemhannas RI Tahun 2011.
3. Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI Nomor : Sprin/269/II/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVI Lemhannas RI Tahun 2011.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Peserta PPRA XLVI Lemhannas RI Tahun 2011 yang namanya seperti tercantum dalam lampiran Surat Perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya Surat Perintah ini agar segera mempersiapkan diri dan melaksanakan SSLN, dengan negara tujuan sesuai pembagian kelompok dan tugas sebagaimana tercantum pada kolom 6 (enam) dan 7 (tujuh) pada lampiran Surat Perintah ini.
2. Melaksanakan koordinasi dengan pejabat terkait di Lemhannas RI dan Duta Besar RI Negara tujuan serta Duta Besar Negara tujuan di Jakarta.
3. Melaporkan hasil SSLN baik secara tertulis maupun lisan kepada Gubernur Lemhannas RI segera setelah tiba kembali di Lemhannas RI.
4. Memedomani Perangkat Kendali Pendidikan (Katdaldik), Buku Panduan SSLN PPRA XLVI dan pengarahan/penjelasan yang berkaitan dengan SSLN PPRA XLVI.
5. Berangkat tanggal : 24 Oktober 2011
Kembali tanggal : 28 Oktober 2011
Kendaraan : Pesawat Komersial
Biaya : Ditanggung Dinas
6. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Perintah ini dibebankan pada anggaran Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI (MAK. 064.01.06.3192.01.005.022.524111).

7. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama serta penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : **19** Juli 2011



Tembusan :

1. Presiden RI.
2. Wakil Presiden RI.
3. Menko Polhukam RI.
4. Mensesneg RI.
5. Menteri Luar Negeri RI .
6. Sestama Lemhannas RI.
7. Duta Besar RI Italia, Swiss, Turki, Finlandia dan Belanda.
8. Para Deputi Lemhannas RI.
9. Inspektur Lemhannas RI.
10. Para Direktur/Karo Lemhannas RI.

DAFTAR KELOMPOK PESERTA STUDI STRATEGIS LUAR NEGERI (SSLN)
PPRA XLVI LEMHANNAS RI TAHUN 2011

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	NRP/NIP	KESATUAN ASAL	NEGARA TUJUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	Kelompok A					
1	Dr. Ir. Gembong Baskoro, M.Sc	Pembina Utama Muda (IV/c)	196112231986031000	Kopertis Wil. VIII/ Surabaya	Belanda	Ketua
2	Drs. Budi Antoro, MBA	Kombes Pol	62080934	Kemendagri	Belanda	Wakil Ketua
3	Drs. FFJ. Mirah	Senior Kolonel	155045	POLRI	Belanda	Sekretaris
4	Xu Shaobin	Mayjen AD	0/50911	Thailand	Belanda	Anggota
5	A.W.J. Crisanthe De Silva	Pembina Utama Muda (IV/c)	195803061986032000	Sri Lanka/AD	Belanda	Anggota
6	Ir. Ambar Rahayu, MNS	G-7	10392	BKKBN RI	Belanda	Anggota
7	Rosmaya Hadi, SH, M.Si	Kolonel Inf	30390	Bank Indonesia	Belanda	Anggota
8	I Made Agra S.	Kolonel Kav	30069	TNI AD	Belanda	Anggota
9	M. Thamrin Marzuki, S.Sos	Kolonel Inf	29594	TNI AD	Belanda	Anggota
10	Johny Lumban Tobing	Kolonel Inf	30442	TNI AD	Belanda	Anggota
11	Edy Rahmayadi	Kolonel Mar	8359/P	TNI AL	Belanda	Anggota
12	R. Gatot Suprpto	Kolonel Laut (E)	8341/P	TNI AL	Belanda	Anggota
13	Dr. Ir. Supartono, MM	Kolonel Pnb	507803	TNI AU	Belanda	Anggota
14	Gutomo, S.IP	Kolonel Lek	505516	TNI AU	Belanda	Anggota
15	Aris Sugianto, SE, MM	Kombes Pol	61060706	POLRI	Belanda	Anggota
16	Drs. Petrus Hardana, SH	Kombes Pol	62010847	POLRI	Belanda	Anggota
17	Drs. M. Zaini, SH	Kombes Pol	62110663	POLRI	Belanda	Anggota
18	Drs. Supriyanto Tarah, MM	-	-	Paroki	Belanda	Anggota
19	RD. Ludgerus Lusi, S.Ag, Lic.Theol	-	-	Ikatan Sarjana Hukum Indonesia	Belanda	Anggota
20	Feri Setiawan Samad, SH	-	-		Belanda	Anggota

1	2	3	4	5	6	7
11	Rudito Hadi Purwanto	Kolonel Laut (P)	8086/P	TNI AL	Turki	Anggota
12	Eko Supriyanto	Kolonel Pnb	506794	TNI AU	Turki	Anggota
13	Drs. Sutarno	Kombes Pol	60050959	POLRI	Turki	Anggota
14	Drs. Rafli, SH	Kombes Pol	61010808	POLRI	Turki	Anggota
15	Drs. Noviantoro P., SH	Kombes Pol	62110636	POLRI	Turki	Anggota
16	Ir. Anfin Rudiyanto, M.Sc, Ph.D	Pembina Utama Madya (IV/d)	196110121986111000	Bappenas RI	Turki	Anggota
17	Drs. Budiono Widagdo, SH, M.Si	Pembina Utama Muda (IV/c)	195807101983031000	Ombudsman RI	Turki	Anggota
18	Syahrizal, Prof, Dr, MA	Pembina Utama Muda (IV/c)	197010271994031000	IAIN Ar-Raniry	Turki	Anggota
19	Jaya Santoso, S.AP	-	-	Gerakan Pemuda Ansor	Turki	Anggota



LAPORAN STUDI STRATEGIS LUAR NEGERI (SSLN)



HUBUNGAN BILATERAL

NEGARA BELANDA DENGAN REPUBLIK INDONESIA

OLEH:
KELOMPOK PESERTA SSLN NEGARA TUJUAN BELANDA
PPRA XLVI/2011

TANGGAL 24 S.D. 28 OKTOBER 2011

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN STUDI STRATEGIS LUAR NEGERI

Tentang

**HUBUNGAN BILATERAL
NEGARA BELANDA DENGAN REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KELOMPOK PESERTA PPRA XLVI
STUDI STRATEGIS LUAR NEGERI (SSLN)
TANGGAL 24 S.D 28 OKTOBER 2011**

BERDASARKAN SURAT PERINTAH GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : SPRIN/1557/VII/2011
TANGGAL 19 JULI 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua dan Rombongan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) PPRA XLVI ke Kerajaan Belanda telah menyelesaikan tugas kunjungannya dan menuliskan laporan tentang:

" HUBUNGAN BILATERAL NEGARA BELANDA DENGAN REPUBLIK INDONESIA".

Laporan ini disusun sebagai bagian pertanggung-jawaban rombongan SSLN ke Belanda dari Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVI Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2011. Tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah memberikan sumbangan pemikiran kepada para penentu kebijakan untuk menyusun strategi dalam rangka membangun hubungan antara negara Indonesia dan Belanda guna meningkatkan supremasi hukum dalam rangka pembangunan nasional.

Selama kegiatan SSLN ke Belanda, rombongan telah mengunjungi beberapa instansi penting baik pemerintah maupun swasta serta industri strategis di bidang perkapalan dan termasuk juga ke beberapa obyek wisata. Laporan ini merupakan hasil kerja kelompok SSLN ke Belanda yang beranggotakan 20 orang dan dalam menyusun laporan ini dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A;
2. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda di Den Haag;
4. Pimpinan Rombongan SSLN ke Belanda (Bapak Mayjen TNI Drs. Christian Zebua, MM), Tenaga Ahli I (Bapak Mayjen TNI Amir Hamka Manan), Tenaga Ahli II (Ibu Hj. Dra. Mardy Arief, M.Si), Tenaga Ahli III (Prof. Dr. Achmad Fedyani S. MA), Tenaga Ahli IV (Bapak Mayjen TNI Endang Haerudin, ST, MM dan Liaison Officer (Bpk Laksma TNI I G. Putu Wijamahadi, SH);
5. Atase Pertahanan RI untuk Belanda dan Para staf KBRI untuk Kerajaan Belanda di Den Haag;

Atas segala kekurangan laporan yang telah kami sampaikan, dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk

perbaikan lebih lanjut. Semoga naskah ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dalam rangka lebih memahami Negara Belanda dan kaitannya dengan peningkatan hubungan bilateral Indonesia-Belanda.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan memberikan bimbingan dan perlindungan-Nya kepada kita semua dalam menunaikan tugas serta pengabdian kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia tercinta ini.

Jakarta, 2 November 2011

Kelompok
Rombongan SSLN Belanda

Dr. Ir. Gembong Baskoro, M.Sc

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Umum 1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Ruang Lingkup dan Sistematika	3
4. Metode dan Pendekatan	4
5. Pengertian	4
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	
6. Paradigma Nasional	6
a. Pancasila sebagai Landasan Idiil.....	6
b. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional	7
c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional	8
d. Ketahanan Nasional sebagai landasan Konsepsional	10
7. Landasan Teori.....	11
8. Peraturan dan Perundang-undangan Terkait	14
BAB III HUBUNGAN BILATERAL NEGARA BELANDA DENGAN REPUBLIK INDONESIA DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	
9. Kondisi Umum Negara Belanda	16
a. Geografi.....	17
b. Demografi	18
c. Sumber Kekayaan Alam	20
d. Ideologi	21

e. Politik.....	22
f. Ekonomi.....	28
g. Sosial dan Budaya.....	31
h. Hankam	36
10. Kondisi Khusus (Temuan menonjol) Negara Belanda	38
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HUBUNGAN ANTARA NEGARA BELANDA DENGAN REPUBLIK INDONESIA	
11. Pengaruh Global	42
12. Pengaruh Regional!	44
13. Pengaruh Nasional	46
14. Peluang dan Kendala	51
BAB V ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL NEGARA BELANDA DENGAN REPUBLIK INDONESIA	
15. Umum	53
16. Bidang Ideologi.....	60
17. Bidang Politik.....	61
18. Bidang Ekonomi	67
19. Bidang Sosial Budaya.....	72
20. Bidang Pertahanan Keamanan.....	76
BAB VI PENUTUP	
21. Kesimpulan	79
22. Saran	81
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	
DAFTAR NAMA PESERTA	

- Lampiran 1 Topografi Belanda
- Lampiran 2 Peta Belanda
- Lampiran 3 Kerajaan Belanda
- Lampiran 4 Susunan Menteri Kabinet Rutte-Verhagen
- Lampiran 5 Susunan Menteri Muda Kabinet Rutte-Verhagen
- Lampiran 6 Susunan Provinsi dan Ibu Kota Provinsi
- Lampiran 7 Daya Saing Belanda
- Lampiran 8 Human Development Index Belanda
- Lampiran 9 Demografi Tiap Provinsi di Belanda
- Lampiran 10 Ideologi Partai di Belanda dan Eropa
- Lampiran 11 Institusi Penelitian 16
- Lampiran 12 Index Daya Saing Belanda
- Lampiran 13 Perguruan Tinggi Ternama di Belanda
- Lampiran 14 14 Perguruan Tinggi di Belanda
- Lampiran 15 Industri Strategis
- Lampiran 16 Sistik Pendidikan di Belanda

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Cita-cita Bangsa Indonesia, sebagaimana dicantumkan pada Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Selain itu Indonesia memiliki tujuan nasional yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut maka seluruh kemampuan dan potensi segenap bangsa dan negara harus diupayakan, termasuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi pertahanan dan keamanan yang didukung dengan peralatan dan teknologi yang memadai. Sehingga potensi ancaman terhadap bangsa dan negara, baik untuk menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun sumber alam yang terkandung didalamnya dapat dicegah dan diatasi.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia maju, mandiri, adil dan makmur, diperlukan peran aktif Indonesia dalam politik luar negeri dan kerja sama lainnya baik di tingkat regional maupun internasional, mengingat konstelasi politik dan hubungan internasional yang terus mengalami perubahan-perubahan yang cepat. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagai negara yang besar secara geografis dan jumlah penduduk. Indonesia memiliki peluang dan potensi untuk menjadi negara yang makmur dan sejahtera dan ikut aktif dalam pergaulan masyarakat internasional dalam rangka melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sekaligus untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Hal tersebut menjadi semakin penting dengan kecenderungan perkembangan globalisasi perekonomian.

Globalisasi merupakan suatu proses atau kondisi menyatunya dunia ke dalam suatu tatanan ekonomi, yang membuka peluang maupun ancaman dalam berbagai bidang termasuk ekonomi dan perdagangan. Jika Indonesia dapat memanfaatkan

Globalisasi sebagai sebuah peluang maka bangsa Indonesia akan maju lebih cepat. Pada era globalisasi saat ini, masing-masing negara berupaya untuk dapat mengambil manfaat ekonomi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan globalisasi dalam upaya untuk dapat meningkatkan supremasi hukum. Karena dengan terwujudnya supremasi hukum diyakini akan memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan pencegahan terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pada saat ini Indonesia sedang melakukan pembenahan internal untuk mewujudkan tata pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum setelah mengalami krisis. Setidaknya terdapat dua faktor yang menyebabkan krisis tersebut, yaitu krisis perekonomian internasional dan tata-pemerintahan yang buruk yang menyebabkan melemahnya ketahanan ekonomi nasional.

Di sisi lain dampak perkembangan perekonomian dunia menjadi semakin signifikan dengan pesatnya perkembangan globalisasi perekonomian dunia pada dekade terakhir ini. Kondisi lingkungan strategis yang bersifat dinamis dan selalu berubah pada era globalisasi memiliki dampak terhadap perekonomian negara-negara di Dunia. Terkait dengan hal tersebut, peran-aktif Indonesia di forum internasional diharapkan dapat ikut mempengaruhi tatanan dunia yang sejalan dengan kepentingan nasional, dan dapat menggalang kerjasama internasional yang menguntungkan pembangunan nasional. Salah satu forum kerjasama internasional Indonesia adalah kerjasama bilateral dengan Kerajaan Belanda. Posisi geopolitik Belanda dan peran aktif Belanda di kawasan Eropa dan di tingkat internasional/multilateral serta latar-belakang keterkaitan sejarah dengan Indonesia menjadikan posisi Belanda strategis bagi kepentingan pembangunan nasional Indonesia.

Naskah ini menyajikan kajian tentang hubungan bilateral antara negara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda dibidang politik, ekonomi, sosial&budaya, dan hankam guna mewujudkan supremasi hukum dalam rangka ketahanan nasional.

2. Maksud dan Tujuan

Naskah ini adalah laporan hasil kajian dari Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), yang merupakan salah satu kegiatan utama pada Program Pendidikan

Reguler Angkatan (PPRA) XLVI tahun 2011.

Naskah ini membahas hubungan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda dan peran diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia maupun Belanda. Naskah ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber dan pembanding bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.

3. Ruang Lingkup dan Sistematika

Ruang lingkup laporan ini adalah hasil kunjungan SSLN ke Kerajaan Belanda, baik kunjungan ke berbagai institusi, maupun obyek penting/strategis. Data bersumber dari hasil wawancara, dan hasil kajian yang sudah dipublikasikan. Tata urutan penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang persoalan yang hendak dibahas, berikut sasaran yang hendak dicapai, metode dan pendekatan yang digunakan, serta pengertian dari konsep-konsep pokok yang terdapat dalam naskah ini.
- b. Bab II Landasan Pemikiran. Pada Bab ini diuraikan dasar-dasar teoretis yang menjadi pijakan analisis. Dasar-dasar dimaksud adalah paradigma nasional (Pancasila, UUD'45, Wasantara, Tannas), serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas.
- c. Bab III Hubungan bilateral negara Belanda dengan Republik Indonesia dan Permasalahan yang dihadapi. Bahasan yang dimuat dalam bab ini meliputi hubungan kondisi umum negara Belanda saat ini, termasuk tinjauan dari aspek Astagatra, dan kondisi khusus ataupun temuan menonjol di Kerajaan Belanda yang perlu mendapat perhatian.
- d. Bab IV Faktor-Faktor yang mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan Belanda. Bab ini juga membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan Belanda, termasuk bagaimana pengaruh perkembangan lingkungan strategis (global, regional, dan nasional) berikut peluang dan kendala yang dihadapi.
- e. Bab V Analisis Terhadap Hubungan Bilateral Negara Belanda Dengan

Republik Indonesia. Sebagai kelanjutan dari bab sebelumnya, pada bab ini disampaikan penjelasan tentang hubungan Indonesia–Belanda yang diharapkan ditinjau dari aspek Astgatra, serta kontribusi hubungan antara kedua Negara terhadap penegakkan supremasi hukum.

f. Bab VI Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang disampaikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hubungan bilateral dan kerjasama kedua negara demi mewujudkan tujuan nasional masing-masing negara dan pelajaran (*lesson learnt*) yang didapat dari kunjungan ke negara Belanda.

4. Metode dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan SSLN ini mencakup pengumpulan data dan informasi, analisis dan sintesis. Data dan informasi diperoleh dari studi lapangan berupa kunjungan/peninjauan, wawancara dan diskusi langsung, dan studi pustaka. Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif analisis, dikaji dengan menggunakan berbagai referensi yang ada, serta dilakukan sintesis dengan informasi/hasil kajian sebelumnya.

5. Pengertian.

a. Supremasi hukum¹ adalah hukum ditempatkan sebagai satu-satunya instrumen yang dapat mengatasi dan menyelaraskan segala permasalahan yang terjadi di masyarakat.

b. *Good Governance* adalah tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan di dukung oleh tiga pilar utama, yakni: lembaga penyelenggaraan pemerintahan (*public governance*), Swasta/pembisnis (*corporate governance*) dan masyarakat sipil (*civil society*), dimana hubungan antara ketiganya dan aturan main yang ada didalamnya harus lahir dari kesepakatan melalui cara-cara yang demokratis (Leila R Komala, sekretariat pengembangan *public good governance*, Bapennas).

c. Hubungan Bilateral² adalah suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi di antara dua Negara. Misalnya perjanjian politik-ekonomi,

¹ Liba, H.M., SH, MBA, *Empat belas Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan An Nisa, Jakarta, 2002.

² http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_bilateral

pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara.

d. Pembangunan Nasional adalah upaya seluruh bangsa Indonesia dalam mengejar Cita-Cita Nasional dan Tujuan Nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Oleh karena itu, Pembangunan Nasional pada dasarnya adalah pembangunan oleh, dari dan untuk rakyat, pelaksanaannya meliputi semua aspek kehidupan bangsa secara merata di seluruh tanah air (Modul SISMENNAS PPRA XLVI/2011).

e. Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera yang berkeadilan dan sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang (SISMENNAS, berbagai sumber).

f. Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang ber-kesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagai mana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. (UU No.17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005-2025).

g. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara (UU RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

Konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia saat mendeklarasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal tersebut dibentuk Pemerintah Negara Indonesia dengan tujuan antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi (Penjelasan atas UU nomor 17 tahun 2007).

Keikutsertaan Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia sesuai dengan tujuan nasional tersebut dilaksanakan berdasarkan paradigma nasional, yaitu Pancasila sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, wawasan nusantara sebagai landasan visional, dan ketahanan nasional sebagai landasan konseptual, serta peraturan perundang-undangan sebagai landasan operasional.

Dalam hubungan dua negara, khususnya dalam meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda guna terwujudnya supremasi hukum, maka harus dipahami dengan baik kepentingan nasional kedua negara. Bagi Indonesia, maka kepentingan nasional harus didasari pada paradigma nasional yang digunakan sebagai pedoman dan pertimbangan dalam melaksanakan hubungan bilateral antar negara.

6. Paradigma Nasional

a. Pancasila sebagai Landasan Idiil

Substansi Internasionalisme di sila kedua Pancasila yang disampaikan Ir. Soekarno dalam pidato usulan dasar kemerdekaan Indonesia 1 Juni 1945 mengandung nilai kesederajatan, saling hormat-menghormati, saling toleransi

sesama bangsa dalam pergaulan internasional. Nilai-nilai ini akan melandasi diplomasi Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara sahabat. Dalam substansi ini dikandung maksud agar bangsa Indonesia dalam menanggapi rasa nasionalisme jangan terlalu ke-kita-an yang menjurus kepada chauvinisme, tapi kebangsaan Indonesia adalah yang berkemanusiaan (*humanity*), berkeadilan, dan berkeadaban. Hendaklah kemerdekaan Indonesia memberikan kedaulatan kedalam dan keluar sebagai suatu bangsa berdaulat ditengah pergaulan antar bangsa lainnya. Dasasila Bandung yang dihasilkan konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung dan tetap digunakan oleh gerakan Non-Blok sampai sekarang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila.

Pancasila merupakan ideologi nasional, dasar negara, sumber hukum, serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Pelaksanaan objektif dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersurat atau paling tidak tersirat dalam UUD 1945 dan segala peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pancasila menyadarkan bangsa Indonesia tentang keterkaitan antara manusia dengan Tuhannya, antar sesama manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya. Pancasila menjadi penuntun dan pengikat moral, serta merupakan norma sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta berperan secara aktif di fora internasional. Lima sila dari Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua kandungan nilainya.

b. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional.

Sebagai dasar misi hubungan bilateral Indonesia adalah tersirat dalam alinea ke IV pembukaan UUD 1945 yaitu “untuk turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sedangkan dalam batang tubuh UUD 1945, misi diplomasi Indonesia termuat dalam pasal 11 dan 13 UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 3(1) UU nomor 10 tahun 2004). Sebagai landasan konstitusional bagi

penyelenggaraan negara, UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi undang-undang dan peraturan-peraturan yang secara hirarki berada dibawahnya serta berperan memberikan kaidah-kaidah penuntun bagi semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk pula dalam berperan-serta aktif di fora internasional dan melakukan kerjasama antar-bangsa.

Amanat rakyat kepada Pemerintah Negara Indonesia melakukan kegiatan internasional dicantumkan pada Pembukaan (Preamble) UUD 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Implementasinya diatur dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 11 UUD 1945, yang menyatakan bahwa :

- 1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- 2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional

Wilayah RI yang diakui secara internasional pada masa awal NRI didasarkan pada *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939*, yang menetapkan bahwa jarak laut teritorial bagi tiap-tiap pulau sejauh tiga mil (Anonymous, 2007). Peraturan ini, memunculkan 'kantong-kantong' lautan bebas di tengah-tengah wilayah negara yang membuat kapal asing dapat berlayar secara bebas. Pulau-pulau yang merupakan wilayah RI dan rakyat Indonesia yang mendiaminya dipisahkan oleh laut bebas di sekitarnya. Keterpecahan geografi tersebut menimbulkan sekat alam yang menghambat proses sirkulasi kehidupan nasional. Keterpisahan lainnya merupakan dampak dari perbedaan primordial bangsa Indonesia, seperti suku, adat-istiadat, ras dan agama, yang dapat menjadi sekat sosial yang menghambat hubungan antarkomponen bangsa Indonesia. Konsepsi keutuhan wilayah

daratan dan perairan untuk mencegah terpecah-belahnya pulau-pulau di Indonesia oleh laut bebas disebut Wawasan Nusantara (Anwar, 2000).

Wawasan Nusantara, yang merupakan Wawasan Nasional yang bersumberkan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara, yang merupakan konsepsi Geopolitik Indonesia, merupakan prasyarat terwujudnya cita-cita nasional yang melandasi upaya meningkatkan ketahanan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan mencapai tujuan nasional dan menjamin kepentingan nasional (Lemhannas, buku-8, hal 8).

Perjuangan mewujudkan Wawasan Nusantara dengan salah satu konsep dasar Negara Kepulauan dimulai dengan Keputusan Pemerintah pada sidang 13 Desember 1957 untuk menggunakan Konsep Negara Kepulauan dalam tata hukum di Indonesia. Konsep tersebut mencakup dua hal, yaitu (1) semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk daratan NRI adalah bagian dari wilayah daratan NRI sehingga merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak NRI, (2) batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya tiga mil diperlebar menjadi 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau dari wilayah NRI pada saat air laut surut (Anonymous, 2007).

Konsep tersebut kemudian diperjuangkan di forum Persatuan Bangsa - Bangsa (PBB) agar dapat diterima sebagai ketentuan dalam suatu konvensi mengenai hukum laut internasional (Kusumaatmadja, 2003). Usaha Indonesia dan masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan melalui Konferensi PBB telah berhasil mewujudkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) pada tanggal 10 Desember 1982. Konvensi ini mempunyai arti yang penting Bagi Bangsa dan Negara RI karena untuk pertama kalinya asas Negara Kepulauan memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. Pengakuan ini merupakan hal yang penting dalam

mewujudkan Wawasan Nusantara yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Penjetasan atas UU nomor 17 tahun 1985). Ruang hidup Bangsa Indonesia setelah berlakunya UNCLOS 1982 mencakup Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (UU nomor 43 tahun 2008).

Wilayah NKRI, yaitu wilayah dengan kedaulatan penuh RI, merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk pula seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya (UNCLOS 1982). Luas wilayah laut NKRI adalah 3,1 juta km².

Wilayah Yurisdiksi Indonesia berada di luar Wilayah Negara, terdiri atas zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen dan zona tambahan (UU nomor 43 tahun 2008), dengan luas keseluruhan sekitar 2,9 juta km². Pada wilayah ini, Negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di Wilayah Yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional (UU nomor 43 tahun 2008). Hak berdaulat tersebut dijelaskan pada Pasal 4 UU nomor 5 tahun 1983 dan UNCLOS 1982.

d. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional

Terdapat dua pengertian atau definisi ketahanan nasional, yaitu sebagai kondisi dan sebagai konsepsi. Definisi pertama, Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Definisi kedua, Ketahanan Nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara (Lemhannas, Buku-8 hal 15). Konsepsi Ketahanan Nasional berfungsi

sebagai doktrin dasar nasional, metode pembinaan kehidupan nasional dan sebagai pola dasar pembangunan nasional, yang merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaannya.

Ketahanan nasional memiliki dua aspek, yaitu aspek alamiah, yaitu hubungan manusia dengan alam sekitarnya, dan aspek sosial, yaitu aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan dan norma-norma tertentu. Aspek alamiah dari ketahanan nasional dicerminkan oleh tiga unsur (tri-gatra) yang relatif statis, terdiri dari geografi, sumber kekayaan alam dan kependudukan/demografi. Sementara itu, aspek sosial dari ketahanan nasional dapat direpresentasikan oleh lima unsur (pancagatra) yang bersifat dinamis dan dianggap dominan, meliputi Ipoleksosbudhankam.

Ketahanan nasional pada hakikatnya dipengaruhi oleh kemampuan bangsa dan negara dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah (Trigatra) sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional (Pancagatra). Ketahanan Nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan masing-masing gatra, melainkan resultan dari keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang Ipoleksosbudhankam. Tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia selalu ditujukan pada pancagatra tersebut. Kualitas Pancagatra secara terintegrasi dan interaksinya dengan Trigatra mencerminkan tingkat Ketahanan Nasional Indonesia. Kelemahan di salah satu gatra dapat berdampak pada gatra lain dan mempengaruhi keseluruhan gatra. Oleh karena itu, upaya meningkatkan ketahanan tersebut harus dilakukan secara holistik (Lemhannas, Buku-8 hal 29).

7. Landasan Teori

Dalam mewujudkan kerjasama internasional terutama dalam meningkatkan hubungan antar negara terkait dengan terwujudnya supremasi hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa teori sebagai berikut :

a. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri suatu negara sesungguhnya merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun internasional. Demikian pula halnya dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor, antara lain posisi geografis yang strategis, yaitu posisi silang antara dua benua dan dua samudra; potensi sumber daya alam dan manusia berikut susunan demografi; dan sistem sosial-politik yang sangat mempengaruhi sikap, cara pandang serta cara memposisikan diri di fora internasional.

Perubahan-perubahan mendasar dalam dinamika internasional dan globalisasi saat ini dicirikan antara lain, perubahan sistem politik global dari bipolar ke multipolar; menguatnya *interlinkages* antara forum global, interregional, regional, subregional dan bilateral; meningkatnya peranan aktor-aktor non-negara dalam hubungan internasional; dan munculnya isu-isu baru di dalam agenda internasional seperti HAM, demokratisasi, lingkungan hidup dan sebagainya yang dampak utamanya adalah semakin kaburnya batas dan kedaulatan negara dalam pergaulan antar bangsa.

Kebijakan luar negeri merupakan suatu perangkat nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Rosenau menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya, yang kemudian kebijakan luar negeri ini ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.

Lebih lanjut, menurut Rosenau apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan (*internal life*) dan kebutuhan eksternal (*external needs*) termasuk di dalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum dan geografis suatu negara sebagai negara-bangsa (Rosenau dalam

Perwita dan Yani, 1995:49).

Demikian juga K.J Holsti memberikan definisi bahwa kebijakan luar negeri adalah:

“ideas or actions designed by policy makers to solve a problem or promote some change in the policies, attitudes, or actions of another state or states, in non state actors in the international economy, or in the physical environment of the world. Sending a diplomatic note, attending a summit meeting, enunciating a doctrine, making an alliance, or formulating long-range are aspects of foreign policy” (Holsti, 1995:83).

b. Instrumen Kebijakan Luar Negeri

Dalam melakukan kebijakan luar negeri, suatu negara diperhadapkan kepada pilihan-pilihan mengenai instrumen yang akan digunakan. Holsti dalam bukunya Politik Internasional: Suatu kerangka analisis membagi instrumen kebijakan luar negeri menjadi lima, yaitu: diplomasi, propaganda, ekonomi, intervensi dan tindakan militer terselubung, dan persenjataan, perang dan pengaruh politik (Holsti, 1995:224-553).

Diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan kebijakan luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain (Soeprapto, 1997:210.) S.L Roy merangkum beberapa definisi mengenai diplomasi dan akhirnya Roy merangkum beberapa hal penting mengenai diplomasi, yaitu:

- 1) Unsur pokok diplomasi adalah negosiasi;
- 2) Negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan nasional;
- 3) Tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga serta memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin dan dilaksanakan secara damai, pemeliharaan perdamaian dengan tujuan tanpa merusak kepentingan nasional adalah tujuan utama diplomasi;
- 4) Diplomasi berhubungan erat dengan tujuan kebijakan luar negeri suatu negara;
- 5) Diplomasi modern berhubungan erat dengan sistem negara;

6) Diplomasi tidak bisa dipisahkan dari perwakilan negara (duta besar atau diplomat) (S.L Roy 1991, 4-5).

Diplomasi mencoba menyatukan kepentingan yang berbeda, atau setidaknya membuat kepentingan tadi menjadi sesuai dan memperbolehkan beberapa kepentingan supaya kehendak masing-masing dapat tercapai secara damai. Diplomasi ini sangat sesuai dengan pelaksanaan kerjasama seperti pertukaran ekonomi dan aliansi, tetapi ini juga berhubungan dengan usaha untuk mencegah perang dan penghentian perang ketika telah berlangsung.

c. Teori Transaksional

Berdasarkan teori transaksional (Michael Todaro dan Stephen Smith, 2003) suatu negara berhubungan dengan negara lain hanya jika ada kemungkinan memperoleh keuntungan dari adanya kerjasama tersebut. Kerjasama yang saling menguntungkan antar kedua negara atau hubungan bilateral merupakan perwujudan saling memberikan nilai tambah bagi kedua negara masing-masing. Oleh karena itu, kerjasama antara Indonesia dan Belanda harus dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama bilateral yang saling menguntungkan.

d. Teori Ancaman

Menurut John Galtung (Michael Todaro dan Stephen Smith, 2003) ancaman terbesar bagi umat manusia di masa yang akan datang adalah fundamentalisme pasar. Fundamentalisme pasar akan meningkatkan ketergantungan antar bangsa satu sama lain. Sebab itu bagi bangsa bangsa yang tidak ingin terpuruk, haruslah dapat melepaskan diri dari ketergantungan pasar terutama negara-negara yang mendominasi dunia. Dengan demikian, hubungan antara Indonesia dan Belanda hendaknya diatur sedemikian rupa agar peluang-peluang yang ada bukan sekaligus merupakan ancaman, karena terjadinya ketergantungan Indonesia terhadap Belanda.

8. Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

NKRI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, pelaksanaan hubungan

luar negerinya didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan Pemerintah NKRI adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah NKRI telah melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional. Terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan hal tersebut yaitu UU nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

UU nomor 37 tahun 1999 mengatur penyelenggaraan hubungan luar negeri secara menyeluruh dan terpadu agar prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dapat tetap terjaga. UU ini menjadi semakin relevan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun internasional, melalui forum bilateral atau multilateral, yang diabdikan pada kepentingan nasional.

Dalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan nasional tersebut, Pemerintah RI melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek-subjek hukum internasional lain. Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerjasama internasional yang dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional. Bagian terpenting dalam proses pembuatan perjanjian internasional adalah pengesahan perjanjian tersebut karena pada tahap tersebut suatu negara secara resmi mengikatkan diri pada perjanjian itu. Untuk mengatur secara jelas dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional telah diterbitkan UU nomor 24 tahun 2000.

BAB III

HUBUNGAN BILATERAL NEGARA BELANDA DENGAN REPUBLIK INDONESIA DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Di era globalisasi saat ini, hubungan antar bangsa-bangsa sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan pengertian terhadap aspek intrinsic setiap bangsa. Hal tersebut juga secara riil ditemukan dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Secara historic hubungan bilateral antara kedua Negara telah terjalin sejak lama. Sebagai Negara yang pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun, tentu Indonesia bukanlah sebuah Negara yang asing untuk Belanda. Dalam konteks sejarah itu hubungan antara kedua Negara juga memunculkan beberapa polemic, khususnya soal pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dapat dikatakan bahwa secara resmi Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2005, saat pidato Menteri Luar Negeri Bernard Rudolf Bot di Kementerian Luar Negeri Indonesia³. Selain itu persoalan keberadaan organisasi RMS (Republik Maluku Selatan) juga menjadi salah satu isu penting, yang dalam banyak hal berpotensi mengganggu hubungan kedua negara .

Hubungan historic ini bagaimanapun telah memberikan pengaruh yang

³ Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda adalah peristiwa di mana Belanda akhirnya mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan tanggal 27 Desember 1949 saat *soevereiniteitsoverdracht* (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Pengakuan ini baru dilakukan pada 16 Agustus 2005, sehari sebelum peringatan 60 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, oleh Menlu Belanda Bernard Rudolf Bot dalam pidato resminya di Gedung Deplu. Pada kesempatan itu, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menlu Hassan Wirajuda. Keesokan harinya, Bot juga menghadiri Upacara Kenegaraan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta. Langkah Bot ini mendobrak tabu dan merupakan yang pertama kali dalam sejarah. Pada 4 September 2008, juga untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang Perdana Menteri Belanda, Jan Peter Balkenende, menghadiri Peringatan HUT Kemerdekaan RI. Balkenende menghadiri resepsi diplomatik HUT Kemerdekaan RI ke-63 yang digelar oleh KBRI Belanda di Wisma Duta, Den Haag. Kehadirannya didampingi oleh para menteri utama Kabinet Balkenende IV, antara lain Menteri Luar Negeri Maxime Jacques Marcel Verhagen, Menteri Hukum Ernst Hirsch Ballin, Menteri Pertahanan Eimert van Middelkoop, dan para pejabat tinggi kementerian luar negeri, parlemen, serta para mantan Duta Besar Belanda untuk Indonesia. Selama hampir 60 tahun, Belanda tidak bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Pengakuan_tanggal_kemerdekaan_Indonesia_oleh_Belanda.

sangat banyak kepada Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih diberlakukan di Indonesia saat ini merupakan salah satu dari sekian ratus peraturan hukum warisan kolonial Belanda. KUHP ini mulai diberlakukan secara resmi di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918 . Selain itu kedua Negara juga mempunyai banyak kesamaan pandang dalam bidang demokrasi, perdamaian dunia, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan. Beberapa contoh dari implementasi hubungan bilateral kedua Negara adalah kerjasama dan bantuan Kerajaan Belanda dalam pelatihan anti teror melalui program Jakarta Center for Law enforcement cooperation (JCLEC) yang bertempat di Akademi Kepolisian (AKPOL) Semarang; Pelatihan Manajemen Lalu Lintas bagi para perwira POLRI di Apeldoord Belanda, yang dilakukan secara berlanjut; serta kerjasama pelatihan di bidang security aviation (pengamanan bandara dan keselamatan penerbangan) yang diikuti oleh anggota POLRI. Peluang untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua Negara tentu saja akan berkembang juga kepada hal-hal lainnya. Untuk itu diperlukan pemahaman akan kondisi masing-masing negara dengan baik.

9. Kondisi Umum Negara Belanda⁴

Kondisi umum negara Belanda ditelaah berdasarkan asta gatra meliputi:

a. Geografi

Ditinjau dari gatra geografi maka Belanda adalah sebuah negara dengan luas daratan yang kecil yaitu 33,948 km², luasan ini hanya luas daratan saja tidak termasuk permukaan air didarat. Jika dihitung secara keseluruhan termasuk luas permukaan air didaratan maka luasnya adalah 41,526 km². Posisi Belanda terletak diantara laut utara (the North Sea), Belgia, dan German. Panjang negara Belanda dari utara ke selatan hanya sekitar 300 km, sedangkan dari timur ke barat hanya sekitar 200 km. Belanda juga dilewati oleh dua sungai besar di Eropa yaitu sungai "Rhein" dan sungai "Maas" yang dipergunakan sebagai lalu lintas air yang cukup padat dan sangat berarti bagi perekonomian Belanda. Belanda merupakan salah satu negara yang memiliki letak daratan di bawah permukaan laut. Dengan 27%

⁴ http://www1.minbuza.nl/en/You_and_the_Netherlands/About_the_Netherlands.

dari areanya dan 60% dari populasinya terletak dibawah permukaan laut. Karena itulah di Eropa Belanda juga dikenal dengan sebutan “lage landen” (low land) atau tanah rendah. Titik terendah di Belanda terletak di Prince Alexander Polder arah utara kota Rotterdam dengan ketinggian 6.76 meter dibawah permukaan laut. Sebagai pembandingan dapat dilihat bahwa bandara udara Schiphol Amsterdam, sebenarnya terletak 4.5 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan titik tertinggi di Belanda adalah di Vaalserberg yang terletak di propinsi Limburg dengan ketinggian hanya 322.5 metres diatas permukaan air. Karena letak geografisnya yang berada dibawah permukaan air laut inilah maka Belanda sangat beresiko terhadap ancaman banjir. Bagi Belanda, ancaman dan kelemahan ini justru dimaknai sebagai “opportunity” dan tantangan (chalange). Karena cara pandang (mindset) inilah mampu mendorong Belanda untuk berhasil memecahkan persoalan geografinya dan berhasil menemukan solusi yang dapat dirasakan hingga saat ini. Untuk membendung air didaratan, Belanda melakukan dengan membuat sistem polder yaitu suatu cara penanganan banjir yang meliputi sistem drainase, kolam, tanggul (dijk) yang mengelilingi kawasan, serta pompa dan pintu air, sebagai satu kesatuan pengelolaan tata air. Selain itu Belanda juga membangun dinding laut untuk menahan air laut masuk ke daratan dan salah satu proyek yang paling terkenal adalah Proyek Delta, yaitu sebuah gugusan Dam yang mencegah daerah zeeland dan zuid holland dari terjangan laut utara. Proyek ini bermula karena pengalaman terjadinya banjir besar di Belanda pada tahun 1953 dan proyek ini baru selesai pada tahun 1997. Karena itulah landscape Belanda terlihat dengan bentuk yang datar dengan polder yang dikelilingi oleh dijk (Tanggul), jembatan, sungai, dan windmollen (kincir angin) yang berfungsi sebagai pompa air. Kreatifitas dan daya inovasi masyarakat Belanda inilah yang mampu merubah Belanda menjadi sebuah negara yang modern hingga saat ini. Tidak heran ada pepatah Belanda yang berbunyi “Tuhan membuat dunia, tapi orang Belanda membuat Holland”. Sebagai contoh, dalam hal manajemen air dan reklamasi daratan serta teknik membuat “daratan” di atas laut maka Belanda merupakan sebuah negara yang mempunyai teknologi terbaik dan memiliki ahli-ahli kelas dunia. Karena perjuangan orang-orang Belanda dalam kurun

waktu yang sangat panjang melawan alam, khususnya air laut, maka hal ini telah berdampak pada budaya dan attitude orang Belanda yang mampu bekerja bersama dalam tim, sangat menghargai waktu, pantang menyerah, dan pekerja keras.

b. Demografi

Dari sisi demografi maka dapat dilihat bahwa orang asli Belanda mendominasi (81%) populasi etnis di Belanda. Orang Belanda memiliki ciri-ciri fisik umum sebagai orang-orang yang berbadan tinggi bahkan tertinggi di dunia. Rata-rata tinggi laki-laki Belanda adalah 1.82 meter, sedangkan wanita Belanda sekitar 1.69 meter. Masyarakat Belanda memiliki ciri-ciri budaya yang sangat egaliter, straight forward, talk active, individualistik, terbuka, dan modern. Namun masyarakat Belanda sangat rendah hati, memiliki rasa gotong royong, mempunyai empati yang tinggi, dan kesetia kawan sosial yang sangat baik. Dalam masyarakat Belanda hal-hal seperti pendidikan, kerja keras, ambisi, prestasi, kemampuan, dan profesionalitas sangat dihargai sekali. Masyarakat Belanda juga kaya akan sejarah peradaban, pendidikan, seni, arsitektur, perdagangan/ekonomi, dan teknologi tinggi. Sebagai contoh, pada abad ke-17, Belanda telah melahirkan banyak pelukis andal seperti Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer, Jan Steen dan lain-lain. Sedangkan pelukis ternama abad ke-19 dan 20 antara lain Vincent van Gogh dan Piet Mondriaan selain M.C. Escher (ahli seni grafik) dan Han van Meegeren. Dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan setidaknya ada 19 orang Belanda yang merupakan pemenang hadiah Nobel, salah satu yang banyak dikenal di Indonesia adalah Christiaan Eijkman, pemenang Nobel bidang kedokteran pada Tahun 1929.

Populasi penduduk Belanda sekitar 16.66 juta jiwa dengan komposisi 81% adalah etnis Belanda dan "Western" non-native dan 19% sisanya adalah imigran dari beragam etnis (9 % didalamnya adalah Turki, Maroko, Antilleans, Suriname, dan Indonesia) sebagai etnis minoritas. Komposisi penduduk Belanda terdiri dari (1) "Non-Western" non-native: 1.86 juta jiwa, (2) "Western" non-native: 1.5 juta jiwa, (3) Sisanya adalah native Belanda. Umumnya

imigran yang berasal dari luar Belanda cenderung hidup di kota-kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, dan Den Haag. Di kota-kota besar ini populasi mereka sekitar 30% dari penduduk di kota tersebut. Sedangkan komposisi agama di Belanda adalah Katolik 31 %, Protestan 21 %, Muslim 4,4 %, lainnya 3,6 %, dan tidak terafiliasi 40 %. Di Belanda ada sekitar 1 juta penduduk Muslim dengan populasi terbesar (75%) adalah dari etnis Maroko dan Turki. Kelompok Muslim memainkan peran yang aktif dalam perpolitikan di Belanda. Misalnya partai Muslim Demokrat memiliki satu kursi di Den Haag municipal council. Bahkan beberapa anggota parlemen walikota Rotterdam adalah dari kalangan Muslim. Dengan kondisi keberagaman yang demikian maka Belanda merupakan sebuah negara yang (sangat) pluralis dan multikultur. Oleh karena itu masyarakat Belanda umumnya terbiasa hidup dalam keberagaman. Realitas sosial keberagaman ini tidak hanya diakui tetapi juga adanya penghargaan atas keberagaman itu sendiri. Sehingga tidak heran kalau di Belanda (di Malieveld Den Haag) kita dapat menemukan perayaan “Pasar Malam” Indonesia terbesar di Belanda bahkan Eropa yang diselenggarakan setiap tahun.

Sejarah pluralisme dan multikultural di Belanda telah ada sejak abad yang lalu dengan berimigrasinya orang-orang ke Belanda sebagai contoh pada abad 17 orang-orang Protestan Perancis (Huguenots) berimigrasi ke Belanda. Pada abad 19-20 orang-orang dari bekas koloni Belanda di Indonesia, Suriname, dan beberapa bagian kerajaan Belanda di pulau Karibia berimigrasi ke Belanda. Pada tahun 1960 dan 1970an karena kekurangan tenaga kerja menyebabkan Belanda banyak mendatangkan migran dari Eropa selatan, Turki dan Morocco. Inilah yang menyebabkan heterogenitas dari populasi etnis di Belanda saat ini. Namun demikian, banyak dampak positif maupun negatif yang diakibatkan dari pluralisme ini, sehingga pada saat-saat ini dampak negatif lingkungan strategis global dunia menyebabkan pemerintah Belanda memperketat kebijakan imigrasi (lihat gatra Politik).

c. Sumber Kekayaan Alam (SKA)

Belanda adalah sebuah negara yang memiliki sumber kekayaan alam/natuurlijke hulpbronnen (natural resources) sangat terbatas. SKA yang dimiliki

Belanda diantaranya gas alam (aardgas), minyak bumi (aardolie), garam (zout) di daerah timur Belanda, dan kerikil-tanah liat di sepanjang sungai daerah utara. Karena itu daya saing ekonomi Belanda tidak disandarkan pada SKA namun pada bidang pertanian (2% GDP), industri (24% GDP), dan jasa (74% GDP). Namun demikian walaupun Belanda memiliki SKA yang sangat terbatas, justru Belanda memiliki perusahaan-perusahaan kelas dunia yang bergerak pada bidang eksplorasi dan eksploitasi (E&E) SKA diantaranya seperti Shell yang melakukan E&E di seluruh dunia.

Dalam bidang energi, karena terbatasnya SKA maka Belanda mengambil kebijakan energi nasionalnya bersandar pada energi yang terbarukan (renewable energy) dan menghindari sebisa mungkin penggunaan energi tak terbarukan yang berasal dari bumi (fosil fuel). Karena itu sesuai UU energi yang ada, maka Belanda telah menargetkan penurunan konsumsi energi sebanyak 10% dari seluruh energi yang dikonsumsi pada tahun 2010 dan harus diadakan dari sumber energi yang terbarukan (renewable sources). Bahkan koalisi antara partai CDA, PvdA dan Christenunie telah setuju untuk menaikkan target ini menjadi 20% dalam upaya menyelaraskan terhadap target Uni Eropa (EU) sebesar 14% energi terbarukan untuk Belanda pada tahun 2020.

d. Ideologi⁵

Ideologi di Belanda secara umum dapat dikatakan menganut paham Liberal yang menjunjung tinggi HAM, seperti ideologi partai VVD yang sedang berkuasa dan D66. Ideologi Liberal ini dalam prakteknya terlihat dari kebebasan yang dianut oleh masyarakat Belanda seperti legalisasi drug, Euthanasia, tidak ada hukuman mati, dan lainnya. Disisi lain masyarakat Belanda juga termasuk masyarakat yang memiliki emphaty sosial sangat baik dan cenderung menganut ideologi sosial-demokrat, seperti ideologi partai CDA, PvdA, D66, Groenlinks, dsb. Namun demikian, terlihat bahwa setiap partai (partij) di Belanda memiliki ideologinya masing-masing (lihat Lampiran

⁵ Lesbrief Politieke stromingen en politieke partijen, Impuls Tweede Fase havo/vwo, © Noordhoff Uitgevers bv.

10). Bahkan di Belanda pun ada partai yang berideologi sangat konservatif seperti Partij Voor de Vrijheid (PVV) yang sering disuarakan oleh Geert Wilders, dan Trots op Nederland (TON⁶).

Tabel 1. Ideologi Partai di (tweede kamer) Belanda (9 Juni 2010)

No	Politieke partij	Ideologie	Lijsttrekker in 2010	Fractievoorzitter	Stemmen	Zetels	Vershil
1	Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)	liberaal	Mark Rutte	Stef Blok	1.926.551	31	+9[1]
2	Partij van de Arbeid (PvdA)	socialdemocratisch	Job Cohen	Job Cohen	1.847.776	30	-3
3	Partij Voor de Vrijheid (PVV)	conservatief-liberaal	Geert Wilders	Geert Wilders	1.453.944	24	15
4	Christen-Democratisch Appèl (CDA)	christendemocratisch	Jan Peter Balkenende	Sybrand van Haersma Buma	1.281.137	21	-20
5	Socialistische Partij (SP)	socialistisch	Emile Roemer	Emile Roemer	924.977	15	-10
6	Democraten 66 (D66)	progressief liberaal	Alexander Pechtold	Alexander Pechtold	653.265	10	7
7	GroenLinks (GL)	groen/progressief liberaal	Femke Halsema	Jolande Sap	627.912	10	3
8	ChristenUnie (CU)	christendemocratisch/ christelijk-sociaal	André Rouvoet	Arie Slob	305.628	5	-1
9	Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)	reformatorisch	Kees van der Staaij	Kees van der Staaij	163.512	2	0
10	Partij voor de Dieren (PvdD)	dierenrechten	Marianne Thieme	Marianne Thieme	122.257	2	0

Secara umum Ideologi yang ada dalam partai-partai di Belanda antara lain (Tabel 1): (1) Liberal yaitu VVD (liberal kanan) dan D66 (liberal kiri), (2) Sosialis yaitu PvdA, SP, dan GroenLinks, (3) Komunis, belum ada, (4) Konservatif yaitu PVV, dan TON, (5) Konvensionalisme yaitu CDA, CU, dan SGP. Karena perbedaan ideologi inilah maka isu-isu yang diangkat oleh setiap partai berbeda satu dengan yang lain.

e. Politik

1) Hukum

Belanda adalah sebuah negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat). Disebut demokratis sebab warga negaralah yang memilih siapa yang akan memerintah. Disebut negara hukum sebab semua warga negara Belanda berhak untuk dilindungi oleh hukum Belanda, baik masyarakat maupun pemerintah.

⁶ Saat ini tidak lagi masuk dalam tweede kamer



Gambar 2. Pembagian Kekuasaan

Sebagai negara hukum yang demokratis maka sistim hukum di Belanda melakukan pemisahan kekuasaan karena hal ini penting untuk menjaga kekuasaan negara tidak berada hanya di tangan satu orang. Karena jika kekuasaan tersebut tidak dipisahkan maka ada kemungkinan bahwa pemerintah dapat menyalah gunakan kekuasaannya. Belanda, sebagai sebuah negara hukum, memiliki tiga pembagian kekuasaan (Trias Politika), seperti terlihat pada Gambar 2, yaitu (1) Kekuasaan Legislatif (Wetgevende macht); membuat aturan hukum, dilaksanakan oleh Pemerintah, Parlemen (eerste dan tweede kamer), dan Dewan Propinsi (Provinciale Staten) / Dewan Kota (gemeenteraad) (2) Kekuasaan Eksekutif (Uitvoerende macht); menerapkan aturan hukum, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat-Daerah, Polisi dan Jaksa Penuntut Umum (Openbaar Ministerie), (3) Kekuasaan kehakiman (Rechterlijke macht); menyelesaikan konflik jika aturan tidak jelas atau tidak diterapkan dengan benar, kekuasaan ini dilaksanakan oleh Kehakiman (Rechtspraak) dan Mahkamah Agung (de Hoge Raad).

2) Pemerintahan

Negara Belanda juga berbentuk kerajaan dengan bentuk pemerintahan menganut sistem Demokrasi Parlementer dibawah Monarki Konstitusional. Konstitusi Belanda (Grondwet) adalah konstitusi tahun 1814, 1848 dan perubahan terakhir pada tahun 2002. Nama resmi negara Belanda adalah Kingdom of the Netherlands, atau disebut the Netherlands, atau Holland (sebenarnya Holland adalah nama dari salah satu provinsi). Kekuasaan pemerintahan Belanda sebagai negara hukum yang demokratis dibagi menjadi tiga kekuasaan penting yaitu (1) Eksekutif, (2) Legislatif, dan (3) Kehakiman.

(a) Eksekutif

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang kepala negara yaitu tahta keturunan kerajaan dan saat ini dipegang oleh Ratu Beatrix dengan nama lengkap adalah Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje Nassau. Putra mahkota kerajaan adalah Prins Willem-Alexander yang beristrikan Prinses Máxima yang merupakan wanita keturunan Argentina. Sedangkan kepala pemerintahan Belanda dipegang oleh seorang Perdana Menteri, yang mulai 14 Oktober 2010 sampai saat ini dijabat oleh drs. Mark Rutte (dari partai VVD), perdana Menteri sebelumnya dijabat oleh J.P. Balkenende (2002-2010). Kepala pemerintahan membawahi menteri-menteri dan Staatssecretaris yang menjalankan pemerintahan. Belanda memiliki dua buah ibu kota yaitu ibu kota pemerintahan di Den Haag dan ibu kota negara di Amsterdam.

Pemerintahan daerah terdiri dari 12 provinsi (lihat lampiran 6) dimana masing-masing provinsi memiliki (1) Dewan Provinsi atau Provinciale Staten yang dipilih secara lokal dengan tugas untuk mengontrol eksekutif, (2) Eksekutif provinsi atau het college van Gedeputeerde Staten (GS) yang dipilih oleh Dewan Provinsi. Provinsi dikepalai oleh seorang komisioner Ratu yang ditunjuk oleh Crown (Ratu dan Menteri), di provinsi Limburg komisaris ratu juga disebut sebagai Gubernur.

(b) Legislatif

Kekuasaan legislatif berdasarkan grondwet 1814 disebut Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden⁷ menggunakan sistim dua kamar/bicameral (tweekamerstelsel⁸) yaitu (1) Eerste-kamer, dan (2) Tweede kamer. Eerste kamer juga disebut Senat yang merupakan majelis tinggi yang lebih bersifat konservatif dengan jumlah 75 anggota yang dipilih secara tidak langsung dari 12 provinsi. Eerste kamer tidak dapat mengajukan rancangan UU, namun ia memiliki kewenangan untuk menyetujui RUU, termasuk hak Veto, sebelum dapat disahkan sebagai UU yang berkekuatan hukum. Sedangkan tweede kamer (house of representative) merupakan majelis rendah yang lebih progresif yang terdiri dari 150 anggota yang dipilih secara langsung dan merupakan representasikan kepentingan negara secara proporsional dalam keanggotaan partai. Konsep ini dapat diibaratkan sebagai motor dan rem, tweede kamer berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan dan perubahan sedangkan eerste kamer lebih berfungsi sebagai rem jika tweede kamer bergerak melakukan perubahan terlalu cepat. Sehingga dapat disimbolkan bahwa tweede kamer digerakkan oleh mereka yang masih berusia muda sedangkan eerste kamer adalah mereka yang telah berusia lebih tua. Eerste kamer maupun tweede kamer memiliki empat hak yang sama yaitu: hak untuk menentukan budget, hak interpelasi, hak bertanya kepada menteri dan staatsecretary, dan hak penyelidikan. Sedangkan tweede kamer memiliki dua hak tambahan lagi yaitu hak amandemen dan hak untuk mengajukan legislasi.

(c) Kehakiman

Kekuasaan kehakiman memiliki struktur sistim yudisial:

⁷ http://nl.wikipedia.org/wiki/Staten-Generaal_van_het_Koninkrijk_der_Nederlanden

⁸ <http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweekamerstelsel>

- (1) Pengadilan distrik, yang terdiri dari 19 distrik dan setiap distrik memiliki pengadilan sendiri-sendiri.
- (2) Pengadilan Banding, dimana 19 distrik yang ada dibagi menjadi maksimum 5 (lima) area pengadilan banding yang terbagi atas daerah utara di kota Leeuwarden, daerah selatan di kota 's-Hertogenbosch, daerah timur di kota Arnhem, dan daerah barat di kota den Haag dan Amsterdam.
- (3) Pengadilan Khusus, yang khusus menangani kasus-kasus hukum administrasi.
- (4) Mahkamah Agung, adalah pengadilan tertinggi yang menangani masalah hukum Perdata, Pidana, dan Pajak di Belanda. Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk mendengar banding kasasi dan tugas lain yang diperintahkan oleh hukum.

3) Hak Asasi Manusia (*Mensenrechten*)

Belanda memiliki tradisi yang panjang dalam hal hak asasi manusia. Sebagai contoh Belanda telah menerima pencari suaka politik sejak abad ke 16, hal ini dapat dilihat dari sejarah bahwa pada abad ke 16 Belanda menerima pencari suaka dari Spanyol dan Yahudi Portugis. Sedangkan pada tahun 1990an, Belanda juga menerima pencari suaka dari bekas negara Yugoslavia, bekas negara Soviet, Iraq, Ghana, Somalia, Sri Lanka dan Iran. Pada tahun 1990an jumlah pencari suaka politik meningkat hingga mencapai 50,000 orang pada tahun 2000. Karena itulah pada tahun 2000, pemerintah Belanda memutuskan untuk merubah undang-undang yang membatasi pencari suaka politik masuk ke Belanda. Hal yang sama juga terjadi pada imigran dimana pada tahun 2004, kebijakan imigrasi semakin diperketat. Yaitu bahwa imigran akan diterima dengan tiga alasan: (1) Jika kehadiran mereka memberikan dampak positif pada Belanda, (2) Jika mereka diperbolehkan tinggal di Belanda atas dasar hukum Internasional, dan (3) Jika atas dasar alasan-alasan kemanusiaan mereka dapat diterima.

Dukungan Hak Asasi Manusia baik yang ekstrim maupun yang normal juga dilaksanakan secara konsekwen seperti yang ekstrim adalah diijinkannya pemakaian cannabis, ganja, dihapuskannya hukuman mati, dan euthanasia. Sedangkan yang normal adalah hak untuk berbicara, menyampaikan pendapat, demokrasi, memilih kehidupan, pendidikan, dan lain lain telah mendapat tempat yang sangat istimewa di Belanda. HAM ini juga terlihat dari kualitas penjara dan perlakuan terhadap tahanan yang sangat manusiawi. Bahkan hak terhadap hewanpun mendapat perlakuan yang istimewa dengan adanya Partij voor de Dieren (PvdD) yaitu partai yang memperjuangkan hak-hak hewan.

4) Partai Politik

Tweede kamer (*house of representative*) dipilih secara langsung dengan sistim perwakilan proporsional. Saat ini ada 10 partai di tweede kamer yaitu yang terbesar adalah VVD, PvdA, PVV, dan CDA (Lihat tabel 1 dan Lampiran 10). Dinamika politik dan isu-isu nasional dan internasional telah menggeser dominasi partai-partai yang sebelumnya merupakan unggulan. Sebagai contoh PVV yang didirikan oleh Geert Wilder pada tahun 2006 saat ini telah menempati urutan ke 3 di tweede kamer. PVV sukses mengangkat isu tentang "alloctonen" atau imigran dengan semboyan yang sering didegungkan adalah "Nederland is Vol", yang berarti Belanda sudah terlalu banyak diisi oleh para imigran.

Karena banyaknya partai yang ada di Belanda, maka Pemerintahan yang terbentuk umumnya merupakan pemerintahan koalisi. Seorang yang disebut informateur (mediator) ditunjuk untuk memberikan masukan tentang partner-partner koalisi. Umumnya pembentukan memerlukan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan yang memerlukan negosiasi antara pimpinan partai untuk dapat mempuat koalisi. Sementara proses berlangsung Perdana Menteri menyerahkan kekuasaan seluruh pemerintahan (menteri dan Staatssecretaris) kepada Ratu dan memberikan kesempatan kepada

pemerintahan sebagai pelaksana pemerintahan sampai pemerintahan yang sah terbentuk. Jika pimpinan koalisi telah berhasil mencapai kesepakatan maka ratu akan meminta formatur untuk membentuk pemerintahan. Pemerintahan yang terbentuk kemudian akan dikukuhkan oleh ratu sebagai pemerintahan yang sah.

5) Politik Internasional

Belanda adalah pendiri dan anggota Uni Eropa (EU), NATO, dan OECD. Belanda juga termasuk negara yang telah menandatangani Kyoto Protocol. Kota den Haag merupakan tempat dari kurang lebih 80 organisasi Internasional termasuk NGO's yang bergerak dalam bidang perdamaian, hukum, dan keamanan. Belanda juga merupakan tempat pelaksanaan peradilan internasional yang dilaksanakan baik di (sekitar) den Haag seperti: *the Permanent Court of Arbitration, the International Court of Justice, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, the International Criminal Court and the Special Tribunal for Lebanon*. Inilah yang menyebabkan den Haag dikenal sebagai "ibu kota hukum di dunia". Kebijakan Luar Negeri (LN) Belanda diarahkan untuk mempromosikan beberapa tujuan antara lain: Aturan hukum (*the rule of law*), HAM, dan Demokrasi. Prioritas kebijakan politik LN diarahkan untuk memperkuat integrasi eropa, memastikan keamanan dan stabilitas Eropa (melalui mekanisme NATO dan EU), dan turut aktif berpartisipasi dalam misi PBB manajemen konflik dan sebagai penjaga perdamaian (*peace keeping*).

Belanda melaksanakan politik LN dalam kerangka organisasi multilateral. Belanda adalah negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam PBB dan organisasi multilateral lain seperti NATO, EU, *the Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE), *the Council of Europe* (CoE), *the Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *the World Trade Organization* (WTO), dan *the International Monetary Fund* (IMF).

Belanda juga memiliki ikatan yang kuat dalam Benelux (Belgium, Netherland, dan Luxemburg) yang memungkinkan warga negara

masing-masing untuk melakukan mobilitas tanpa border control. Bentuk inilah yang menginspirasi persetujuan Schengen yang memungkinkan 25 negara di Eropa melakukan mobilitas manusia, barang, dan jasa tanpa memerlukan Visa. Belanda juga merupakan motor dalam penyatuan mata uang Eropa (Euro).

f. Ekonomi⁹

Walaupun Belanda adalah sebuah negara kecil namun Belanda merupakan sebuah negara kaya (*wealth country*) yang memiliki perekonomian makro sangat kuat. Belanda termasuk dalam 10 besar negara didunia yang memiliki nilai ekspor terbesar dan dalam hal GDP masuk urutan diantara 20 negara besar di Dunia. Belanda memiliki GDP (2010) sebesar \$849 milyar dengan pertumbuhan GDP (perkiraan 2011) sebesar 2.0%. GDP per kapita pada tahun 2010 adalah \$ 41,691. Hal ini dimungkinkan karena Belanda memiliki infrastruktur dan sarana transportasi yang sangat memadai baik darat, laut, dan udara. Seperti diketahui bahwa Rotterdam merupakan pelabuhan laut terbesar di dunia dan memiliki aktifitas bongkar muat kontainer keempat di Dunia. Demikian pula dengan Schiphol yang merupakan bandar udara keempat terbesar di daratan Eropa barat. Belanda juga telah mengembangkan sarana telekomunikasi yang sangat baik. Dengan kelebihan tersebut menyebabkan Belanda merupakan pintu bagi perdagangan di Eropa.

Untuk membuat iklim perekonomian bergairah, maka Belanda memberikan kemudahan dan penyederhanaan birokrasi dalam hal investasi. Belanda juga memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki kapasitas yang baik. Belanda juga memungkinkan orang untuk berinteraksi secara Internasional karena Belanda juga terbiasa menggunakan bahasa Inggris selain bahasa nasionalnya.

Belanda meletakkan daya saing ekonominya pada sektor-sektor diluar natural resources. Sektor paling dominan dalam iklim ekonomi di Belanda adalah sektor Jasa bisnis. Sektor jasa ini telah menunjukkan peningkatan

⁹ http://www1.minbuza.nl/en/You_and_the_Netherlands/About_the_Netherlands/Economy

yang baik, sementara itu sektor pertanian dan industri mulai mengalami penyusutan. Oleh karena itu hampir 80% tenaga kerja di Belanda berada pada sektor pelayanan dalam bidang-bidang antara lain transportasi, finansial dan bisnis (termasuk perbankan dan asuransi), dan distribusi barang. Sektor lain yang memiliki kontribusi secara konsisten adalah retail, restaurants, perawatan, jasa dan perlindungan kesehatan. Selain itu bidang-bidang yang penting dalam industri a.l. *food processing, chemicals, oil refining and electrical*. Disamping itu sektor pertanian juga merupakan bagian penting bagi perekonomian Belanda seperti misalnya bisnis bunga Tulip di taman Keukenhof telah menjadi trade mark dari negeri Belanda. Sebagai contoh, Belanda setiap tahun mengeksport 4 juta bunggul bunga Tulip, 60% nya diekspor ke German, Inggris, Perancis, dan Jepang. Bahkan customer terbesar dari Amerika misalnya mengimpor bunggul bunga Tulip sebanyak 900 juta per tahun. Sektor pertanian (dan perikanan) ini memberikan sumbangsih GDP sebesar 2%.

Walaupun dalam sektor energi khususnya produksi minyak mentah, Belanda termasuk kecil, namun Belanda merupakan producer terbesar kedua dan exportir gas alam terbesar kedua setelah Norwegia. Pada awal tahun 2010 Belanda memiliki 1.4 milyar *cubic feet* cadangan gas alam yang diprediksi akan habis pada tahun 2030; pemerintah memperoleh sebesar 14 milyar dollar dari eksplorasi, pajak, dan lain-lain. Karena itu untuk menjaga kekurangan energi di masa depan, saat ini Belanda telah membuat kerja sama jangka panjang dengan negara-negara penyuplai seperti Algeria, Kazakhstan, Libya, Qatar, dan yang terpenting adalah Russia. Sebagai contoh perusahaan pipa gas Belanda, Gasunie yang dimiliki pemerintah Belanda, memiliki saham sebesar 9% di Gazprom's Nord *Stream pipeline* yang mengirimkan gas dari Rusia ke Jerman melalui laut Baltik. Belanda sebenarnya ingin menjadi "hub" yang mengumpulkan gas dari berbagai sumber seperti laut utara, Algerian, *Qatari liquefied natural gas (LNG)*, dan Rusia untuk didistribusikan melalui pipa ke kontinen Eropa.

Tabel-2 Sumber Ekonomi Belanda

No. Sektor	% GDP	Jenis Produk
1 Pertanian dan perikanan	2	<i>dairy, poultry, meat, livestock, flower bulbs, cut flowers, vegetables and fruits, sugar beets, potatoes, wheat, barley.</i>
2 Industri	24	<i>agro-industries, steel and aluminum, metal and engineering products, electric machinery and equipment, bulk chemicals, natural gas, petroleum products, construction, transport equipment, microelectronics, fishing.</i>
3 Service	74	<i>trade, hotels, restaurants, transport, storage and communication, financial (banking and insurance) and business services, care, and other.</i>

Dalam bidang perdagangan dapat dilihat bahwa export dan impor Belanda pada tahun 2010 berkisar sebesar \$523.3 Milyar untuk Ekspor dan \$468.4 Milyar untuk Impor. Ekspor Belanda meliputi mesin dan peralatan transport, kimia, bahan bakar mineral, makanan olah, tembak, dan produk-produk pertanian termasuk bunga. Sedangkan produk impor meliputi bahan bakar minera dan minyak mentah, peralatan transportasi, kimia, dan barang-barang konsumsi. Dalam bidang ekspor-impor maka 80% export Belanda adalah untuk negara-negara Uni Eropa (EU), dan 70% impor Belanda juga berasal dari negara-negara EU. Negara-negara yang memiliki perdagangan secara signifikan dengan Belanda antara lain: Jerman, Perancis, Belgia, Inggris, Amerika, dan China.

g. Sosial-Budaya

1) Bahasa

Bahasa Belanda adalah bahasa yang dipergunakan oleh lebih dari 22 juta orang di Belanda dan Belgia. Bahkan 60 ribu orang yang tinggal di barat laut Perancis berbahasa dengan dialek Belanda. Bahasa Belanda juga dipergunakan dalam pemerintahan dan pendidikan di negara bekas koloni Belanda seperti Suriname, Aruba, dan Nederland Antiles (bagian dari kerajaan Belanda). Sedangkan di Indonesia, orang-orang tua di beberapa daerah seperti Ambon, Manado, Kupang masih menjaga hubungan kekerabatan dengan berbicara bahasa Belanda. Sedangkan di Afrika, bahasa Belanda masih dipergunakan juga di Afrika Selatan. Bahkan bahasa Belanda

masih mempengaruhi berbagai istilah dan penyebutan khususnya dalam perkapalan, pekerjaan air, dan pertanian.

Bahasa Belanda juga diajarkan di 250 universitas di seluruh dunia. Sedangkan di Eropa pada tahun 1980, Belanda dan Flanders (penduduk Belgia) membuat sebuah sistim yang disebut the *Nederlandse Taalunie* yang memperkenalkan bahasa Belanda keseluruh dunia dan membuat aturan tentang tata bahasa Belanda. Bahkan saat ini kita dapat menjumpai TV satelit yang berbahasa Belanda melalui channel BVN yang dapat diakses dari seluruh Dunia.

Khusus untuk provinsi Friesland, mereka menggunakan bahasa yang sedikit berbeda yaitu Frisian yang dipergunakan oleh kurang lebih 400 ribu orang (ini mirip seperti bahasa Inggris dan bahasa Scotlandia). Bahasa Belanda dipergunakan di sekolah mulai dari taman bermain (*kinder opvang*), *basisschool*, hingga Universitas. Namun demikian mayoritas penduduk Belanda juga dapat berbahasa Inggris dengan baik.

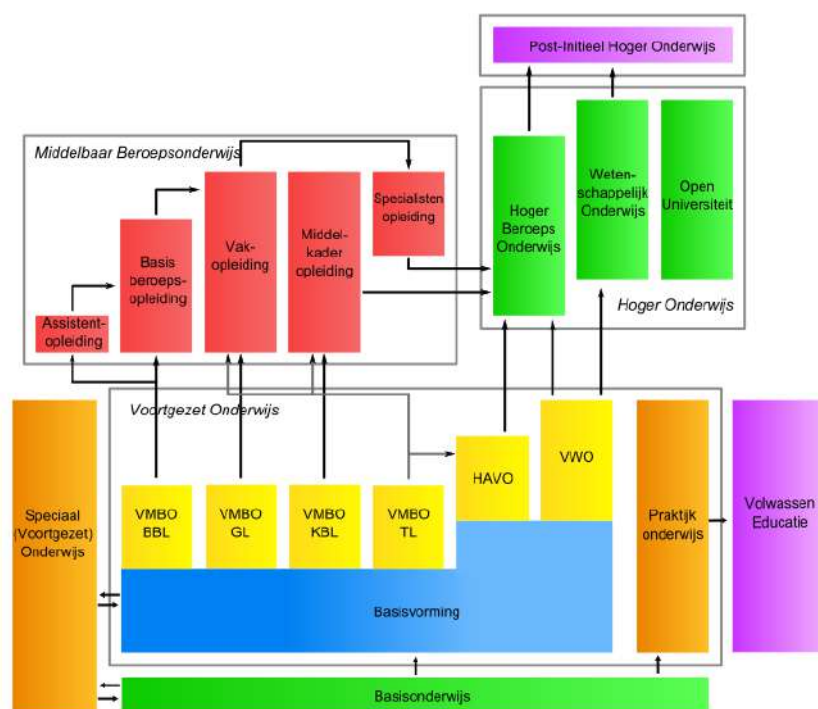
2) Seni

Hal yang paling menonjol dalam sejarah seni di Belanda sejak dahulu adalah tentang lukisan dengan maestro seni yang sangat terkenal seperti Vincent van Gogh, Rembrandt, Johannes Vermeer, Jan Steen, Piet Mondriaan dll. Namun demikian Belanda juga memiliki sejarah seni Arsitektur yang unik, dimana terlihat bangunan di Belanda memiliki ciri khas yang menggunakan batu bata merah pada bangunan secara terbuka. Selain itu seni patung, literatur, tari ballet, dan musik di Belanda juga sangat memukau. Namun saat ini Belanda telah masuk dalam seni modern yang menyesuaikan dengan perkembangan jaman seperti masuknya musik Rap dengan rapper Ali-B dan juga pianis terkenal berdarah Indonesia seperti Wibi Soerjadi.

3) Pendidikan

Belanda memiliki sejarah pendidikan yang cukup lama dan tua, sehingga menempatkan Belanda sebagai sebuah negara yang memiliki sistim pendidikan yang sangat baik. Pendidikan Belanda dibagi menjadi

tiga tingkatan (1) Basisonderwijs atau pendidikan dasar, (2) Voortgezet onderwijs atau pendidikan pendidikan sekunder, (3) Middelbaar Beroepsonderwijs atau pendidikan menengah kejuruan, dan (4) Hoger onderwijs atau pendidikan tinggi. Struktur Pendidikan di Belanda dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Sistim Pendidikan di Belanda

Sistim pendidikan di Belanda termasuk sangat ketat karena kualitas pendidikan diselenggarakan secara ketat. Pendidikan di Belanda sangat memperhatikan kompetensi anak didik, sehingga penentuan seseorang akan memasuki sekolah jenis apa sangat tergantung kepada kapasitas, kemampuan, dan bakat anak. Sebagai contoh, seseorang yang ingin melanjutkan ke Universitas dimungkinkan secara mulus hanya bagi siswa yang masuk kelas VWO, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi hanya dapat dicapai hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan akademis yang memadai.

Pada jenjang pendidikan tinggi, Belanda umumnya memiliki perguruan tinggi yang masuk dalam top level PT di dunia. Hal ini

dimungkinkan karena Belanda memiliki tradisi pendidikan tinggi yang berkualitas sejak dahulu. Jumlah PT di Belanda ada sekitar 23 PT besar. Sebagai contoh Universiteit Leiden merupakan universitas tertua yang berdiri pada tahun 1575. Karena itu tidak mengherankan jika pendidikan tinggi di Belanda merupakan kelompok pendidikan yang terbaik di Dunia. Saat ini pendidikan tinggi di Belanda telah memasuki fase kedewasaan dan telah membuka dirinya terhadap Internasionalisasi sehingga tidak mengherankan saat ini banyak pelajar asing melanjutkan studinya ke Belanda. Selain itu PT Belanda juga telah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar selain bahasa Belanda. Pendidikan di Belanda juga tidak terlepas dari sistem pendidikan di Eropa, karena itu PT di Belanda juga ikut aktif dalam program-program mobilitas ilmuwan Eropa melalui program Erasmus-Mundus yang merupakan kerja sama PT di Eropa. PT di negara Eropa diharapkan berpartisipasi mengikuti Bologna process yang mempromosikan kerja sama PT di Eropa. PT di Belanda umumnya telah melakukan peningkatan kualitas dan modernisasi dengan baik bahkan PT di Belanda menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar selain bahasa Belanda. Berdasarkan data dari the Times Higher Education Supplement, 85 persen universitas riset di Belanda masuk dalam 200 universitas terbaik di dunia dan program studi yang ditawarkan seluruhnya dalam Bahasa Inggris.

4) Teknologi dan Industri

Dalam bidang teknologi Belanda merupakan negara dengan tingkat teknologi yang tinggi. Hal ini dimungkinkan karena adanya dukungan penelitian diberbagai bidang, rekayasa maupun non-rekayasa, baik yang dilakukan oleh pusat penelitian besar yang dimiliki oleh pemerintah seperti TNO¹⁰ (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) yang melakukan penelitian di berbagai bidang, DLO¹¹ (Dienst Landbouwkundig Onderzoek) yaitu dinas penelitian ilmu

¹⁰ <http://www.TNO.nl>

¹¹ <http://www.lei.wur.nl/NL/>

pertanian dibawah Universiteit Wageningen. Kekuatan penelitian ini juga didukung oleh 12 perguruan tinggi yang masing-masing memiliki pusat penelitiannya masing-masing. Sedangkan penelitian dari swasta didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang didominasi oleh sekitar 7 perusahaan besar swasta dan 250 lebih perusahaan dengan kelas yang lebih rendah yang juga melakukan penelitian. Penelitian ini menghasilkan dua luaran yaitu berupa teknologi yang dapat langsung dipakai maupun hak cipta intelektual (intellectual eigendom/intellectual property) yang dengan jumlah yang signifikan. Bidang-bidang teknologi unggulan di Belanda sangat beragam mulai dari bidang Industri hingga pertanian dan rata-rata memiliki kualitas yang sangat baik.

Dalam bidang industri, Belanda memiliki beragam industri mulai dari industri strategis seperti Thales Netherland b.v.¹² yang bergerak dalam berbagai bidang di industri pertahanan. Industri strategis lain yang menonjol adalah industri kapal seperti Damen Schelde Naval Shipbuilding¹³ (DSNS), terletak di kota Vlissingen dan telah berdiri sejak 1875, yang membuat kapal perang, juga Damen Shipyard¹⁴ yang bergerak dalam industri perkapalan dan mesin kapal. Untuk industri udara dikenal dengan industri pesawat terbang yaitu FOKKER Technologies¹⁵. Untuk industri transportasi darat sangat terkenal dengan perusahaan DAF Nederland¹⁶ yang terletak di kota Eindhoven. Sedangkan industri non strategis terdiri dari berbagai industri swasta seperti Philips, Shell, ASML, DAF, Unilever, DSM, Akzo Nobel, Oce dan masih banyak lagi. Bahkan pemerintah Belanda secara khusus membuat kota Eindhoven sebagai pusat teknologi tinggi di Belanda dimana di Eindhoven terdapat berbagai industri berteknologi tinggi. Tidak heran jika Eindhoven telah ditetapkan oleh *Intelligent Community Forum* (ICF) di New York setelah diseleksi dari berbagai kota didunia

¹² <http://www.thales-nederland.nl/nl/pages/naval.shtml>

¹³ <http://www.damennaval.com/nl/company.htm>

¹⁴ <http://www.damen.nl/>

¹⁵ <http://www.fokker.com/>

¹⁶ http://www.daf.eu/NL/Pages/Homepage_DAF_Nederland.aspx

seperti Dublin, Chattanooga en Riverside, de Canadese plaatsen Stratford, Windsor-Essex dan Issy-les-Moulineaux (Frankrijk) pada bulan Juni 2011 sebagai kota terpandai di dunia (de slimste ter wereld^{17,18}). Hal ini dimungkinkan karena di Eindhoven terdapat beragam industri berkelas dunia, dan memiliki dukungan perguruan tinggi seperti technische universiteit eindhoven (TU/e) dan adanya Brainport Eindhoven yang merupakan komunitas masyarakat berpengetahuan tinggi di tiga kota yaitu Eindhoven-Veldhoven-dan Helmond dimana ketiga kota tersebut terletak industri-industri yang fokus pada pengembangan teknologi tinggi di Belanda. Kebijakan industri di Belanda saat ini lebih dititik beratkan pada pengembangan teknologi tinggi dalam mendukung konsep knowledge based ekonomi. Sebagai contoh ASML¹⁹ adalah perusahaan yang terletak di kota Veldhoven yang memproduksi mesin pembuat Chip untuk produk elektronik, dengan sumber daya manusia yang dimilikinya 90% adalah bergelar Doktor diberbagai bidang Teknologi. Karena itu industri yang berada di Belanda lebih menekankan pada pekerjaan penelitian dan pengembangan, sedangkan untuk produksi dibangun pabrik diluar negara Belanda. Yang menarik adalah bahwa industri-industri di Belanda justru digerakan oleh insinyur-insinyur dari luar Belanda, konsep ini barangkali merupakan penerapan dari strategi brain-gain. Sebagai contoh Philips telah membangun Philips Hightech Campus²⁰ di Eindhoven dimana disana berkumpul para insinyur brilian dari seluruh dunia yang digaji besar dengan berbagai insentif menarik untuk melakukan penelitian dan pengembangan bidang teknologi.

h. Hankam

1) Pertahanan

Dalam bidang Hankam, Belanda memiliki angkatan perang sendiri yang merupakan bagian dari pertahanan Belanda terdiri dari Angkatan

¹⁷ <http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/8823060/Regio-Eindhoven-de-slimste-ter-wereld.ece>

¹⁸ <http://www.brainport.nl/>

¹⁹ <http://www.asml.com/asml/show.do?ctx=427>

²⁰ <http://www.hightechcampus.nl/go/pages/welcome>

Darat (Koninklijke Landmacht), Angkatan Laut (Koninklijke Zeemacht), Angkatan Udara (Koninklijke Luchtmact), Marinir (Koninklijke Marine), dan Polisi Militer (Koninklijke Marechaussee). Dalam bidang pertahanan Belanda memiliki beberapa sekolah militer antara lain Koninklijke Militaire Academie (KMA) di Breda yang berdiri pada tahun 1828, Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) di Den Helder, het Instituut Defensie Leergangen (IDL) di den Haag, de Faculteiten Militaire Wetenschappen di Breda, Leergang Top-management Defensie (LTD) di den Haag, yang semuanya terkoordinasi dalam Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

Belanda juga merupakan negara pengagas dan anggota Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) atau dikenal sebagai NATO. Bahkan telah tiga orang Belanda yang menjadi sekjen NATO yaitu Dirk Stikker (21 April 1961- 1 Agustus 1964), Joseph Luns (1 Oktober 1971- 21 Juni 1984), dan Jaap de Hoop Scheffer (1 Januari 2004- 1 Agustus 2009). Oleh karena itu dalam bidang kebijakan pertahanan Belanda merupakan satu kesatuan dalam NATO.

2) Keamanan

Sedangkan dalam bidang keamanan diatur oleh Polisi (Politie) yang memiliki beragam divisi anantara lain: Polisi lalu lintas (Dienst Verkeerspolitie), Polisi air (Dienst Waterpolitie), Polisi kereta api (Dienst Spoorwegpolitie), Kerjasama operasional (Dienst Operationele Samenwerking), Reserse, (Dienst Nationale Recherche), Dinas Interpol (Dienst IPOL), Dinas keratuan dan perlindungan politik (Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging), Dinas intervensi khusus (Dienst Speciale Interventies), Dinas layanan reserse khusus (Dienst Specialistische Recherche Toepassingen). Polisi Belanda terdiri dari 25 kekuatan polisi regional dan korps landelijke politiediensten/ the National Police Services Agency (KLPD). Setiap 25 regional polisi Belanda dikepalai oleh sebuah lembaga polisi regional. Untuk menjadi

seorang Polisi dididik melalui suatu akademi polisi (Politieacademie²¹).

10. Kondisi Khusus (Temuan Menonjol) Negara Belanda.

Kondisi khusus tentang temuan yang menonjol yang patut dicatat dari negara Belanda antara lain pada bidang-bidang berikut:

a. Bidang Hukum

Belanda merupakan semua negara yang sangat menjunjung tinggi hukum (*recht*). Dapat dicatat bahwa salah satu hal yang menonjol dibidang hukum adalah pada peran Belanda dalam penegakkan hukum. Karena itu, Belanda dikenal sebagai “ibu kota hukum di dunia” khususnya Den Haag yang telah menjadi tempat pelaksanaan berbagai peradilan internasional seperti: *the Permanent Court of Arbitration, the International Court of Justice, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, the International Criminal Court and the Special Tribunal for Lebanon*.

Peran penting Belanda dalam bidang hukum ini juga terefleksikan dalam dukungan Belanda terhadap HAM (*mensenrechten*) dimana Belanda sangat menjunjung tinggi HAM dan bahkan terlihat berlebihan dalam beberapa hal seperti diketahui bahwa Belanda juga menjadi tempat transit narkoba. Bahkan jual beli dan penggunaan narkoba, ganja dan sejenisnya dengan bebas dikonsumsi di Belanda. Bahkan telah menjadi rahasia umum bahwa *Coffeeshop* merupakan tempat untuk menikmati cannabis. Namun saat ini kabinet Belanda mulai melakukan pembatasan walaupun tidak terlalu keras. Namun untuk narkoba jenis keras seperti heroin, kokain dan ekstasi tetap di larang di Belanda. Namun penggunaan narkoba kelas rendah seperti cannabis (*Cannabis*) diijinkan dalam batas konsumsi. Penjualan dalam jumlah kecil dan terbatas (dibawah 5 gram) dari produk cannabis (*Cannabis*) diberikan toleransi untuk digunakan di “*coffessshops*” dengan pengawasan yang ketat.

Kebebasan HAM ini juga telah menjadi ciri masyarakat Belanda yang mendukung kebebasan untuk berbicara, menyampaikan pendapat, menentukan nasib sendiri, dan penghargaan terhadap individualisme. Tidak

²¹ <https://www.politieacademie.nl/Pages/Welkom.aspx>

heran banyak isu-isu sensitif dalam sudut pandang negara lain sangat bebas dibicarakan di Belanda.

b. Bidang Politik

Dalam bidang politik dapat dicatat beberapa hal menonjol seperti isu tentang imigrasi yang diangkat oleh partai Partij Voor de Vrijheid (PVV) yang disuarakan oleh ketua-nya Geert Wilders. Apa yang disampaikan Geert Wilders didasari atas situasi dimana Belanda saat ini telah “dipenuhi” oleh kaum imigran (*alloctone*) khususnya dari Marokko dan Turki. Isu ini telah menyebabkan beragam kontroversi antara lain dengan adanya isu film “Fitna” dan bahkan telah terjadi miskomunikasi dengan kaum minoritas di Belanda. Isu lain dalam bidang politik adalah dengan meningkatnya pertumbuhan masyarakat China yang dicurigai masuk lewat jalur *human trafficking*. Bidang politik yang menarik untuk dicermati di Belanda adalah bahwa aparat pemerintahan Belanda umumnya bersahaja dan memiliki *empathy* dan tanggung jawab sosial yang baik.

c. Bidang Ekonomi

Dalam bidang Ekonomi, maka Belanda termasuk negara yang kaya namun tidak memiliki SKA. Belanda sangat pandai dalam menggerakkan ekonominya yang berbasis pada pelayanan, perdagangan, dan industri berteknologi tinggi. Belanda juga telah membangun infrastruktur yang modern dalam berbagai bidang dalam mendukung motor perekonomian negara. Selain itu Belanda juga memberikan berbagai kemudahan bagi investor untuk melakukan investasi di Belanda. Termasuk diantaranya tersedianya jumlah tenaga kerja yang berpendidikan di Belanda, telekomunikasi, transportasi yang modern dan beragam stimulus investasi lain.

d. Bidang Pendidikan

Temuan penting bidang pendidikan adalah pada Internasionalisasi PT di Belanda dan adanya beragam kesempatan beasiswa yang diberikan oleh Belanda lewat Nuffic-NESO. Nuffic-NESO adalah organisasi non-profit yang ditunjuk resmi dan didanai oleh pemerintah Belanda untuk menangani

berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan tinggi Belanda. Neso adalah perwakilan Nuffic, organisasi Belanda yang menangani kerja sama internasional di bidang pendidikan tinggi. Sebagai contoh, Belanda aktif memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Belanda lewat beasiswa Stuned, selain itu Belanda juga memberikan kesempatan penelitian lewat pendanaan KNAW. PT di Belanda juga telah menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar sehingga memudahkan bagi orang asing untuk dapat belajar di Belanda.

e. Bidang Teknologi

Dalam bidang teknologi, Belanda merupakan negara yang memfokuskan diri pada pengembangan teknologi tinggi diberbagai bidang. Belanda juga memberikan kesempatan yang sama kepada pemuda-pemuda terbaik dari berbagai negara untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan berteknologi tinggi di Belanda.

f. Bidang Hankam

Sebagai negara anggota NATO dan PBB, Belanda aktif ikut dalam berbagai peran militer dibawah kedua payung tersebut khususnya pada operasi perdamaian. Belanda telah aktif memimpin berbagai tugas perdamaian dibawah PBB diberbagai belahan dunia. Belanda juga aktif dalam berbagai *humanitarian assistance*, *disarmament*, dan *arm conflict* dibawah payung PBB.

BAB IV

FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HUBUNGAN ANTARA NEGARA BELANDA DENGAN REPUBLIK INDONESIA

Kemajuan teknologi yang terjadi sedemikian pesat mengakibatkan kemudahan untuk mendapatkan informasi dari segala penjuru dunia. Berbagai kejadian dan perkembangan dunia, dengan mudah dapat di peroleh setiap warga negara diberbagai negara termasuk di Indonesia. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi perkembangan di dalam negeri yang dapat terlihat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implikasi yang terjadi dapat mengarah pada hal-hal yang positif dan dapat juga mengarah pada hal-hal yang bersifat negatif tergantung pada daya nalar masyarakat. Sehubungan dengan itu perlu dibangun suatu sikap masyarakat yang mampu menyikapi segala perubahan yang terjadi sehingga tidak merugikan kepentingan nasional. Beberapa hal yang perlu diantisipasi yang dapat mempengaruhi keadaan dalam negeri adalah perkembangan global, regional dan nasional.

Belanda adalah salah satu negara anggota Uni Eropa (EU) yang memiliki arti penting bagi Indonesia karena memiliki hubungan historis kedua negara dari aspek politis, kultural dan ekonomi maupun dalam kaitannya dengan percaturan politik dan ekonomi regional serta internasional, karena posisinya yang sangat strategis terutama dalam hubungannya dengan Indonesia. Mengingat letak dan posisinya yang sangat strategis itu, maka Indonesia perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hubungan kedua negara. Secara umum hubungan Indonesia dengan Belanda mengalami pasang surut karena beberapa masalah antara lain, masalah Irian Barat (sekarang Papua), dimana sesuai hasil persetujuan konperensi Meja Bundar tahun 1949 Belanda harus menyerahkan Irian Barat ke Indonesia namun dalam pelaksanaannya Irian Barat baru menjadi wilayah Indonesia pada tahun 1962 itupun melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Selain itu pada tahun 1992 hubungan bilateral Indonesia – Belanda kembali meruncing lagi karena Indonesia membubarkan IGGI (International Group of

Government Indonesia) dengan alasan Belanda terlalu ikut campur dalam urusan domestik dalam negeri Indonesia. Sekalipun demikian Pemerintah kedua negara terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Hal tersebut terlihat dari upaya pemerintah Belanda untuk menetralsir LSM anti Indonesia yang selalu memprovokasi masalah-masalah tersebut seperti yang dilakukan oleh para simpatisan gerakan separatis RMS (Republik Maluku Selatan) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di negeri Belanda dan demikian juga upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam melaksanakan proses demokratisasi di Indonesia didukung oleh pemerintah Belanda dan berusaha menetralsir dan menekan kelompok-kelompok yang mendiskreditkan Indonesia. Hubungan Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda akhir-akhir ini dapat dikatakan merupakan puncak harmonisasi dari hubungan yang pernah terjalin selama ini, hal ini antara lain ditandai dengan kehadiran Menlu Bernard Bot pada peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI pada Tanggal 17 Agustus 2005, yang pada saat itu Menlu Kerajaan Belanda menyampaikan penerimaan secara moral dan politik terhadap kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, saat ini dirasakan hilangnya kerikil-kerikil yang selama ini terasa mengganjal hubungan kedua negara.

11. Pengaruh Global.

Demokratisasi yang dikembangkan oleh negara-negara barat sejalan dengan derasnyanya arus globalisasi adalah demokrasi yang didasarkan pada paham liberal yang lebih mengedepankan esensi kebebasan dan pengakuan serta penghormatan terhadap hak-hak individu. Sehubungan dengan itu, isu terkait dengan hak azasi manusia, kebebasan dan keadilan dirasakan semakin menguat. Rasa ketidakadilan di masa lalu sering muncul kepermukaan dengan memanfaatkan "Kran Kebebasan" yang semakin luas sehingga sering memicu berbagai permasalahan yang apabila tidak dapat disikapi dengan tepat dapat menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih serius dan bahkan sampai pada tuntutan memisahkan diri dan membentuk suatu negara baru. Di samping permasalahan tersebut, dunia juga sedang menghadapi fenomena berupa benturan ideologi yang disebut sebagai "Triangular Ideologi", dimana "Neo Liberalisme" yang dimotori oleh Amerika Serikat berbenturan dengan "Sosial Demokrat" atau yang disebut dengan "New Lift" atau "Kiri baru", yang sedang berkembang pesat di negara-negara Eropa. Sementara itu gerakan Islam

yang bersifat moderat dan radikal juga saling berbenturan dengan neo liberalisme dan sosial demokrat. Ketiga ideologi tersebut di rasakan sangat mempengaruhi kondisi kehidupan di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia yang kondisinya memiliki penduduk cukup besar dan bersifat plural. Permasalahan global lain yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan nasional antara lain krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan dunia yang berdampak pada perekonomian global.

Pengaruh perkembangan lingkungan global terhadap hubungan Bilateral Belanda dengan Indonesia dari negara-negara maju dan adidaya maupun melalui suatu persekutuan organisasi internasional seperti Persekutuan Bangsa-bangsa (PBB), MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa), Uni Eropa (EU) atau NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) sangat mempengaruhi hubungan kedua negara, dimana eksistensi Belanda sebagai salah satu pendiri dan sebagai anggota aktif dari organisasi-organisasi tersebut dapat berperan memperkuat posisinya terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia mulai dari kepentingan politik, ekonomi, pertahanan keamanan dan berbagai hal yang berkaitan dengan hubungan kedua negara, seperti dalam hal masalah Papua dan Maluku.

Kebijakan Politik Luar Negeri Belanda dengan misinya untuk mempromosikan tatanan dunia dan membangun dunia yang aman, stabil dan sejahtera dimana Benua Eropa menjadi prioritas perhatian utama politik luar negerinya dan Belanda berkeinginan untuk berperan aktif menentukan masa depan Uni Eropa. Selain itu dari aspek keamanan maka NATO yang didirikannya bersama beberapa negara Eropa lainnya dianggap merupakan pilar utama keamanan Eropa dan dalam rangka mengurangi ketergantungannya dari Amerika Serikat. Belanda mengembangkan *European Security and Defence Identity* (ESDI) dan memfokuskan kepada *Peace Mission*. Dengan demikian maka Belanda juga menyatakan perang melawan Terorisme, pencegahan konflik dan membangun hubungan yang harmonis (rekonstruksi) dengan negara-negara lain termasuk hubungannya dengan Indonesia.

Perkembangan dunia global saat ini begitu cepat dan sangat berpengaruh pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan berbagai aspek lainnya dari suatu negara, secara institusi maupun hubungan antar negara, sehingga hal tersebut berpengaruh juga terhadap hubungan bilateral yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia termasuk juga hubungan Indonesia dengan Belanda.

Pengaruh Lembaga Internasional Multilateral seperti, PBB sangat diharapkan dapat berfungsi untuk memediasi berbagai kepentingan dari negara-negara di dunia namun hal tersebut terkadang tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya karena adanya hegemonitas negaranegara adidaya yang memainkan peran untuk kepentingannya sehingga mengorbankan kepentingan negara-negara lain yang berada di berbagai kawasan dunia, seperti negara-negara di kawasan Asia yang sering dijadikan sebagai obyek dari kepentingan negara-negara maju dalam memainkan kepentingannya mulai dari aspek politik, ekonomi, pertahanan keamanan dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kepentingannya. Hal tersebut sangat mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dengan Belanda yang saat ini sedang dikembangkan dalam berbagai bentuk kerjasama kedua negara.

Selain itu peran organisasi internasional lainnya seperti NATO, EU juga merupakan bentuk aliansi negara-negara yang mempunyai kepentingan untuk memainkan peranannya berkaitan hubungan bilateral Indonesia dengan Belanda khususnya terhadap eksistensi Belanda sebagai anggota aliansi tersebut. Berdasarkan *Treaty of Maastricht* atau *The Treaty on European Union* (TEU) yang ditanda tangani di Maastricht, Belanda menekankan pada tiga pilar yang berlaku bagi ke 27 negara anggota EU yaitu (1) Kebijakan luar negeri dan keamanan negara EU (CFSP), (2) Kerjasama kepolisian dan yudisial dalam hal kriminalitas (JHA), dan (3) Konsep tentang warga negaraan Eropa dan pengambungan sistim ekonomi dan keuangan (EMU). Namun demikian *Treaty of Maastricht* atau *The Treaty on European Union* (TEU) dan *Treaty of Rome* telah diamandemen pada tanggal 13 Desember 2007 dan berkekuatan hukum tetap mulai 13 Desember 2009 melalui Lisbon *Treaty* yaitu suatu persetujuan yang mengamandemen kedua treaty tersebut dalam hal konstitusi bagi nagara uni eropa (EU).

Hal ini memiliki makna bahwa dalam memandang hubungan Indonesia dan Belanda maka secara otomatis harus mempertimbangkan hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa, karena Belanda merupakan bagian dari Uni Eropa yang terikat pada Konstitusi Eropa sesuai *Lisbon treaty*.

12. Pengaruh Regional.

Perkembangan regional juga di pengaruhi oleh perkembangan global. Beberapa isu yang mempengaruhi perubahan situasi regional antara lain

“Pengayaan Uranium” (nuklir) Korea Utara yang dapat memicu ketegangan regional, dinamika politik Afganistan yang menimbulkan sejumlah pengungsi yang menuju berbagai negara, sebagian dari pengungsi tersebut singgah di berbagai daerah Indonesia secara ilegal. Kejenuhan ekonomi yang terjadi di Amerika dan Eropa kemungkinan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Asia yang mau tidak mau akan memicu persaingan ketat diantara sesama negara Asia. Perkembangan lain yang akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah diberlakukannya “Piagam ASEAN” dengan tujuan untuk mencapai terwujudnya satu Asean komonitas, satu ASEAN identitas dan ASEAN sebagai pasar tunggal. Dengan diberlakukannya piagam ASEAN, maka batas-batas negara akan semakin tidak jelas, sedangkan mobilitas masyarakat akan semakin meningkat.

Politik luar negeri Belanda mulai tahun 2007 menekankan pada misi mempromosikan tatanan dunia yang aman, stabil dan sejahtera. Dalam konteks ini, kebijakan politik luar negeri Belanda ditujukan untuk membantu menghapuskan konflik internasional serta mengurangi kemiskinan. Perhatian utama Belanda masih berada di benua Eropa, dimana negara Belanda sangat berperan aktif dalam menentukan Uni Eropa dan terikat dalam Konstitusi Eropa sesuai Lisbon Treaty.

Karena Belanda merupakan salah satu dari negara yang tergabung dalam Uni Eropa, dengan demikian Belanda secara otomatis merupakan jembatan perantara atau pintu masuk bagi Indonesia menuju negara-negara Eropa khususnya dalam upaya meningkatkan kerjasama dibidang ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. Terkait dengan hal tersebut, peran aktif Indonesia di dunia internasional di harapkan dapat mempengaruhi tatanan dunia yang sejalan dengan kepentingan nasional, dan dapat menggalang kerjasama internasional yang dapat mendukung pembangunan nasional. Kerjasama Indonesia dan Belanda sangat memperhatikan posisi geopolitik Belanda, peran Belanda di kawasan Eropa dan ditingkat internasional/multilateral serta latar belakang keterkaitan sejarah dan emosional antara Indonesia–Belanda. Hal ini tentu saja menjadikan posisi Belanda bertambah strategis bagi kepentingan pembangunan Indonesia.

Pengaruh lingkungan strategis tingkat regional, khususnya dikawasan Asean, terlihat dari keaktifan negara di Asean yang berupaya untuk meningkatkan kerjasamanya dengan negara-negara Uni Eropa melalui negara eropa tertentu,

seperti Malaysia, Thailand melakukan kerjasama dengan Eropa melalui Inggris. Demikian juga Vietnam ingin menggalang kerjasama dengan negara-negara Eropa melalui Perancis. Oleh karena itu, Indonesia harus memanfaatkan kerjasama bilateral Indonesia dengan Belanda dalam upaya memperluas kerjasama dengan negara-negara Eropa lainnya, dan menyelesaikan isu-isu berkaitan hubungan Indonesia dan Eropa seperti larangan terbang pesawat Indonesia ke Eropa.

Kerjasama bilateral Indonesia dengan Belanda dapat juga dimanfaatkan untuk dapat menjalin kerjasama dengan negara-negara Eropa lainnya, khususnya yang tergabung dalam Uni Eropa, karena itu Indonesia harus melakukan pembenahan dalam berbagai hal, seperti : a) Meningkatkan diplomasi perdagangan; b) Produk yang dihasilkan harus ramah lingkungan, tidak melanggar hak-hak tenaga kerja seperti upah buruh, tenaga kerja anak-anak dan lain sebagainya. Bila hal tersebut tidak dilakukan dengan cerdas maka Indonesia akan sulit melakukan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Eropa. Karena itu, Belanda yang merupakan mitra Indonesia juga akan kesulitan membantu Indonesia dalam membangun kerjasama dengan negaranegara yang tergabung dalam Uni Eropa.

13. Pengaruh Nasional.

Lingkungan nasional Indonesia tentunya akan ikut mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan Belanda. Sejarah masa lalu bangsa Indonesia yang pernah menjadi koloni Belanda yang memiliki dampak positif dan negatif merupakan sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia. Tentu saja hubungan emosional dan sejarah ini, pada masa kini dapat dilanjutkan dengan cara meningkatkan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Belanda sebagai dua negara yang sejajar.

Mencermati terhadap perkembangan dan kecenderungan nasional, baik politik, ekonomi dan keamanan, menunjukkan bahwa isu domestik yang timbul, tidak terlepas dari pengaruh eksternal, baik global maupun regional. Selain pengaruh faktor eksternal, terdapat pula sejumlah faktor dari dalam negeri yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional. Faktor tersebut antara lain, situasi ekonomi yang semakin memberatkan beban hidup, serta faktor politik, dan sosial lainnya. Akumulasi dari faktor eksternal dan internal tersebut kemudian muncul dalam berbagai bentuk eskalasi ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional, dan pada skala yang luas dapat mengganggu stabilitas kawasan.

Perkembangan dalam negeri seperti kondisi geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan sebagai faktor-faktor lingkungan internal yang ikut mempengaruhi implementasi hubungan bilateral kedua negara.

a. Aspek Geografi

Secara geografi Indonesia memiliki wilayah kedaulatan negara dengan luas wilayah daratan dan lautan yang merupakan salah satu negara kepulauan terluas di dunia. Di samping itu, wilayah Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang sangat berlimpah, di darat maupun di laut, didukung dengan letak geografis negara yang strategik dalam hubungan antar negara.

Kondisi geografis Indonesia merupakan salah satu modal dasar yang amat penting bagi bangsa Indonesia untuk dapat mengembangkan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia termasuk dalam hubungan bilateral dengan Belanda. Namun demikian kondisi nasional tersebut masih belum sepenuhnya didukung dengan infra struktur atau sarana prasarana yang memadai, sehingga menyulitkan dalam pengelolaan dan pengawasan serta adanya daerah-daerah yang seakan-akan terisolasi. Garis batas wilayah negara yang sedemikian panjang pun di beberapa tempat masih dipersengketakan oleh negara-negara tetangga, akibatnya kondisi tersebut telah membuka peluang bagi terjadinya kasus-kasus pelanggaran di beberapa wilayah/kawasan tertentu. Sampai saat ini pun ketentuan menyangkut batas wilayah nasional Indonesia masih belum dituangkan dalam undang undang, yang dapat memberikan kerangka dasar landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu aspek legalitas wilayah perbatasan menjadi penting artinya untuk mengamankan kedaulatan wilayah NKRI terutama dalam hubungan bilateral dengan Belanda.

b. Aspek Demografi

Indonesia juga merupakan suatu negara dengan populasi no. 4

terbesar didunia. Kondisi ini membuat Indonesia dipandang sebagai pasar yang potensial khususnya bagi barang-barang kebutuhan hidup manusia. Kondisi inilah yang membuat Indonesia menjadi strategis bagi Belanda, khususnya dalam sudut pandang perdagangan. Selain itu dengan populasi penduduk yang banyak maka Indonesia juga menjadi sebuah negara yang potensial untuk dieksploitasi bagi kebutuhan Industri manufaktur yang berbasis teknologi menengah kebawah karena pekerja Indonesia masih memiliki skill dan pengetahuan yang terbatas. Tidak heran banyak perusahaan asing termasuk Belanda membuka pabrik dan melakukan produksinya di Indonesia. Disisi lain dengan populasi yang besar maka seleksi masuk Perguruan Tinggi di Indonesia dilakukan melalui proses saringan yang ketat, tidak heran mereka yang masuk di PT ternama merupakan anak-anak dengan bakat diatas rata-rata. SDM demikian juga menjadi incaran bagi lembaga penelitian dan pengembangan asing untuk dapat memanfaatkannya. Hal ini juga yang menjadi kekuatiran terhadap terjadinya "*brain drain*" keluar Indonesia. Kekuatiran ini bahkan sekarang menjadi lebih mengkuatirkan karena negara-negara lain yang memiliki SDM terbatas bahkan telah mulai mencari bibit-bibit SDM Indonesia berkualitas sejak mereka berada di sekolah menengah.

c. Sumber Kekayaan Alam

Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam sampai saat ini belum mampu membuat masyarakat sejahtera (baru mensejahterakan sekelompok kecil masyarakat). Hal ini disebabkan oleh karena lemahnya sistem pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Kekayaan Alam tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan timbulnya beberapa masalah seperti kerusakan lingkungan, kesenjangan ekonomi yang disebabkan oleh pembagian hasil SKA yang tidak adil. Berangkat dari permasalahan ini kiranya dapat memicu timbulnya konflik horisontal maupun vertikal dan bila hal ini tidak disikapi dengan bijak. SKA yang ada di Indonesia belum dapat di eksplorasi dan eksploitasi atas kekuatan teknik dalam negeri. Karena itulah hal ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda yang telah memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan eksploitasi SKA seperti Shell.

d. Ideologi

Ideologi Pancasila sebagai sistem nilai nasional dirasakan semakin tereduksi oleh sistem nilai baru yang berkembang sejalan dengan derasnya arus globalisasi. Di samping itu, kearifan lokal dalam kerangka otonomi daerah dirasakan semakin kuat, namun sistem nilai tersebut tetap masih sejalan dengan sistem nilai nasional yaitu Pancasila.

Bangsa Indonesia menganut ideologi Pancasila yang bersifat terbuka, artinya adalah bahwa selain mengedepankan pada kepentingan nasional juga dapat mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu juga dapat mempersatukan seluruh perbedaan atau kemajemukan yang ada baik dari segi suku atau etnis, daerah, budaya, bahasa maupun agama.

e. Politik

Demokratisasi yang terjadi dirasakan lebih mengarah pada esensi kebebasan dan kurang mempertimbangkan esensi keadilan dan kesetaraan serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Hal ini sangat dipengaruhi oleh paham liberal yang dianut oleh negara-negara barat, sehingga sangat dirasakan adanya kebebasan dalam menuntut haknya yang terkesan secara berlebihan. Permasalahan lain adalah, pelaksanaan otonomi daerah cenderung lebih mengarah pada konsumtif tidak produktif sehingga banyak daerah otonom yang kurang memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dan daerah yaitu meningkatnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya daya saing daerah dan meningkatnya pelayanan publik. Sementara itu partai politik yang diharapkan sebagai pilar demokrasi dan mampu memberikan pendidikan politik kebangsaan kepada masyarakat justru cenderung mengarah pada "Kekuasaan". Kondisi tersebut dirasakan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat kepada pemerintah dan rasa antipati terhadap kehidupan politik.

Perbedaan pendapat para elit politik untuk menentukan atau merumuskan keputusan politik negara, khususnya menyikapi politik luar negeri masih diwarnai pro dan kontra, yang terkadang dapat menimbulkan

instabilitas politik, dan sering menggunakan pengerahan massa atau mobilisasi masyarakat untuk menekan pemerintahan dalam menentukan sikap atau kebijakan/politik dalam menyikapi berbagai peristiwa di dunia, khususnya menyikapi kebijakan USA, Israel dan sekutunya di Timur Tengah.

f. Ekonomi

Liberalisasi perekonomian belum dapat disikapi masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Liberalisasi perekonomian yang cenderung pada persaingan bebas berdampak kurang baik pada perekonomian rakyat karena pada umumnya mereka memiliki modal, penguasaan teknologi dan penguasaan pasar yang sangat terbatas. Menghadapi persaingan yang sangat ketat, diperlukan daya saing dan kemandirian ekonomi, namun hal ini belum dapat terbangun dengan baik, padahal Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar .

Akibat krisis ekonomi dunia dan krisis moneter yang masih berkepanjangan, meskipun masih dalam proses *recovery*, telah menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian nasional yang mengakibatkan meningkatnya jumlah angka pengangguran dan kemiskinan, sehingga sulit untuk mewujudkan kebersamaan untuk mencegah dan mengatasi tindak kejahatan teroris. Bahkan akibat ketidak berdayaan masyarakat tersebut justru dimanfaatkan oleh kelompok atau jaringan teroris untuk ikut serta memuluskan kegiatannya.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber kekayaan alam yang merupakan modal dasar bagi pelaksanaan perekonomian nasional yang telah didominasi oleh perusahaan negara asing khususnya cabang-cabang produksi yang strategis dan ekonomis, akan mempengaruhi melemahnya semangat wawasan kebangsaan atau nasionalisme warga negara, yang pada gilirannya dapat menjadi penghalang terwujudnya supremasi hukum.

g. Sosial Budaya

Sejalan dengan derasnya arus globalisasi, dapat dirasakan bahwa bangsa Indonesia cenderung terpolarisasi yang didasarkan pada kepentingan agama, etnis dan kelompok tertentu. Hal ini dirasakan sangat mengganggu proses integrasi bangsa yang justru dijadikan sebagai prasyarat keberhasilan

pembangunan nasional. Di samping permasalahan tersebut krisis ekonomi yang mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi rendah dan berdampak buruk pada peningkatan daya saing sumber daya manusia karena salah satunya adalah biaya pendidikan yang relatif tinggi sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah. Hal ini lebih diperburuk lagi dengan masalah pengangguran yang belum terpecahkan akibat krisis keuangan dunia dan terorisme yang secara aktif mengganggu ketentraman kehidupan bernegara.

Sikap primordialisme dan fanatisme sempit tentang agama masih mempengaruhi sebagian warga negara, yang pada akhirnya dapat menimbulkan suatu sikap radikalisme melalui suatu tindakan yang melanggar norma atau nilai budaya maupun hukum negara, termasuk melakukan tindakan kejahatan terorisme, dengan maksud untuk mewujudkan sikap primordialisme dan fanatisme yang mereka pahami. Kondisi ini akan menambah beban bagi pemerintah dalam mewujudkan supremasi hukum.

h. Hankam

Sejalan dengan perkembangan demokrasi, paradigma ancaman yang semula bersifat militer telah bergeser pada ancaman yang bersifat non militer atau ancaman non konvensional yang disebut sebagai ancaman asimetris. Ancaman asimetris ini bersifat trans nasional dengan aktor yang dapat berupa pribadi, maupun kelompok. Ancaman tersebut ditujukan keberbagai aspek kehidupan dengan maksud untuk merongrong kewibawaan pemerintah. Biasanya ancaman ditujukan kepada semua aspek kehidupan dengan memanfaatkan kelemahan dalam penegakan hukum dan kelemahan-kelemahan yang ada ditengah-tengah masyarakat.

14. Peluang dan Kendala.

a. Peluang.

- Hubungan sejarah dan emosional masa lalu membuat Belanda secara moral masih merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional Indonesia.

- Belanda adalah pendiri dan sekaligus sebagai anggota EU yang memiliki pengaruh kuat pada komunitas UE.
- Belanda memiliki pelabuhan laut dan bandara yang menjadi pintu masuk ke EU.
- Indonesia memiliki komoditas ekonomi berupa hasil olahan dari SKA yang banyak dibutuhkan oleh pasar EU.
- Belanda maju dalam bidang IPTEK yang diperlukan untuk pembangunan nasional, seperti pengelolaan sumberdaya alam, pengolahan limbah, pengembangan industri, pengolahan hasil pertanian.
- Belanda memiliki potensi besar investasi yang memungkinkan ditanamkan di Indonesia.
- Belanda telah membuka peluang kerjasama dalam pengembangan SDM, khususnya dengan Perguruan Tinggi.

b. Kendala.

- Supremasi Hukum di Indonesia belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
- Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Indonesia masih terbatas.
- Proses recovery sebagai dampak krisis multidimensi tahun 1998 masih belum tuntas.
- Persyaratan mutu produk yang ditetapkan EU tidak mudah dipenuhi sebagian pelaku usaha.
- Investasi menuntut persyaratan keamanan dan kepastian hukum (regulasi hukum yang jelas).
- Kondisi geografi yang berjarak jauh mengakibatkan terbatasnya jenis komoditas yang akan diimport maupun diekspor

BAB V

ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL NEGARA BELANDA DENGAN REPUBLIK INDONESIA

15. Umum

Hubungan Indonesia – Belanda mengalami pasang surut sejak tahun 1960, namun sejak beberapa tahun terakhir hubungan itu semakin membaik. Periode baru dibidang politik paska pengakuan secara politis dan moral atas kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 oleh kerajaan Belanda. Hal tersebut ditandai dengan kehadiran menlu kerajaan Belanda saat peringatan proklamasi kemerdekaan RI ke 60 tahun 2005 yang selanjutnya dipertegas dengan kunjungan PM Kerajaan Belanda Jan Peter Balkenende pada April 2006 ke Indonesia. Hubungan yang harmonis antara Indonesia dan Kerajaan Belanda yang telah terjalin sejak lama tentu perlu terus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya di masa yang akan datang. Potensi-potensi kemitraan antara kedua negara perlu dieksplorasi lebih intensif untuk kemudian direalisasikan. Faktor-faktor yang selama ini belum optimal dalam mendukung kerjasama antara kedua negara juga perlu dibenahi dan dicarikan solusi terbaik yang bersifat mutualistik.

Suatu negara tidak dapat eksis tanpa menjalin hubungan dengan negara lain. Kondisi ini menuntut setiap negara membuka diri dalam hubungan internasional. Hal ini dapat tercapai apabila negara itu melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral, baik dalam lingkup regional maupun internasional.

Dalam konteks hubungan Indonesia-Belanda, potensi kerjasama tidak hanya telah diidentifikasi tetapi juga secara nyata telah disadari dan mendapat dukungan kuat dari unsur pemerintahan kedua negara. Pentingnya hubungan kedua negara dari perspektif pemerintahan, tercermin dari kunjungan Perdana Menteri Belanda ke Indonesia pada April 2006 yang diakuinya kedaulatan Indonesia dengan apa yang diistilahkan dengan *Territorial Integration* Indonesia dan kunjungan balasan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla ke Den Haag Februari 2009 lalu. Dalam kunjungan ke Indonesia tersebut PM Kerajaan Belanda telah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia dan disepakati untuk lebih meningkatkan

hubungan kedua Negara dengan melihat sejarah dengan perspektif yang berbeda dibanding sebelumnya, guna memfokuskan perhatian pada kerjasama di saat ini dan masa yang akan datang.

Ekspektasi agar hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Belanda lebih meningkat di masa yang akan datang sangat beralasan. Momentum pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia dapat dijadikan titik awal untuk meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara pada aspek astagatra yang selanjutnya akan mempengaruhi kerjasama multilateral terutama dengan Negara-negara anggota Uni Eropa

Lingkungan nasional Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yang ikut mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan Belanda. Sejarah masa lalu bangsa Indonesia yang pernah menjadi koloni Belanda menjadi bagian dari sejarah antara Indonesia-Belanda.

Karena posisinya di EU, Belanda merupakan negara penting yang sejak jaman Romawi menjadi daerah yang diperebutkan oleh kerajaan-kerajaan lainnya. Belanda juga merupakan salah satu negara pendiri NATO serta memiliki peran dalam penyatuan Uni Eropa, oleh karena itu Belanda pernah dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan Uni Eropa. Kondisi yang demikian sudah pada tempatnya jika Indonesia mempererat hubungan bilateral kedua negara dalam kerangka memperlancar hubungan Indonesia dengan Eropa lainnya.

Hubungan Indonesia dengan Belanda yang diharapkan untuk masing-masing gatra khususnya pada Trigatra dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Bidang Geografi

Luas Wilayah Belanda seluas 41.526 Km persegi, seluas dengan wilayah provinsi Lampung. Di lain pihak luas negara Indonesia adalah 1.919.440 Km persegi. Belanda secara geografis merupakan dataran rendah dan permukaan tanahnya sangat rata serta hampir separuh dari wilayah Belanda berada dibawah permukaan air laut. Namun untuk provinsi Limburg yang berada di bagian tenggara negeri Belanda agak sedikit berbukit, dan permukaan tertinggi adalah Vaalserberg dengan ketinggian 321 meter. Dibeberapa tanah rendah dikelilingi oleh dijk (benteng tanggul), dan dinding laut serta terdapat sebagian kawasan yang direklamasi seperti daerah

Flevoland. Disebelah timur negara Belanda berbatasan dengan Jerman, disebelah selatan dengan Belgia, dan disebelah barat dengan Laut Utara. Memahami kondisi wilayah yang berada dibawah permukaan laut dan teknologi tanggul yang telah teruji keberhasilannya, merupakan suatu contoh yang patut diadopsi untuk beberapa wilayah yang sejenis di Indonesia.

Secara geografi Indonesia memiliki wilayah kedaulatan negara dengan luas wilayah daratan dan lautan sekitar 7,3 juta km² dengan 1.919.170 km² diantaranya merupakan wilayah daratan berbentuk kepulauan yang terdiri dari ± 17.504 pulau. Kondisi tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terluas di dunia. Di samping itu, wilayah Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang sangat berlimpah, di darat maupun di laut, didukung dengan letak geografis negara yang strategic dalam hubungan antar negara di dunia.

Kondisi geografis Indonesia merupakan salah satu modal dasar yang amat penting bagi bangsa Indonesia untuk dapat mengembangkan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia termasuk dalam hubungan bilateral dengan Belanda. Namun demikian kondisi nasional tersebut masih belum sepenuhnya didukung dengan infra struktur atau sarana prasarana yang memadai, sehingga menyulitkan dalam pengelolaan dan pengawasan serta adanya daerah-daerah yang seakan-akan terisolasi. Garis batas wilayah negara yang sedemikian panjang pun di beberapa tempat masih dipersengketakan oleh negara-negara tetangga, akibatnya kondisi tersebut telah membuka peluang bagi terjadinya kasus-kasus pelanggaran di beberapa wilayah/kawasan tertentu. Sampai saat ini pun ketentuan menyangkut batas wilayah nasional Indonesia masih belum dituangkan dalam undangundang, yang dapat memberikan kerangka dasar landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu aspek legalitas wilayah perbatasan menjadi sangat penting artinya untuk mengamankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI terutama dalam hubungan bilateral dengan Belanda.

Sementara itu, Kerajaan Belanda berbatasan langsung dengan Kerajaan Belgia disebelah Selatan, dan Republik Federasi Jerman disebelah

Timur dan Laut Utara di sebelah Barat dan Utara. Kerajaan Belanda, sama seperti negara-negara lainnya di Eropa, memiliki iklim sedang dengan musim empat musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas dan musim gugur. Karena adanya pengaruh Laut Utara, maka pada musim panas kawasan pantai terasa lebih dingin bila dibandingkan kawasan pedalaman, sedangkan pada musim dingin kawasan pantai terasa lebih hangat dibandingkan dengan kawasan pedalaman.

Dilihat dari aspek geografi, Indonesia dan Belanda merupakan dua negara yang berbeda kawasan. Dimana kedua kawasan, yaitu Eropa Barat dan Asia Tenggara memiliki perbedaan dalam karakteristik geografis. Selain itu perbedaan geografis lainnya adalah bahwa Indonesia merupakan negara maritim (archipelagic state) sedangkan Belanda merupakan negara daratan.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka dapat dijelaskan dari aspek geografi bahwa sengketa perbatasan, maupun pulau-pulau terluar Indonesia diselesaikan baik dengan jalur diplomasi maupun lewat mahkamah internasional. Pengalaman Indonesia tentang penyelesaian lewat mahkamah internasional, di den haag, telah menghasilkan kekecewaan mendalam terhadap lepasnya pulau terluar. Potensi persoalan hukum terkait isu perbatasan maupun pulau terluar, telah menjadi concern bagi Indonesia kedepan. Karena itu kerjasama Indonesia-Belanda diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum dan sistim hukum, khususnya bagi para diplomat, yang berlaku di mahkamah internasional terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gatra geografi.

b. Bidang Demografi

Penduduk Belanda pada tahun 2009 sebanyak 16.715.999 jiwa. Jumlah penduduk ini apabila dibandingkan dengan penduduk Indonesia jauh lebih kecil. Bila dilihat dari struktur penduduk menurut umur, ternyata penduduk Belanda sebagian besar berumur 15-64 tahun (68%), menyusul kelompok penduduk berumur < 15 tahun (17%) dan sebanyak 15% berumur >65 tahun. Pola ini ternyata sama dengan pola penduduk Indonesia menurut kelompok umur yang sama. Berturut-turut 66% pada kelompok umur 15-64 tahun, 28% pada kelompok umur <15 tahun dan sebesar 6% pada kelompok

umur >65 tahun. Median umur penduduk Belanda (40,4 tahun) lebih tua dibandingkan dengan median umur penduduk Indonesia (27.6 tahun). Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Belanda per tahun (2007-2009) sebesar 0,4%. Sedangkan di Indonesia rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun periode 2000-2005 sebesar 1,35%. Apabila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk di Belanda menunjukkan angka yang lebih besar, yaitu sebanyak 398,8 jiwa per Km² dibandingkan dengan Indonesia hanya sebanyak 124,2 jiwa per Km².

Indonesia memiliki Penduduk yang cukup besar di dunia (ke 4 terbesar setelah, China, India dan Amerika Serikat) namun profil penduduk Indonesia sebagian besar berada di kawasan daerah tertinggal dengan jumlah penduduk di Daerah Tertinggal pada tahun 2006 mencapai ± 56 562.732 jiwa dengan Luas wilayah ± 1.240.028,20 km² dan penyebarannya ± 28,999 km dengan kualitas SDM yang sangat rendah karena pendidikan yang sangat terbatas, hal ini akan berpengaruh pada upaya pengembangan kerjasama Indonesia Belanda di saat ini maupun di masa-masa mendatang.

Perbedaan jumlah penduduk yang cukup signifikan tentunya juga akan sangat berbeda dalam mengelolah potensi demografi kedua Negara. Dari 16.715 999 jumlah penduduk Belanda (data tahun 2009), lima persen dari jumlah penduduk tersebut adalah keturunan Indonesia, yang membuat penduduk Indonesia cukup akrab bagi masyarakat negeri kincir angin tersebut, karakteristik tersebut dapat diposisikan sebagai faktor pemersatu (*binding factor*); sedangkan perbedaan karakteristik lainnya dapat dieksplorasi untuk memilih aspek-aspek yang tepat untuk saling-belajar antara kedua negara ini.

Bila dilihat dari kelompok usia, negeri Belanda yang berpenduduk manula berjumlah sekitar 15 %, mereka dirawat dengan baik oleh pemerintah Belanda dengan mendirikan panti jompo, sementara itu penduduk Indonesia yang masuk kelompok manula berjumlah 6 %, namun perhatian pemerintah terhadap manilla tersebut masih belum sepadan. Sementara itu umur harapan hidup rakyat Belanda adalah 79,4 tahun (data tahun 2006), sedangkan umur harapan hidup rakyat Indonesia adalah 70,1 tahun.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia, maka hal yang terkait dengan demografi adalah pada keberadaan orang Belanda keturunan (berdarah) Indonesia di Belanda dan atau prang Belanda asli yang (sering) melakukan upaya-upaya politik untuk mendukung aksi separatisme di Indonesia ataupun upaya merongrong kewibawaan pemerintah Indonesia. Diharapkan kerja sama bilateral Indonesia dengan Belanda dapat mencari solusi permanen terhadap upaya-upaya seperti diatas.

c. Bidang Sumber Kekayaan Alam

Belanda adalah negara yang minim sumber kekayaan alam, tetapi memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan. Contoh nyata kehebatan mereka adalah kemampuan mengelola air, mengingat sepertiga daratan mereka lebih rendah daripada permukaan air laut. Kini, ketika dunia dihadapkan pada ancaman pemanasan global dan negara-negara dituntut melakukan pembangunan air bersih. Belanda termasuk negara yang paling siap. Negara ini termasuk pelopor dalam penggunaan energi angin untuk sumber daya listrik. Amsterdam saat ini berhasil mendaur ulang 99 persen sampah kotanya dan sebagian hasil daur ulang itu menjadi sumber energi tenaga listrik. Energi tersebut menjadi salah satu focus pembangunan negara Belanda. Keseriusan itu terlihat dari proyek ambisius Energy Research Centre of the Netherland (ERCN), yang mencari terobosan pengembangan energi berkelanjutan. Proyek yang dirintis sejak tahun 1955 dan didanai gabungan antara swasta dan pemerintah ini menyiapkan diri untuk menguasai pasar energi dunia. Mereka mengembangkan penelitian mengenai energi berbasis angin, sampah, hidrogen, nuklir, dan lain sebagainya. Sebanyak 75 peneliti utama dan 650 anggota staf dari berbagai dunia dikumpulkan di Belanda dan sekitar 400 publikasi ilmiah dikeluarkan lembaga ini setiap tahunnya. Teknologi ini sangat relevan bagi Indonesia untuk dapat diadopsi dalam menghadapi masalah sampah yang terjadi di Indonesia.

Indonesia memiliki Sumber Kekayaan Alam (SKA) yang sangat melimpah seperti: Sumber energi dan mineral, Kekayaan Laut dan lain-lain sehingga berbagai negara di dunia ingin bekerjasama dalam bidang investasi

dengan Indonesia, namun karena Indonesia telah terikat kerjasama dengan pemerintah Belanda bahkan telah membentuk suatu lembaga kerjasama , yaitu: *Joint Technical Working Group On Forestry and Timber Trade* (JTWGFTT) sehingga untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain perlu disesuaikan dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan potensi Kekayaan untuk pembangunan nasional.

Beberapa kerjasama yang telah dilakukan bersama pemerintah Belanda, antara lain, dibidang energi dimana pemerintah Belanda justru telah meningkatkan secara signifikan untuk beberapa tahun ke depan dengan mengalokasikan dana yang cukup besar untuk periode 2007-2012 (EUR 80 juta). Selain itu juga dalam bidang kehutanan pengusaha-pengusaha Belanda yang tergabung dalam *Forest Stewardship Council* Netherland (FSC) telah berkomitmen untuk menciptakan permintaan dan suplay pasar kayu dan produk-produk kayu secara berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja serta memberikan penghasilan bagi masyarakat setempat dan pengelolaan hutan secara berkesinambungan.

Sedangkan Kerajaan Belanda, pada dasarnya hampir tidak mempunyai kekayaan alam yang signifikan, dan sebagian besar kebutuhan sumber daya alamnya dipenuhi dengan mengimpor barang-barang tersebut dari negara-negara lainnya, termasuk mengimpor dari Indonesia.

Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang sangat besar, seperti lahan yang subur untuk produksi pertanian, perkebunan, dan kehutanan; wilayah laut yang luas dengan kekayaan biodiversitas yang tinggi dan sumber perikanan tangkap; serta kaya bahan tambang, termasuk minyak dan gas, Sedangkan Belanda terbatas sumber kekayaan alamnya, namun sarat akan teknologi maju, untuk mengelolah sumber kekayaan alam tersebut.

Oleh karena itu, ke depan hubungan kerja sama kedua negara dalam pengelolaan sumber kekayaan alam diharapkan dapat lebih ditingkat. Potensi angin dan surya telah dimanfaatkan secara optimal oleh Negeri Belanda, seperti pembuatan energi yang bersumber dari angin dan surya yang telah dapat menggerakkan industri dan pertanian, sementara kedua potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh bangsa

Indonesia. Oleh karena itu, kedepan bangsa Indonesia harus banyak belajar dari negeri Belanda tentang bagaimana melakukan diversifikasi energy.

Sumber Kekayaan Alam Indonesia yang cukup melimpah akan tetapi belum dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sementara itu, negeri Belanda yang mempunyai Sumber Kekayaan Alam terbatas, berupaya memanfaatkan semaksimal mungkin, melalui pemanfaatan panas mata hari, angin, daur ulang sampah, serta memanfaatkan sumber kekayaan alam Negara lain dan Iptek, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, untuk itu, kiat-kiat yang menjadikan keberhasilan Belanda tersebut patut dipelajari dan dicontoh serta dapat diimplementasikan oleh bangsa Indonesia.

Hal-hal yang berkaitan dengan penegakan supremasi hukum di Indonesia terkait SKA adalah pada campur tangan NGO yang memperjuangkan isu-isu lingkungan baik NGO lokal dengan backup dari LN maupun NGO Internasional yang berbasis di Belanda. Campur tangan NGO ini terkadang telah melampau yang seharusnya yaitu justru menciptakan dan memicu ketegangan politik lokal maupun nasional dan sering menjadi kabur terhadap tujuan NGO tersebut memperjuangkan SKA. Karena itu kerja sama Indonesia-Belanda diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kepada NGO untuk lebih profesional pada bidangnya dan tidak mencampuri hal-hal diluar profesionalitas bidang yang diperjuangkan.

16. Bidang Ideologi

Dalam bidang ideologi, pada akhir-akhir ini (setelah era reformasi), kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pengejawantahan terhadap ideologi Pancasila agak menurun dan hal ini tercermin dari keberadaan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di sebagian masyarakat terutama generasi muda yang seharusnya sebagai pilar pembangunan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat menuju tercapainya cita-cita masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undangundang Dasar 1945.

Sedangkan Kerajaan Belanda menganut faham liberal, dimana hak-hak individu seperti kebebasan berbicara dan berpendapat sangat dijunjung tinggi.

Dalam suatu negara yang menganut paham liberalisme, semua paham lainnya yang dianut oleh masyarakatnya dapat hidup berdampingan antara satu dengan lainnya, termasuk paham sosialis. Dengan demikian Belanda merupakan negara terbuka, hal ini menjadikan Belanda sebagai salah satu negara dengan heterogenitas/pluralisme dan terbuka di kawasan Eropa.

Ideologi suatu negara merupakan kristalisasi dari pengalaman sejarah yang panjang dari masing-masing bangsa yang bersangkutan. Ideologi Pancasila yang dianut Indonesia disarikan dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sehingga Pancasila mempunyai kekuatan integratif yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Ideologi yang dianut oleh bangsa Belanda tentu juga telah mengaiami tempaan sejarah yang panjang dan tentu merupakan pilihan paling tepat untuk negara dan rakyat Belanda.

Oleh sebab itu, gatra ideologi masing-masing negara tidak perlu untuk dikerjasamakan. Yang perlu dilakukan adalah mencoba secara maksimal untuk memahami masing-masing ideologi secara resiprokal, sehingga masing-masing dapat saling mengapresiasi ideologi negara mitra kerjasamanya.

17. Bidang Politik

Bentuk pemerintahan Indonesia dan Belanda adalah berbeda, Indonesia berbentuk Republik sedangkan Belanda berbentuk Monarki. Otoritas dan kekuatan dalam sistem monarki Belanda tertumpu pada Ratu. Institusi kerajaan merupakan institusi sentral dan menentukan dalam sistem politik di Belanda. Ratu diposisikan sebagai 'Simbol Persatuan' serta penjamin kebebasan individu dan kolektif, berada di puncak institusi monarki tersebut. Hubungan diplomatik RI–Belanda diresmikan setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan pandangan terhadap kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Indonesia pernah memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960 sehubungan dengan kasus penyelesaian Irian Barat (Irian Jaya). Pemulihan hubungan diplomatik antara kedua negara dilakukan setelah penandatanganan "Persetujuan New York" pada tahun 1963 mengenai penyelesaian masalah Irian Barat. Sikap Belanda mencampuri urusan dalam negeri RI, seperti terlihat dari diplomasi J.P. Pronk, yang berdampak pada

pembubaran IGGI tahun 1992 merupakan titik terendah dalam hubungan bilateral RI – Belanda. Dampak dari hal ini terlihat dari kerjasama bidang Militer antara Indonesia-Belanda yang semakin surut. Keadaan ini mulai membaik sejak kunjungan Ratu Beatrix ke Indonesia pada tahun 1995 dan semakin berkembang, ketika Presiden B.J. Habibie meminta Pemerintah Belanda untuk mencairkan kembali hubungan kerjasama pembangunan tersebut. pada tanggal 3 Februari 2003. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden A.bdurahman Wahid ke Belanda, telah ditandatangani MoU on *Agenda for Renewed and Intensified Bilateral Cooperation*, sebagai upaya untuk lebih memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan bilateral Indonesia dan Belanda di bidang politik mengalami peningkatan. Di bidang politik, membaiknya hubungan kedua negara antara lain terlihat dari kehadiran Menlu Bernard Bot pada peringatan HUT Proklamasi RI pada 17 Agustus 2005 yang sekaligus menyampaikan penerimaan secara moral dan politik terhadap kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Setelah itu kebekuan hubungan antara Indonesia dengan Belanda lebih mencair pada tahun 2007 ketika untuk pertama kalinya dalam sejarah diplomasi kedua negara Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende datang dalam peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang digelar KBRI Belanda di Wisma Duta, Den Haag. Peringatan itu diselenggarakan pada 4 September 2007, "Itulah untuk pertama kali Perdana Menteri Belanda memberi hormat kepada merah putih," Kehadiran Jan Peter didampingi oleh para menteri utama Kabinet Balkenende IV, di antaranya Menteri Luar Negeri Maxime Jacques Marcel Verhagen, Menteri Yustisi Ernst Maurits Henricus Hirsch Bailin, Menteri Pertahanan Eimert van Middelkoop, dan para pejabat tinggi kementerian luar negeri, parlemen, serta para mantan Duta Besar Belanda untuk Indonesia. Sebelumnya, selama lebih dari 60 tahun, Belanda tidak bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia baru terjadi pada 27 Desember 1949, yaitu ketika *soevereiniteits overdracht* (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran, mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan *politioele acties* (agresi militer) pada 1945-1949 adalah ilegal. "Lembaran baru hubungan diplomatik antara Belanda dan Indonesia sudah dibuka," kata JE Habibie. Lembaran hidup baru itu sangat terasa di perkampungan orang-

orang Maluku Tenggara di Van Het Rijk. Nistelrode, Provinsi Noord Brabant. Belanda. Peristiwa tersebut diatas tentu akan membawa angin segar hubungan antara Indonesia dengan Belanda di masa mendatang. hal ini dapat memberi dampak positif terhadap upaya Indonesia dalam berbenah diri menuju proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintah akan lebih serius lagi dalam merumuskan program-program pembangunan yang dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, terutama untuk di daerah rawan konflik seperti di Maluku dan Papua.

Hubungan Indonesia dengan Belanda selama ini berjalan baik, beberapa bidang kerjasama bilateral yang menonjol antara lain adalah di bidang anti-terrorism, *inter-faith dialogue* dan demokrasi. Belanda merupakan salah satu negara pertama yang telah membantu pendirian *Jakarta Law Enforcement Centre* (JCLEC) dengan menyediakan dana sebesar € 10.3 juta. (sepuluh juta tiga ratus ribu Euro). Pada tahun 2008, Indonesia dan Belanda telah melakukan kolaborasi kerjasama *interfaith dialogue* melalui pelaksanaan dialog antar agama di Belanda pada bulan Juni 2008. Sementara untuk bidang demokrasi, Belanda juga merupakan salah satu negara pertama yang menyampaikan dukungan untuk *Endorsement Fund Bali Democracy Forum* (BDF) sebesar € 2.5 juta (dua juta lima ratus ribu Euro). Selama ini masalah Maluku menjadi ganjalan diplomatik antara Indonesia dan Belanda. Masalah Maluku tidak pernah lepas dari perhatian pihak Belanda dalam pertemuan bilateral dengan Indonesia. Ikatan sejarah Belanda dengan Maluku memang sangat panjang, dimulai sejak kedatangan kapal VOC tahun 1597 untuk mencari rempah-rempah. Cees van Dijk (Di Negeri Penjajah, Penerbit KPG dan KITLV, Jakarta, 2008) menyebutkan, orang Ambon termasuk yang pertama-tama didekati Belanda setelah Aceh. Beberapa bangsawan Ambon juga yang pertama-tama dikirim ke Belanda dengan tujuan politik dan misi agama. Ambon juga termasuk daerah yang terakhir diperjuangkan Belanda di samping Papua. Republik Maluku Selatan diproklamirkan di Ambon tanggal 25 April 1950, didukung oleh bekas tentara KNIL dan sangat direstui oleh Pemerintah Belanda. Ketika kemudian RMS bisa dilumpuhkan, para pendukung RMS beserta keluarganya diangkut ke Belanda untuk kemudian bermukim di negara tersebut. "Para pendukung RMS tersebut kemudian membentuk pemerintahan pengasingan di Belanda dan aktivitas mereka

dilanjutkan oleh generasi berikutnya," (Abdul Irsan 2002).

Hubungan politik antara kerajaan Belanda dan Republik Indonesia memasuki periode baru saat pengakuan secara resmi oleh pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Momentum ini dapat digunakan untuk meningkatkan kerja sama dibidang politik baik yang melibatkan lembaga eksekutif, lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif.

Beberapa hal yang mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia Belanda di bidang politik antara lain sebagai berikut :

a. Gerakan Separatis di Papua

Meskipun secara resmi Belanda mendukung keutuhan wilayah NKRI, sejumlah kalangan di Belanda tetap berusaha mengangkat masalah self-determination masyarakat Papua yang selama ini dianggap tidak diperlakukan secara adil dan proses masuknya Papua ke dalam wilayah RI dipandang tidak sesuai dengan ketentuan dan praktek internasional.

Atas dasar keinginan beberapa anggota parlemen, Pemerintah Belanda telah mengusulkan adanya kajian historis mengenai pelaksanaan Pepera di Irian Jaya tahun 1969. Penelitian ini dilakukan oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Prof. Drooglever. Dalam berbagai kesempatan Pemerintah Republik Indonesia menerima dengan hati-hati hasil penelitan historis yang dilakukan oleh Belanda terhadap keabsahan pelaksanaan Pepera 1969 karena bagi Indonesia Pepera telah dilaksanakan sesuai dengan Resolusi PBB dan hasilnya telah final.

Setelah sempat tertunda sejak tahun 2003 akhirnya Pada tanggal 15 November 2005 Prof. Drooglever menerbitkan hasil kajian sejarah mengenai Pepera 1969. Sesuai dengan janjinya, pihak Belanda bersedia berkoordinasi untuk "*play down*" reaksi public masingmasing terhadap penerbitan hasil kajian sejarah tersebut. Di Indonesia tidak terdapat reaksi yang menonjol, kecuali demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Papua di depan Kedubes Belanda di Jakarta.

b. Gerakan Separatis RMS di Belanda.

Hubungan Bilateral Indonesia-Belanda banyak dipengaruhi dengan situasi politik kedua Negara, misalnya keberadaan orang-orang Maluku di

Belanda telah memainkan perannya sebagai kelompok penekan (*Pressure Group*). Secara historis orang-orang Maluku yang menamakan dirinya sebagai kelompok RMS (Republik Maluku Selatan) secara langsung merupakan bagian dari program pemerintah Belanda di masa lalu.

Kerusuhan yang terjadi di Maluku seringkali dimanfaatkan oleh RMS untuk kepentingan politiknya, khususnya oleh kelompok *die hard* yang sejak beberapa tahun terakhir posisinya semakin terkucilkan. Sejak merebaknya kerusuhan di Maluku, telah timbul sejumlah organisasi radikal warga Maluku di Belanda, antara lain *Warchild*, *People Against Genocide*, Pemuda Maluku Merdeka dan Forum Kedaulatan Maluku (FKM). Semua kelompok tersebut umumnya pendukung cita-cita RMS dan anti Indonesia.

Pimpinan RMS (Alex Manuputty) telah menyerukan agar dilakukan aksi unjuk rasa besar di Belanda sehubungan dengan tindak penganiayaan terhadap penduduk Maluku yang menginginkan kemerdekaan di bawah RMS. Berdasarkan keterangan mereka, penganiayaan tersebut terjadi ketika dilakukan pengibaran "bendera RMS" tahun 2003 dan terulang kembali pada tahun 2007, mereka mengibarkan "bendera" tersebut ketika Presiden RI berkunjung ke Maluku. Menurut pihak RMS, masalah tersebut terjadi ketika beberapa orang ditangkap dan dipukuli oleh petugas kearnanan karena akibat pengibaran "bendera" dianggap merupakan pelanggaran HAM.

Pada saat ini, pusat perjuangan RMS berada di Los Angeles, AS. Alex Manuputty, bersama sejumlah masyarakat keturunan Maluku di AS dan dukungan dari beberapa tokoh RMS di Belanda seperti John Wattilete (wakil PM RMS). Alex Manuputty berusaha membangun kembali RMS yang dianggap mempunyai 1,5 juta penduduk. Sikap Pemerintah Belanda dalam menyikapi isu RMS tersebut adalah tetap mendukung terhadap NKRI. Sikap pemerintah Belanda ini juga diperkuat dengan adanya pernyataan dari anggota partai VVD, Hans Van Baalen pada saat yang bersangkutan diwawancarai Netwerk TV mengenai insiden pengibaran bendera RMS pada saat kunjungan Presiden RI di Maluku. Dalam wawancara tersebut, Van Baalen menegaskan pihak Belanda hanya mengakui NKRI dan menentang gerakan separatis. Pihaknya meminta agar perjuangan RMS di Indonesia

dan di Belanda dihentikan karena hal tersebut merupakan tindakan yang ilegal dan tidak bertanggung jawab. RMS merupakan bagian dari masa lalu sebagaimana gerakan separatis di Papua dan Aceh.

Selama ini, KBRI Den Haag telah berupaya untuk meredam dampak kegiatan separatisme di Belanda, termasuk RMS melalui jalur Pemerintah, Seni Budaya dan Media. Pada tahun 2006, KBRI telah mendatangkan misi kesenian Budaya dari Maluku bekerjasama dengan UNPATTI dengan mengadakan pertunjukan kesenian di 8 kota yang menjadi kantong-kantong masyarakat RMS di Belanda. Usaha-usaha tersebut, dipandang cukup efektif untuk menekan dukungan masyarakat tersebut terhadap RMS. Hal ini dibuktikan dalam setahun terakhir, dukungan terhadap RMS di Belanda sudah sangat kecil dengan berkurangnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh penganut RMS. Hal tersebut juga diperkuat dengan posisi Pemerintah Belanda yang mendukung kesatuan NKRI dan semakin eratnya hubungan .kedua negara di berbagai bidang.

c. *Joint Committee RI-Belanda (Panmal)*

Upaya penyelesaian keberadaan warga Maluku di Belanda, khususnya mantan tentara KNIL dan Angkatan Laut Belanda dilakukan kegiatan bersama sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua negara dalam *Wassenaar Conclusions* 1975 mewarnai hubungan bilateral kedua negara. Seiring dengan telah selesainya registrasi calon-calon repatriasi, Pemerintah RI memutuskan untuk mengakhiri program repatriasi dan membubarkan *Joint Committee*, sesuai dengan hasil pertemuan *joint committee* yang terakhir yaitu pada tanggal 2–3 Mei 2003 di Malang Jawa Timur.

Bila dilihat dari sisi Belanda, Belanda merupakan kerajaan dengan sistem pemerintahan federal. Raja/Ratu merupakan simbol pemersatu, pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri dengan kabinet koalisi partai-partai pemenang Pemilu. Belanda telah mengalami beberapa kali reformasi politik yang melahirkan sistem pemerintahan federal, dimana masyarakat memiliki kewenangan tertentu termasuk kerjasama luar negeri dalam batas tertentu. Belanda memiliki sistem multi partai, dan kabinet Belanda selalu disusun atas koalisi partai-partai pemenang pemilu karena

tidak pernah ada pemenang yang dominan (lihat Bab III).

Hubungan luar negeri dengan dunia ketiga difokuskan pada peningkatan hubungan kerja dengan negara-negara bekas jajahannya, namun demikian hubungan dengan negara-negara lainnya juga dibangun demi kepentingan pengembangan perekonomiannya.

18. Bidang Ekonomi

Kerja sama di bidang ekonomi antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda telah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya neraca perdagangan dari tahun ketahun. Tahun 2007 neraca perdagangan Indonesia adalah sebesar US \$ 3,25 miliar dan pada tahun 2008 meningkat sebesar 39,21 % menjadi US \$ 4,52 miliar, pada posisi ini Indonesia surplus terhadap Belanda.

Komoditi ekspor utama Indonesia ke Belanda meliputi tekstil dan pakaian jadi, kayu olahan, minyak nabati, perabotan, produk-produk tembakau, sayuran, makanan ternak, rempah-rempah, coklat, kopi, teh dan karet. Komoditi impor utama Indonesia dari Belanda meliputi peralatan telekomunikasi, baja, besi, pesawat terbang, petroleum oil, suku cadang mesin, produk hidrokarbon, minyak wangi, bahan plastik, kertas dan produk susu olahan (keju, yoghurt, dan sebagainya). Nilai investasi Belanda di Indonesia dalam kurun waktu 6 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang berarti sehubungan dengan perkembangan ekonomi di kedua negara dan ekonomi global. Pada tahun 2008 tercatat angka perdagangan bilateral sebesar USD 4.52 milyar. Dibanding dengan tahun 2007, maka angka perdagangan ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 39.21% (2007= USD 3.25 milyar). Indonesia masih terus mengalami surplus yang cukup signifikan dalam perdagangan bilateral. Belanda merupakan negara investor ke-10 terbesar di Indonesia pada tahun 2007 dengan nilai investasi mencapai 147,2 juta dolar AS di 27 proyek.

Secara kelembagaan kerja sama dibidang ekonomi antara Indonesia dengan negeri Belanda telah terbentuk Komisi Kerja Sama Ekonomi (MCEC) yang sejak pembentukannya pada tahun 1960-an, komisi ini cukup berperan membantu lancarnya hubungan ekonomi kedua Negara. Harapan kedepan lembaga ini perannya lebih meningkat lagi tidak saja pada sektor energi, agro industri dan

tansportasi tetapi juga pada sector lain, dan pada sisi yang lebih luas kesediaan Belanda menjadi pintu gerbang masuknya komoditi ekspor Indonesia ke Negara-negara EU melalui pelabuhan laut Rotterdam dan bandara Internasional Schiphol.

Bila dilihat dari struktur perekonomian, sumber terbesar PDB negeri Belanda berasal dari jasa, sementara itu sumber terbesar PDM Indonesia berasal dari Sumber Kekayaan Alam yang tidak terbarukan. Kerja sama di bidang ekonomi antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda sebagai berikut :

a. Perdagangan

Perkembangan kerjasama di bidang ekonomi dapat dilihat dari total perdagangan kedua negara pada tahun 2007 yang mencapai nilai sekitar USD 3,25 milyar atau meningkat 7.25% dari total perdagangan pada tahun 2006 yaitu sebesar USD 3,03 milyar. Dalam hal ini, Indonesia memperoleh surplus sebesar USD 2 milyar pada tahun 2006 dan USD 2,25 milyar pada tahun 2007 (naik 12.1%). Pada tahun 2008, volume perdagangan kedua negara mencapai USD 4,52 milyar, meningkat 39,21% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2007. Total ekspor Indonesia ke Belanda tahun 2008 mencapai USD 3,92 milyar dan import sebesar USD 0,602 milyar.

Komoditi ekspor utama Indonesia ke Belanda berupa Palm oil dan turunannya (minyak kelapa sawit dan produknya), refinasi maupun tidak, kelapa, produk elektronik (*automatic data processing machine, transmission apparatus for radio telephony*), furniture (perabotan), peralatan bangunan dan perabot kayu, alas kaki, minyak roti dan residu minyak lain, dan lain-lain. Sedangkan produk Impor utama adalah peralatan telekomunikasi, baja, besi, pesawat terbang, petroleum oil, suku cadang mesin, produk hydrocarbon, minyak wangi, bahan plastik, kertas dan produk susu olahan (keju, yoghurt. dan sebagainya). Kendala ekspor Indonesia ke Belanda dan Uni Eropa antara lain beberapa produk Indonesia yang belum memenuhi standar produk EU serta persaingan dagang seperti RRC, Thailand dan Malaysia.

Di bidang investasi, kedua negara telah memiliki P4M yang ditandatangani tanggal 6 April 1994 di Jakarta dan telah diratifikasi oleh pemerintah dengan Keppres No 58 tahun 1994 tanggal 2 Agustus 1994. Data persetujuan investasi Belanda di Indonesia secara kumulatif dalam

periode 1 Januari 1967 – 31 Agustus 2008 tercatat sebesar USD 8,7 milyar dalam 651 proyek. Realisasi investasi Belanda di Indonesia 1 Januari 2008 – 31 Januari 2009 tercatat sebesar USD 150,4 juta dalam 40 proyek.

Pada tahun 2007, Belanda menduduki posisi sebagai investor asing terbesar ke-8. Sektor-sektor investasi Belanda antara lain meliputi transportasi, penyimpanan, komunikasi, kimia dan industri farmasi, makanan, real estate, industrial estate, gedung-gedung perkantoran dan perdagangan. Investasi tersebut antara lain berlokasi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah. Dalam upaya peningkatan investasi Belanda ke Kawasan Indonesia Timur, Perusahaan Air Minum Belanda "Waterleiding-maatschppij Drenthe" WMD aktif melakukan usaha dan investasi di bidang pengelolaan air bersih dan sanitasi bekerjasama dengan PEMDA dan PDAM di berbagai daerah seperti Papua (Sorong, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Manokwari, Jayapura, Kabupaten Marauke, Kabupaten Jayawijaya), Sulawesi Utara (manado, Tomohon, Minahasa Induk, Minahasa Selatan), di Ambon dan Kalimantan Timur.

Pemerintah Belanda memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan-perusahaan Belanda yang akan menanamkan modalnya di negara-negara berkembang melalui EVD (*International Business and Cooperation for Emerging Market*). Persyaratan EVD atas pemberian kredit antara lain adalah proyek harus bermanfaat bagi negara berkembang terkait dan sesuai dengan kebijakan kerjasama pembangunan Belanda. Selain itu, melalui lembaga PUM (lembaga yang terdiri dari purna karyawan yang menyediakan bantuan jasa bebas biaya ke negara berkembang, pemerintah Belanda memberikan bantuan tenaga ahli di berbagai bidang seperti peningkatan managerial skills, jaringan pemasaran dan proses produksi.

b. Kehutanan.

Para pengusaha kayu Belanda yang tergabung dalam Forest Stewardship Council Netherlands (FSC) melalui *Declaration of the Dutch Housing Corporations* membangun 150.000 rumah di Belanda dengan kayu bersertifikasi FSC-LEI dari Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, FSC sedang

dalam persiapan meluncurkan *The Borneo Initiative* (TBI) dan memobilisasi dana sekitar 35 juta Euro untuk mendukung TBI, yakni menghubungkan pemegang konsesi dan unit-unit pengelola hutan untuk sertifikasi FSC dan LEI Indonesia, pemberian bantuan program secara *tailor-made* atau *recipient-driven* untuk memperkuat *Sustainable Forest Management* di Borneo. Menurut FSC, saat ini dana yang termobilisasi sekitar EUR 12 juta.

c. Energi.

Di bidang kerjasama energi, nampak kecenderungan adanya peningkatan yang signifikan untuk beberapa tahun ke depan. Pemerintah Belanda mengalokasikan dana sekitar EUR 80 juta untuk kerjasama energi dengan Indonesia untuk periode 2007-2012. Dana tersebut dikelola oleh kedubes Belanda di Jakarta, Senter Novem dan kementerian kerjasama pembangunan. kerjasama Indonesia-Belanda bidang energi yang akan datang diarahkan pada pengintensifan dan penguatan kegiatan-kegiatan yang ada dan proyek baru, fokus pada energi pembaharuan pembangunan kapasitas dengan penekanan pada komponen implementasi.

d. Tenaga Kerja.

Di sektor tenaga kerja, Belanda kekurangan tenaga kerja di bidang kesehatan, pendidikan dan sektor-sektor lain. Hal ini membuka kesempatan bagi tenaga kerja asing termasuk TKI yang memiliki kualifikasi tinggi untuk bekerja di Belanda. Namun demikian perlu diantisipasi adanya hambatan kebijakan Belanda yang memprioritas-kan masuknya tenaga kerja asing yakni dari UE lainnya dan Eropa Timur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Belanda dan perlunya mencari cara-cara yang *feasible* untuk memasuki pasar tenaga kerja di Belanda, antara lain melalui:

- (1) Perusahaan perekrut tenaga kerja asing seperti Laborflex yang memiliki perhatian khusus terhadap Indonesia karena ikatan sejarah dan emosional.
- (2) Perusahaan-perusahaan Belanda seperti Shell yang memberikan info terbuka lowongan kerja.
- (3) Pemanfaatan organisasi-organisasi profesi seperti Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) yang ada di Belanda.

(4) Pemanfaatan jalur sister-city, dsb.

Sedangkan Kerajaan Belanda :yang merupakan negara kecil dengan sistem perekonomian terbuka, orientasi kebijakan ekonominya diarahkan untuk kepentingan swasta yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Belanda tergantung pada sektor pertanian, peternakan, perindustrian dan manufaktur.

Dengan sistem perekonomian terbuka tersebut menjadikan negara ini memiliki tingkat ekspor dan impor perorang tertinggi di dunia, serta Amsterdam merupakan salah satu kota bisnis terpenting di Eropa. Belanda menduduki ranking ke 10 sebagai eksportir terbesar, dan menduduki rangking ke 9 sebagai importir terbesar di dunia. Namun demikian fluktuasi perekonomian Belanda sangat dipengaruhi oleh koalisi negara-negara tetangganya.

e. Perbankan.

Ada beberapa hal penting menyangkut bidang Ekonomi khususnya Perbankan yang dapat dicatat dalam hubungannya dengan Perbankan Nasional yaitu mengenai Bank Indover milik Indonesia yang beroperasi di Belanda namun telah divonis pailit pada tahun 2008 oleh pengadilan di Belanda. Namun demikian perlu kita memahami persoalan sebenarnya menyangkut Bank Indover hingga berhenti beroperasi. Bank Indover merupakan Bank komersial yang dimiliki sepenuhnya oleh Bank Indonesia dan beroperasi di Belanda. Bank ini juga memiliki cabang di Jerman, Hongkong, dan Singapura. Indover Bank berdiri di Amsterdam sebagai cabang de Javasche Bank. Tahun 1951 Pemerintah Indonesia menasionalisasi de Javasche Bank dengan membeli seluruh sahamnya senilai 8,95 juta gulden. Dalam perjalanannya Indover Bank mengalami pasang surut hingga pada tahun 1999 berdasarkan UU no. 23 tahun 1999 mengharuskan BI mendivestasi anak perusahaannya, termasuk Indover Bank, paling lambat tahun 2000. Tahun 2000, BI berencana menutup Indover Bank jika sampai Mei 2001 tidak ada Investor yang membelinya. Tahun 2005 divestasi Indover Bank ke pihak asing dihentikan dan BI menjajaki menjual

Indover ke Bank EXIM Indonesia. Sejak tanggal 6 Oktober 2008, Indover Bank dikenakan tindakan darurat (emergency measures) karena adanya kesulitan likuiditas yang dialaminya. Pada tanggal 1 Desember 2008, Indover Bank telah dinyatakan pailit/bangkrut oleh pengadilan Amsterdam dan berstatus dilikuidasi dalam wilayah kedaulatan Belanda. Alasan dilikuidasinya Indover Bank adalah ekuitas yang telah negatif, dan tidak ada tambahan modal yang dapat diharapkan untuk menutup ekuitas negatif tersebut, baik melalui tambahan modal dari Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank maupun dari investor lainnya.

Dengan telah dipailitkannya Indover Bank oleh Pengadilan Belanda, maka Indover Bank berada di bawah pengelolaan dan pengawasan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan Amsterdam Belanda. Sampai dengan saat ini masih terdapat dispute antara Bank Indonesia dan kurator mengenai hak dan kewajiban Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal dan kreditur terkait dengan pelaksanaan likuidasi Indover Bank. Pada bulan Maret 2010, Bank Indonesia sebagai kreditur telah mengajukan *statement of claim* atas deposito dan giro Bank Indonesia di Indover Bank ke Pengadilan Amsterdam. Atas klaim Bank Indonesia tersebut di atas, pada bulan April 2010 Kurator menyampaikan *statement of counterclaim* di Pengadilan Belanda menyatakan bahwa Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank berkewajiban untuk menanggung defisit Indover Bank dan men-set off tagihan Bank Indonesia yang ada di Indover Bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia tetap berpendirian bahwa sesuai hukum perusahaan, tanggung jawab Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal pada Indover Bank hanya sebatas penyertaan Bank Indonesia pada Indover Bank. Dalam perkembangannya, sebagaimana yang disampaikan Kurator dalam *Eight Public Liquidation Report* bulan Maret 2011, proses-proses tersebut masih berlangsung di pengadilan Amsterdam.

19. Bidang Sosial Budaya

Hubungan sosial budaya antara kedua negara berlangsung secara baik. Negara Republik Indonesia-Belanda telah menandatangani persetujuan kebudayaan (1968) yang menjadi dasar hukum hubungan sosial budaya kedua

negara. Hubungan sosial budaya antara Indonesia dan Belanda tidak terlepas dari faktor sejarah masa lalu yang secara psikologis walaupun kecil masih melekat terhadap bangsa Indonesia. Namun pengakuan Belanda atas Indonesia dengan apa yang disebut perdana menteri Belanda "*Territory Integration* Indonesia" dapat dijadikan momentum untuk bangsa Indonesia dan bangsa Belanda melihat kedepan untuk meningkatkan kerja sama di bidang sosial budaya. Adanya 5% dari jumlah penduduk Belanda keturunan Indonesia dapat dijadikan katalisator untuk merangkai kebersamaan budaya Indonesia dan Belanda.

Peluang untuk memperkenalkan Indonesia secara lebih luas dan mendalam di dunia internasional, khususnya di Negara Belanda, yaitu melalui Festival Tong-Tong atau pasar malam besar²², yang dilaksanakan di den Haag dengan rekor terbesar pada tahun 2008 dengan jumlah pengunjung 133.000 pengunjung. Festival tahunan tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan budaya dan masakan khas Indonesia. Festival Tong-Tong telah menciptakan keuntungan ganda, bagi Indonesia maupun bagi negeri Belanda Untuk itu, perlu ditingkatkan jenis maupun kualitas yang akan ditampilkan pada festival tersebut.

Kerjasama Indonesia dengan Belanda di bidang sosial dan pembangunan (*development cooperation*) merupakan salah satu inti dari hubungan kedua negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi prioritas dari bantuan pembangunan luar negeri Belanda. Pada tahun 2007, Belanda memberikan bantuan dana pembangunan sebesar € 197,6 juta (US\$ 316.16 juta). Bantuan kerjasama pembangunan Belanda di Indonesia difokuskan pada perkembangan sektor pendidikan penyediaan air bersih dan sanitasi, *good governance* dan pengembangan kawasan timur Indonesia.

Selain itu, Belanda juga aktif membantu memfasilitasi sektor swasta dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Bantuan tersebut diwujudkan melalui kebijakan Belanda untuk mendorong investornya ke Indonesia melalui lembaga EVD (*Internationaal Ondernemen Samenwerken*) dan peningkatan kapasitas UKM Indonesia melalui PUM (Netherlands Senior Experts). Komitmen bantuan Pemerintah Belanda tersebut dipertegas kembali pada saat menteri kerjasama

²² <http://www.pasarmalambesar.nl/>

pembangunan Belanda berkunjung ke Indonesia pada tanggal 10 Desember 2008.

Pemerintah Belanda juga memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk beberapa daerah Indonesia yang mengalami musibah bencana alam. Belanda memberikan bantuan kemanusiaan sebesar US\$ 20 juta untuk Aceh dan Nias, serta memberikan *pledge* sebesar € 141 juta untuk proses rekonstruksi. Sedangkan pada bencana gempa bumi Yogyakarta, Belanda mengucurkan bantuan dana rekonstruksi US\$ 2,5 juta dan bantuan senilai € 500 ribu untuk pembangunan 10 SDN di Bantul dan Klaten (telah diresmikan oleh Menlu RI pada 12 September 2007). Lebih lanjut, Pemerintah Belanda telah memberikan komitmen bantuan 22 perangkat komputer dan paket buku kepada sekolah-sekolah tersebut, yang disampaikan oleh Menlu Verhagen pada saat berkunjung ke Indonesia tanggal 13-16 Januari 2009. Selain itu, Belanda juga telah memberikan bantuan sebesar € 1 juta untuk para korban banjir di Jakarta tahun 2007.

Sementara di bidang pariwisata juga terjadi peningkatan jumlah wisatawan Belanda yang berkunjung ke Indonesia, yakni pada tahun 2003 tercatat sebanyak 91,446 orang dan pada tahun 2005 mengalami peningkatan menjadi 114,687 orang. Sekalipun bahasa Inggris merupakan bahasa kedua di Negara Belanda, namun Belanda merupakan negara pertama yang menawarkan program studi berbahasa Inggris. Lebih dari 1400 program studi internasional untuk berbagai bidang ditawarkan oleh pendidikan tinggi Belanda. Kurikulumnya intensif pada level lebih tinggi, lebih maju, berorientasi pada praktek dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan sesuai harapan mahasiswa yang mencari pengetahuan khusus. Program-program studi ini menggabungkan teori dengan praktek di dunia kerja yang sebenarnya atau situasi simulasi kerja. Sebagian besar program-program studi tersebut dirancang untuk memperoleh gelar sarjana (S1), master (S2), PhD atau doktor, diploma atau bersertifikat.

Hubungan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Belanda di bidang pendidikan selama ini terjalin dengan baik. Sejak tahun 1998, Pemerintah Belanda melalui Neso²³ telah menyediakan program beasiswa untuk mahasiswa Indonesia diantaranya beasiswa Netherlands Fellowship Program (NFP), Huygens, Delta dan STUNED (Studeren in Nederland). Sejak tahun 2000, lebih dari 1000 beasiswa telah

²³ <http://www.nesoindonesia.or.id/>

diberikan pemerintah Belanda melalui program Stuned. Untuk tahun 2007, Stuned menyediakan 165 beasiswa untuk program master dan sekitar 100 beasiswa untuk program *short course* dan *costumized training*. Sedikitnya tidak kurang dari 200 beasiswa STUNED disediakan setiap tahunnya untuk mahasiswa dari Indonesia. Selain itu pemerintah Belanda melalui Ministry of Education, Culture, and Science dan pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional juga telah menandatangani perjanjian kerjasama beasiswa. Lebih dari 50 beasiswa program PhD akan disediakan melalui skema perjanjian ini mulai 2012 sebagai pengembangan kerjasama berdasarkan penandatanganan MoU yang pernah disepakati kedua pihak pada 11 Februari 2002 silam. Lebih dari itu Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional (Dikti Kemdiknas) dan Nuffic Nesso Indonesia melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk skema baru program beasiswa PhD. Melalui kerjasama ini, pihak Dikti menyediakan 50 beasiswa meraih PhD selama tiga tahun, sementara kelebihan satu tahun atau tahun terakhir studi akan ditanggung pihak perguruan tinggi di Belanda. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur Nuffic Neso Indonesia, Marrik Bellen, dan Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Dikti Kemdiknas, Achmad Jazidie pada 19 September 2011 Senin di Den Haag, Belanda²⁴. Penandatanganan MoU tersebut disaksikan oleh Plt Duta Besar RI untuk Belanda, Umar Hadi, Dirjen Dikti Kemdiknas, Djoko Santoso, serta Renk Roborgh selaku *Director-General for Higher Education, Vocational Education, Science and Emancipation*.

Dalam rangka meningkatkan kerjasama bidang pendidikan, Pemerintah Belanda melalui Maastricht School of Management (MSM) juga telah bekerjasama dengan Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia (KPTN-KTI) telah menandatangani MoU kerjasama pada tanggal 11 Juni 2008. Disamping itu, untuk mendukung sektor pendidikan Indonesia, Pemerintah Belanda telah berkomitmen untuk menyediakan dana sebesar € 140 juta (US\$ 224 juta) untuk lima program pendidikan pada tahun 2007-2010. Program tersebut akan meliputi dukungan pengembangan pendidikan dasar, perbaikan kualitas pendidikan di Timor

²⁴<http://edukasi.kompas.com/read/2011/09/20/14271424/Lebih.dari.50.Dosen.Bakal.Didoktorkan.di.Belanda>

Barat, peningkatan kualitas dan profesionalitas guru. pembangunan dan renovasi sekolah dan mendukung program UNICEF untuk pengenalan pencegahan HIV/AIDS di Papua dan Irija Barat (Papua Barat).

Kondisi sosial budaya masyarakat Belanda sangat rentan gesekan, khususnya gesekan akibat perbedaan agama dan juga perbedaan bahasa. Perbedaan agama khususnya antara penganut agama Khatolik Roma dengan agama Protestan, sedangkan konflik antar masyarakat yang berbahasa Perancis dan yang berbahasa Belanda rentan untuk terjadi. konflik, khususnya konflik yang disebabkan perbedaan bahasa.

20. Bidang Pertahanan Keamanan

Kerjasama bidang HANKAM meliputi (a) Pertahanan, dan (B) Keamanan.

a. Bidang Pertahanan

Pada masa lampau banyak kerjasama (samenwerken) pendidikan khususnya TNI AD dengan Belanda yang dapat dilihat dari perwira tinggi TNI AD yang lulus dari KMA Breda. Namun kerjasama itu sudah cukup lama tidak berjalan, kerjasama terbaru yang dapat dicatat adalah pada tahun 2011 adanya kerjasama *on the job training* (OJT) satu regu antara pasukan lintas udara Belanda dengan Linud Kostrad TNI AD dimana pasukan TNI AD dikirim ke Belanda untuk latihan, dan tahun ini pasukan Belanda yang datang ke Indonesia. Namun demikian ada rencana bahwa kerjasama ini dapat ditingkatkan menjadi satu peleton.

Kerjasama bidang pertahanan untuk TNI AL telah dilakukan dalam scope yang lebih luas khususnya pada bidang latihan, pertukaran perwira, dan pengadaan alutsista dalam hal ini kapal perang. Bentuk naskah kerjasama yang sudah ditanda tangani oleh kedua negara adalah: *Concerning the Protection of Classified Information Regarding The Acquisition and Operation of Vessel for the NAVY of the Republic of Indonesia*. Pertukaran perwira siswa (Pasis) dan pendidikan/kursus seperti kursus *Principal Warfare Officer* (PWO) yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2005 dengan peserta dari TNI AL sebanyak dua orang Perwira. Sedangkan kerjasama bidang pengadaan Alutsista antara lain Kapal Corvette F27 dan F28. Belanda lewat galangan

kapalnya Schelde Naval Shipbuilding (lihat Bab III) menyatakan kesediannya membantu PT PAL membangun korvet nasional. Pada tahap awal PT PAL direncanakan mulai mengirim para teknisi perkapalan dan persenjataan ke Belanda. Selanjutnya, TNI AL akan mengirim teknisinya mempelajari seluk-beluk kapal canggih tersebut. Baru-baru ini telah diserahkan KRI Frans Kaisiepo, korvet jenis Sigma (*Ship Integrated Geometrical Modularity Approach*) terakhir pesanan TNI AL, di Belanda. Hadir dalam peresmian waktu itu adalah mantan Menteri Pertahanan Prof Dr. Juwono Sudarsono dan mantan kepala staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno. Indonesia memesan empat kapal korvet Sigma dari Negeri Kincir Angin itu dengan nilai total 700 juta euro (sekitar Rp 8 triliun). Ketiga kapal pertama telah datang secara bertahap sejak medio 2007. Belanda mempunyai peluang terbesar menjadi mitra PT PAL membangun korvet, alasannya, Belanda paling berkomitmen menerapkan alih teknologi kapal permukaan.

Kerjasama TNI AU belum digali dan dikembangkan dengan optimum, hal ini terlihat dari minimnya data menyangkut kerjasama TNI AU.

b. Bidang Keamanan

Kerjasama bidang keamanan khususnya lalu lintas (*verkeer*) ini telah dimulai sejak tahun 1988 hingga tahun 2000 untuk peningkatan *Capacity Building*, dan dilanjutkan kembali pada tahun 2006, 2007, dan 2008. Dalam kerjasama ini difokuskan pada pendidikan Polri khususnya bidang lalu lintas yang setiap tahunnya mengirimkan personilnya ke Politie Verkeer Institute (PVI) di Apeldoorn yang kemudian melebur dalam Politie Akademie untuk belajar bidang-bidang yang meliputi: penanganan kecelakaan lalu lintas, rekayasa lalu lintas, mengemudi kendaraan bermotor, dan pada tiga tahun terakhir (2006-2008) tentang analisa kecelakaan lalu lintas, *cyber crime* dan *drugs crime*.

Sebagai salah satu negara yang mendukung pendirian Jakarta *Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC), Belanda telah memberikan bantuan dana sebesar 10,3 juta (US\$ 16 juta) termasuk untuk kerjasama

capacity building. Di samping itu Belanda juga menawarkan bantuan dalam pembuatan peraturan nasional yang berhubungan dengan *transnational aspect of legislation*, misalnya aturan mengenai dokumen *anest warrant* yang dapat berlaku untuk beberapa negara yang berkepentingan. Selain itu kedua negara juga sedang menjajagi kerjasama *Capacity Building* untuk kegiatan pengamanan di Bandara Indonesia.

Reformasi Belanda di bidang Militer telah menyebabkan berkurangnya anggota militer dan yang semula 70.000. orang menjadi 40.000 orang dan menghapus wajib militer, namun demikian Belanda tetap mempertahankan keanggotaannya di NATO, yang dapat memberikan jaminan pada saat krisis. Belanda juga merupakan produsen senjata yang diekspor ke berbagai negara. Hal ini dapat dilihat sebagai peluang kerjasama lain dalam bidang pertahanan dan keamanan, misalnya dalam bentuk pelatihan counter terrorism yang melibatkan TNI dan Polri.

BAB VI PENUTUP

21. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan studi strategis luar negeri ke Belanda yang dilaksanakan mulai tanggal 28 Juni sampai dengan 4 Juli 2009, hasil yang dicapai selama kunjungan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pada hakekatnya hubungan antara Indonesia dan Belanda telah berjalan dengan baik namun masih harus ditingkatkan. Hal ini disebabkan terutama karena citra Indonesia dalam hal penegakan hukum, khususnya tingginya korupsi, yang dianggap belum mampu menanganinya dengan baik. Hal ini diperkirakan berdampak pada rasa percaya Investor Belanda karena merasa kurang aman untuk menanamkan modalnya sebagai investasi.
- b. Peran Belanda didalam memajukan hubungannya dengan Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa yang tentunya harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya secara konsekwen. Hal itu menjadikan Belanda berada pada posisi yang tidak mudah untuk menegaskan kepeduliannya kepada Pemerintah Indonesia khususnya pada bidang-bidang yang berkaitan dengan penegakan hukum, HAM, dsb.
- c. Secara umum pemerintah Belanda mempunyai perhatian yang serius untuk meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang. Hal ini terungkap dari dialog yang dilakukan antara peserta SSLN PPRA XLVI dengan pemerintah Belanda yang diwakili oleh kementerian yang dikunjungi, serta dipertegas oleh bapak duta besar berkuasa penuh Indonesia untuk kerajaan Belanda. Akan tetapi bahwa Belanda sebagai anggota Uni Eropa juga harus mempertimbangkan kebijakan dan kepentingan Uni Eropa.
- d. Pengawasan Pemerintah Indonesia terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing termasuk beberapa LSM dari Belanda yang terlihat bergerak cukup jauh dalam melakukan kegiatannya dengan menggunakan tema-tema demokrasi dan advokasi HAM yang dilakukan tanpa diawali dengan konsultasi dengan pemerintah Indonesia dapat memicu pelanggaran

dan penegakan hukum di Indonesia.

e. Belanda sebagai penggagas, pendiri, dan anggota Uni Eropa dan NATO secara politis menjadi lebih aman dalam konteks pertahanan dan keamanannya, sehingga Belanda bisa lebih fokus pada persoalan domestiknya. Karena itu Belanda juga aktif dalam misi penegakan hukum dibawah payung PBB, EU, maupun NATO.

f. Dalam hal Liberalisasi dan ekonomi, pemerintah Belanda nampaknya berani berpandangan liberal dan berbeda terhadap beberapa nilai-nilai universal yang berlaku selama ini. Hal ini terlihat di realitas sosial masyarakat Belanda berupa legalisasi prostitusi yang dikenai pajak, dan kebebasan mengonsumsi narkoba dan zat adiktif selain mariyuana dan bahkan diperdagangkan, sementara umumnya di negara lain dilarang. Hal ini tentu dapat berimbas negatif, langsung maupun tidak langsung, bagi penegakan hukum di Indonesia khususnya pada perdagangan atau konsumsi Narkoba dan obat-obat terlarang.

g. Secara geografis Belanda berada pada posisi sentral diantara Negara-negara Uni Eropa, sehingga menjadikannya sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian di Eropa. Kemampuan perekonomian yang kuat dan posisi strategis Belanda yang berada di jantung Eropa merupakan motor penggerak pembangunan dan pengembangan berbagai kegiatan perekonomian, juga pada penegakan hukum.

h. Kemajuan pendidikan dan perkembangan industri dalam negeri yang didukung kemampuan teknologi mandiri dan maju, serta ditopang dengan perekonomian yang kuat, SDM berkualitas, dan mempunyai daya saing tinggi telah menjadikan Belanda sebagai negara maju di Eropa dan Dunia. Hal yang paling penting adalah bahwa Belanda merupakan pusat hukum dunia.

i. Dalam kaitannya dengan good governance, *corruption perception index* (CPI) Belanda menempati peringkat ke 7 (lihat Lampiran 7), sedangkan Indonesia pada peringkat 126. Angka ini menunjukkan, bahkan mungkin berbanding lurus dengan, kuatnya penegakan hukum di Belanda.

Pelajaran yang dapat diambil dalam studi strategis luar negeri ke Belanda diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Belanda adalah bangsa yang terbatas SKA nya tetapi .mampu menunjang perekonomiannya dengan baik disamping adanya dukungan industri jasa yang kuat dan mapan serta infrastuktur yang lengkap, menjadi faktor dominan pendukungnya
- b. *Good governance* yang berjalan dengan baik dan ditunjang oleh tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang relatif berkualitas, sehingga prinsip-prinsip *good governance* dapat terimplementasikan dengan baik.
- c. Sistem jaminan sosial untuk hidup dan masa tua, termasuk pelayanan publik terprogram dengan baik, memperlihatkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Hat ini terbukti dengan banyaknya panti jompo yang dikelola secara professional.
- d. Pemerintah Belanda memberikan kontribusi dan dukungan yang besar terhadap lembaga-lembaga multilateral, sehingga memposisikan Belanda sebagi negara terhormat di mata Dunia.
- e. Belanda merupakan negara pelopor dalam bidang HAM dan penegakan hukum di dunia. Belanda juga mempraktekan ketatnya sistim hukum di satu sisi, dan liberlisasi dan kebebasan individu di sisi lain namun Belanda mampu menyeimbangkannya dengan sangat baik.
- f. Pendidikan tinggi yang berkualitas dan industri berteknologi tinggi yang banyak akan sangat baik bagi Indonesia untuk dapat mengirimkan putra-putri terbaik belajar dan menimba pengalaman dalam membangun industri tingkat tinggi dan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.
- g. Industri Pertahanan di Belanda yang telah mapan dapat menjadi sumber untuk dilakukannya pertukaran pengetahuan terhadap pengembangan industri strategis di tanah air.

22. **Saran**

- a. Pertumbuhan ekonomi, perkembangan kemajuan pendidikan dan

IPTEK merupakan andalan negara Belanda. Untuk itu hal-hal positif tersebut diatas harus diadopsi Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan bangsa untuk mencapai tujuan nasional.

b. Indonesia harus bekerja keras dalam memanfaatkan peluang pasar di Belanda dengan penataan dan penyiapan diri dalam berbagai hal, sehingga dapat bersaing secara sehat di pasar Belanda khususnya, dan Eropa pada umumnya. Instansi terkait harus membuka diri dan berkoordinasi dengan baik dalam mengantisipasi pangsa pasar Belanda.

c. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Belanda pada aspek pariwisata, investasi, perdagangan dan industry, serta pendidikan, harus ditingkatkan secara proaktif, terencana, dan berkesinambungan serta dilakukan secara konsisten.

d. Tata kelola pemerintahan Belanda menyangkut manajemen transportasi, pengendalian banjir, pertanian dan peternakan modern dapat diaplikasikan di Indonesia dengan menyesuaikan kondisi geografi.

e. Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah diplomatik aktif untuk mengundang investor Belanda untuk menanamkan investasinya di Indonesia sambil terus melakukan pembenahan pada good governance dan iklim investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2007. Deklarasi Djuanda dan implikasinya terhadap kewilayahan Indonesia. Disajikan pada Seminar dan Pameran 50 tahun Deklarasi Djuanda, 1314 Desember 2007.
- Bedford, N. dan S. Sellar, 2007, The Netherlands, Lonely Planet Publications Pty, Australia.
- Commission of the European Communities. 2001. European Governance: a white paper. European Commission, Brussels.
- Emmeline b. dan Jaap v., 2010, Discovering the Dutch On Culture and Society of the Netherlands, Amsterdam University Press
- Jentoft, S. 2007. Limits of governability: Institutional implications for fisheries and coastal governance. Marine Policy (2007), doi:10.1016/j.marpol.2006.11.003.
- Jos Leiten, et al., 2011, Versterk Het Industriële Hart, TNO Strategy & Change
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2008. Pedoman Umum Good Public Governance. KNKG, Jakarta.
- Kusumaatmadja, M. 2003. Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konperensi Hukum Laut ke-III. Hukum dan Pembangunan. no. 1 tahun XXXIII: 89-105.
- Lembaga Ketahanan Nasional. Materi Pokok Ketahanan Nasional, Modul-3: Sub BS Konsepsi dan Tolok Ukur Ketahanan Nasional. Buku-8. Lemhannas RI, Jakarta.
- Mc Donald, F. dan C. Mrasden, 2008, Europe, Dorling Kindersley Ltd, London.
- Ministrie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2009, Public Governance in Indonesia and the Netherlands, Den Haag.
- N.E. de Heer-de Lange, 2009, Criminaliteit en rechtshandhaving 2009, Centraal Bureau voor de Statistiek
- Springa, D. dan I. Kleden, 2006, Konsepsi Demokrasi, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, Jakarta.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- ___, 2009, Jong Indonesia, PPI Belanda #1
- ___, 2010, Jong Indonesia, PPI Belanda #2
- ___, 2010, Jong Indonesia, PPI Belanda #3
- ___, 2010, Jong Indonesia, PPI Belanda #4
- ___, 2011, Jong Indonesia, PPI Belanda #5

Undang-Undang:

1. Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
2. Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
3. Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.
4. Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025.
5. Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. United Nation Conventions on the Law of the Sea of 1982.

United Nations Development Programme (UNDP). 1997.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and The Pacific.

Website:

1. <http://cempaka-Belanda.blogspot.com/2010/04/queen-beatrix-still-impeccable-after-30.html>
2. <http://mirror.undp.org/madnetipolicy/default.htm>
3. www.koninklijkhuis.nl
4. www.overheid.nl
5. <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3204.html>
6. www.tweedekamer.nl
7. <http://www.kabinetsformatie2010.nl>
8. www.rijksoverheid.nl
9. www.koninklijkhuis.nl
10. www.overheid.nl
11. www.rijksoverheid.nl
12. www.provincies.nl
13. www.vng.nl
14. www.unescap.org

TOPOGRAFI

The Netherlands



THE NETHERLANDS



KERAJAAN BELANDA



Prinses
Máxima



Koningin der Nederlanden
Beatrix Wilhelmina Armgard
van Oranje Nassau



Kroonprins
Willem-Alexander
van Oranje

Kabinet Rutte-Verhagen **14 Oktober 2010 – Saat ini**



Minister-President,
minister van algemene zaken
drs. Mark Rutte (VVD)



Viceminister-president,
minister van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie
drs. M.J.M. Verhagen (CDA)



SUSUNAN MENTERI Kabinet Rutte-Verhagen (14 Oktober 2010 – Saat ini)

No	KEMENTRIAN	NAMA MENTERI	PARTAI	FOTO
1	Minister-president, minister van Algemene Zaken	Drs. M. Rutte	VVD	
2	Viceminister-president, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie	drs. M.J.M. Verhagen	CDA	
3	Minister van Buitenlandse Zaken	Prof. dr. U. Rosenthal	VVD	
4	Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	Mr. J.P.H. Donner	CDA	
5	Minister van Immigratie en Asiel	Drs. G.B.M. Leers	CDA	
6	Minister van Veiligheid en Justitie	Mr. I.W. Opstelten	VVD	
7	Minister van Financiën	Mr.drs. J.C. de Jager	CDA	
8	Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	J.M. van Bijsterveldt-Vliegthart	CDA	
9	Minister van Defensie	Drs. J.S.J. Hillen	CDA	
10	Minister van Infrastructuur en Milieu	Drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus	VVD	
11	Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	H.G.J. Kamp	VVD	
12	Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport	Drs. E.I. Schippers	VVD	

SUSUNAN MENTERI MUDA (Staatssecretaris)

No	KEMENTRIAN	NAMA MENTERI	PARTAI	FOTO
1	Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie	Dr. H. Bleker	CDA	
2	Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken	Prof. dr. H.P.M. Knapen	CDA	
3	Staatssecretaris van Financiën	Mr. drs. F.H.H. Weekers	VVD	
4	Staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	drs. H. Zijlstra	VVD	
5	Minister van Veiligheid en Justitie	Mr. F. Teeven	VVD	
6	Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu	J.J. Atsma	CDA	
7	Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	Drs. P. de Krom	VVD	
8	Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport	drs. M. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner	CDA	

PROVINSI



IBU KOTA dan BENDERA PROVINSI



LAMBANG PROVINSI



1. Groningen
[Groningen]



2. Friesland
[Leeuwarden]



3. Drenthe
[Assen]



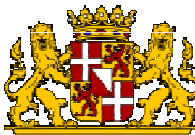
4. Overijssel
[Zwolle]



5. Flevoland
[Lelystad]



6. Gelderland
[Arnhem]



7. Utrecht
[Utrecht]



8. Noord-Holland
[Haarlem]



9. Zuid-Holland
[The Hague]



10. Zeeland
[Middelburg]



11. Noord-Brabant
[s-Hertogenbosch]



12. Limburg
[Maastricht]

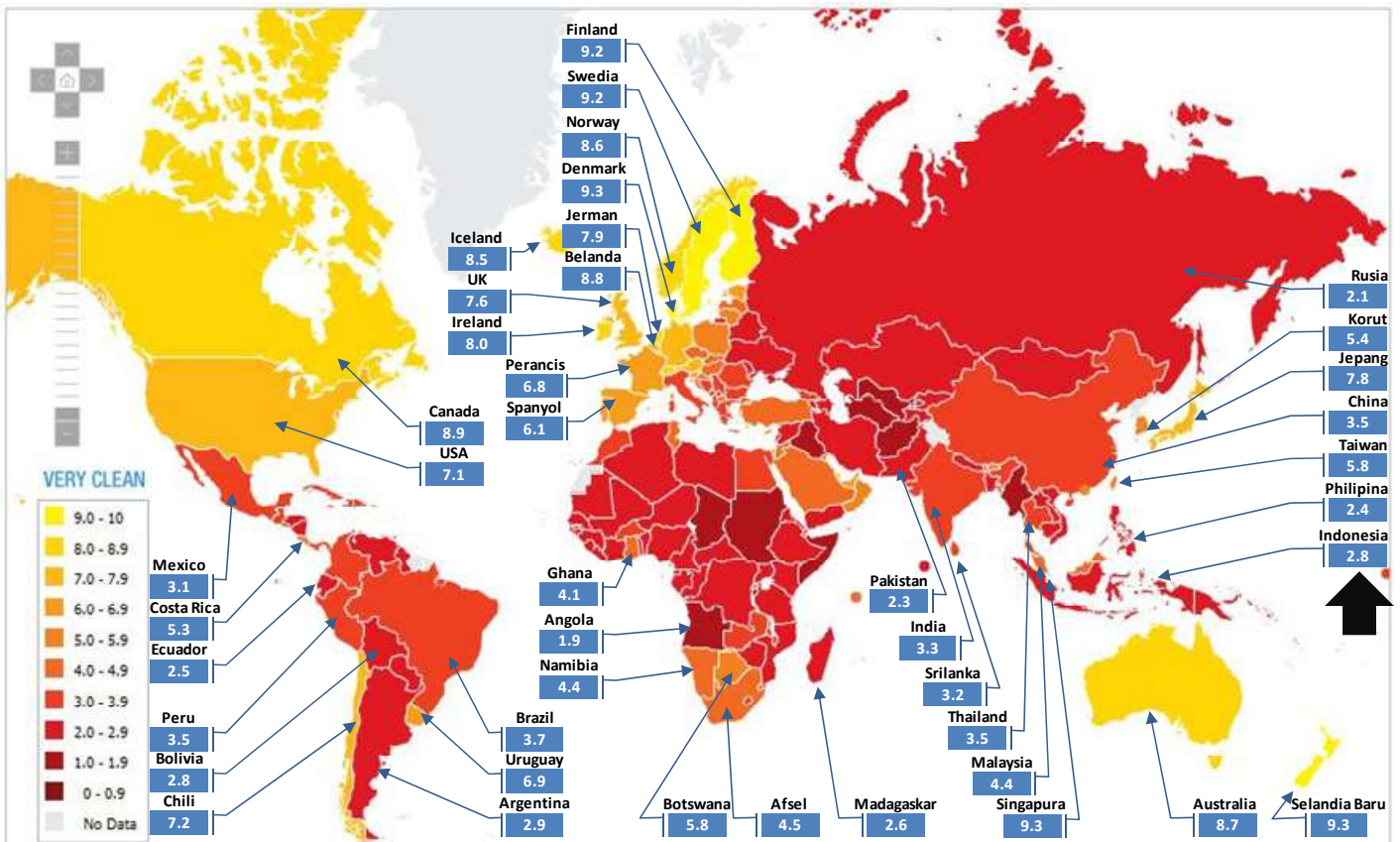
DAYA SAING BELANDA

Table 1: Rankings of the EU27 in the Global Competitiveness Index 2010-2011

Economy	Rank	Score
Sweden	2	5.56
Germany	5	5.39
Finland	7	5.37
Netherlands	8	5.33
Denmark	9	5.32
United Kingdom	12	5.25
France	15	5.13
Austria	18	5.09
Belgium	19	5.07
Luxembourg	20	5.05
Ireland	29	4.74
Estonia	33	4.61
Czech Republic	36	4.57
Poland	39	4.51
Cyprus	40	4.50
Spain	42	4.49
Slovenia	45	4.42
Portugal	46	4.38
Lithuania	47	4.38
Italy	48	4.37
Malta	50	4.34
Hungary	52	4.33
Slovak Republic	60	4.25
Romania	67	4.16
Latvia	70	4.14
Bulgaria	71	4.13
Greece	83	3.99

Country/Economy	Rank	Score	GCI 2010-2011 rank among 2009 countries	GCI 2009-2010 rank *
Switzerland	1	5.63	1	1
Sweden	2	5.56	2	4
Singapore	3	5.48	3	3
United States	4	5.43	4	2
Germany	5	5.39	5	7
Japan	6	5.37	6	8
Finland	7	5.37	7	6
Netherlands	8	5.33	8	10
Denmark	9	5.32	9	5
Canada	10	5.30	10	9
Hong Kong SAR	11	5.30	11	11
United Kingdom	12	5.25	12	13
Taiwan, China	13	5.21	13	12
Norway	14	5.14	14	14
France	15	5.13	15	16
Australia	16	5.11	16	15
Oatar	17	5.10	17	22
Austria	18	5.09	18	17
Belgium	19	5.07	19	18
Luxembourg	20	5.05	20	21

Peta Indeks Persepsi Korupsi (CPI)



HUMAN DEVELOPMENT INDEX 2010**Sumber: UNDP**

Rank	Country	Index
1	Norway	0.938
2	Australia	0.937
3	New Zealand	0.907
4	United States	0.902
5	Ireland	0.895
6	Liechtenstein	0.891
7	Netherlands	0.890
8	Canada	0.888
9	Sweden	0.885
10	Germany	0.885
11	Japan	0.884
12	Korea	0.877
13	Switzerland	0.874
16	Finland	0.871
23	Italy	0.854
26	United Kingdom	0.849
27	Singapore	0.846
57	Malaysia	0.744
73	Brazil	0.699
83	Turkey	0.679
86	Fiji	0.669
89	China	0.663
91	Sri Lanka	0.658
92	Thailand	0.654
97	Philippines	0.638
108	Indonesia	0.600
113	Viet Nam	0.572
119	India	0.519
120	Timor-Leste	0.502
125	Pakistan	0.490
135	Madagascar	0.435
137	Papua New Guinea	0.431
169	Zimbabwe	0.140

**GLOBAL INNOVATION INDEX (GII)****Table 1: GII 2009-2010 Overall Rankings**

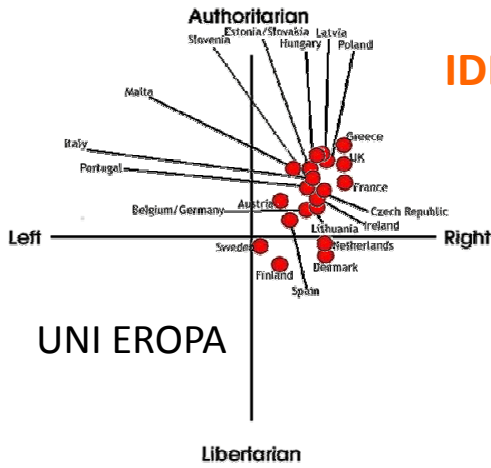
Country/Economy	GII Score	Rank
Iceland	4.86	1
Sweden	4.85	2
Hong Kong, China	4.83	3
Switzerland	4.82	4
Denmark	4.72	5
Finland	4.66	6
Singapore	4.65	7
Netherlands	4.62	8
New Zealand	4.60	9
Norway	4.59	10



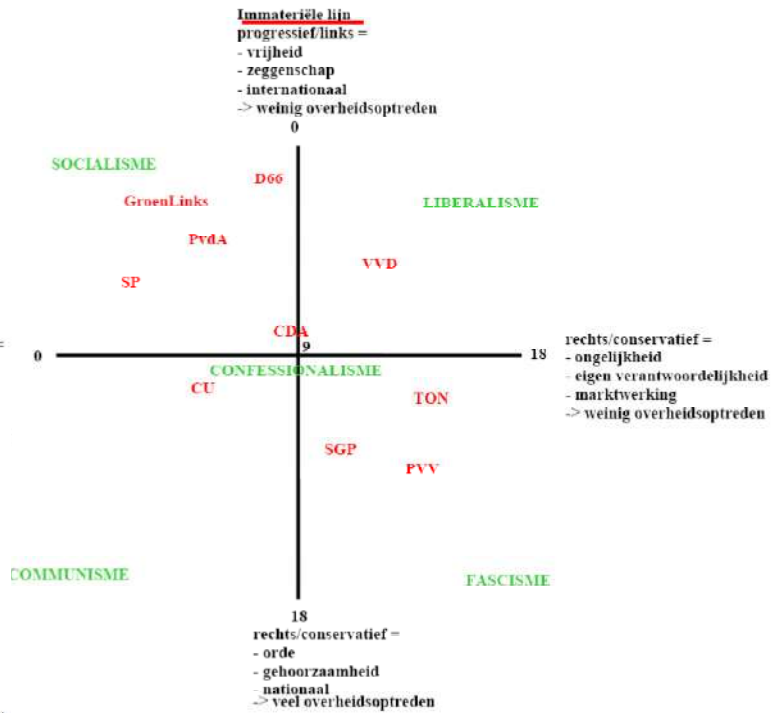
DEMOGRAFI TIAP PROVINSI DI BELANDA

Vlag	Provincie	Bevolking ^[1]	Oppervlakte (land+water)	Oppervlakte (land)	inw./km ² ^[2]	Hoofdstad	Gemeente met de meeste inwoners
	Zuid-Holland	3.502.595	3.418,50	2.814,69	1.244	Den Haag	Rotterdam
	Noord-Holland	2.668.197	4.091,76	2.671,03	999	Haarlem	Amsterdam
	Noord-Brabant	2.444.435	5.081,76	4.916,49	497	's-Hertogenbosch	Eindhoven
	Gelderland	1.999.135	5.136,51	4.971,76	402	Arnhem	Nijmegen
	Utrecht	1.220.324	1.449,12	1.385,02	881	Utrecht	Utrecht
	Overijssel	1.130.380	3.420,86	3.325,62	340	Zwolle	Enschede
	Limburg	1.122.990	2.209,22	2.150,87	522	Maastricht	Maastricht
	Friesland (Fryslân)	646.318	5.748,74	3.341,70	193	Leeuwarden	Leeuwarden
	Groningen	577.081	2.960,03	2.333,28	247	Groningen	Groningen
	Drenthe	490.870	2.680,37	2.641,09	186	Assen	Emmen
	Flevoland	387.698	2.412,30	1.417,50	274	Lelystad	Almere
	Zeeland	381.477	2.933,89	1.787,13	213	Middelburg	Terneuzen

IDEOLOGI PARTAI DI BELANDA DAN EROPA



Materiële lijn:
 progressief/links =
 - gelijkheid
 - solidariteit
 - planmatig
 -> veel



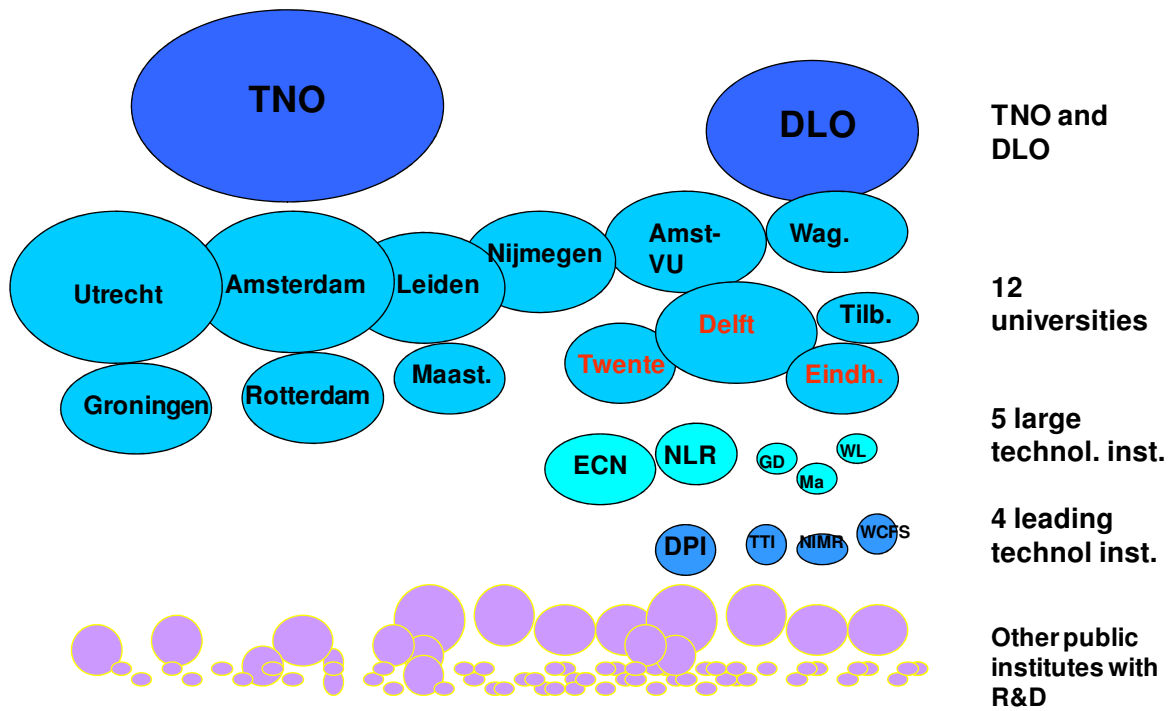
PvdD: 2 SP: 15 GL: 10 D66: 10 PvdA: 30 CU: 5 CDA: 21 VVD: 31 SGP: 2 PVV: 24

Fraksi di Tweede Kamer *

No	Nama	Ketua	Logo
1	VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie	Stef Blok	
2	CDA Christen Democratisch Appel	Sybrand van Haersma Buma	
3	PvdA Partij van de Arbeid	Job Cohen	
4	D66 Democraten 66	Alexander Pechtold	
5	GL GroenLinks	Jolande Sap	
6	SP Socialistische Partij	Emile Roemer	
7	CU ChristenUnie	Arie Slob	
8	PVV Partij voor de Vrijheid	Geert Wilders	
9	SGP Staatkundig Gereformeerde Partij	Kees van der Staaij	
10	PvdD Partij Voor De Dieren	Marianne Thieme	

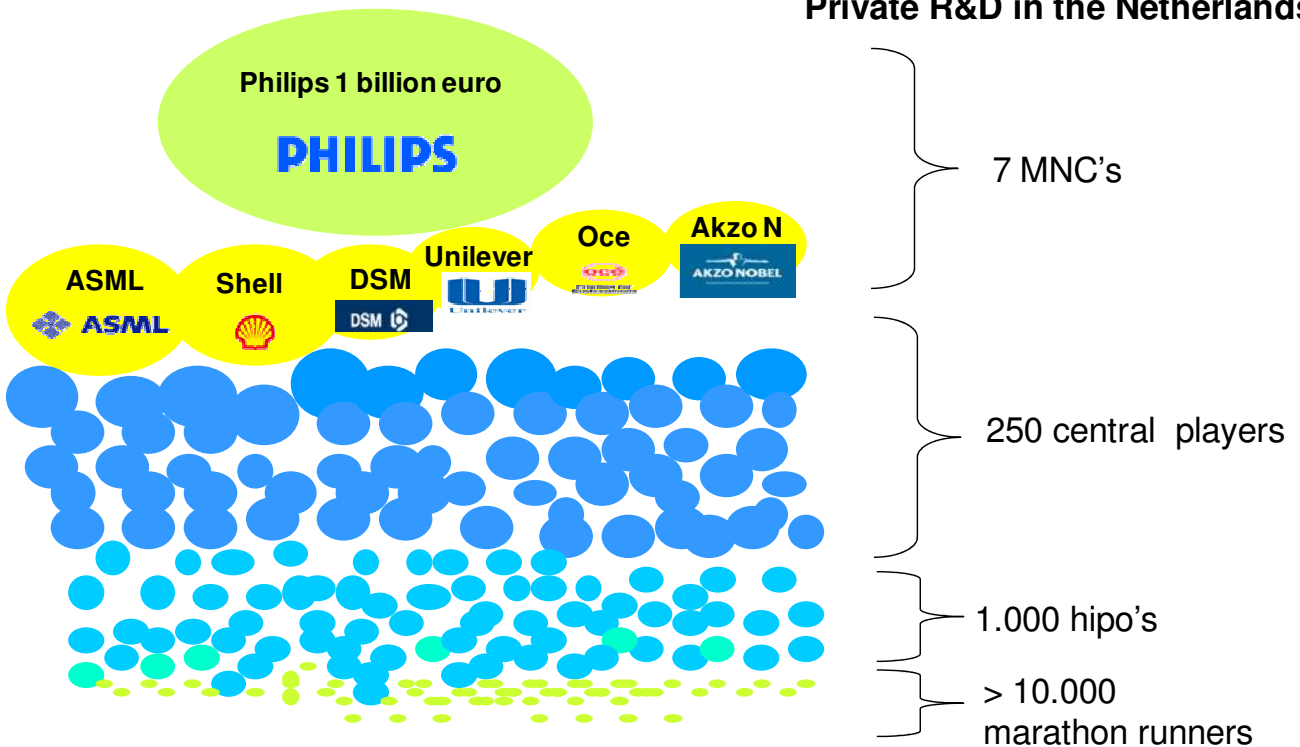
* <http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/fracties/index.jsp>

INSTITUSI PENELITIAN



Milik Pemerintah

Private R&D in the Netherlands



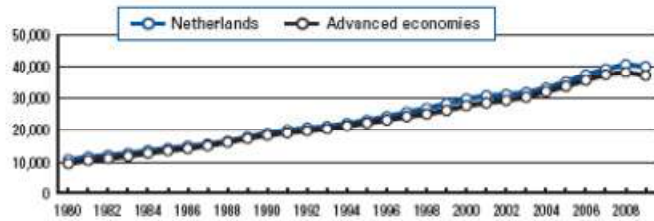
Milik Swasta

Netherlands

Key indicators, 2009

Population (millions)	16.6
GDP (US\$ billions)	794.8
GDP per capita (US\$)	48,223
GDP (PPP) as share (%) of world total	0.95

GDP (PPP) per capita (int'l \$), 1980–2009



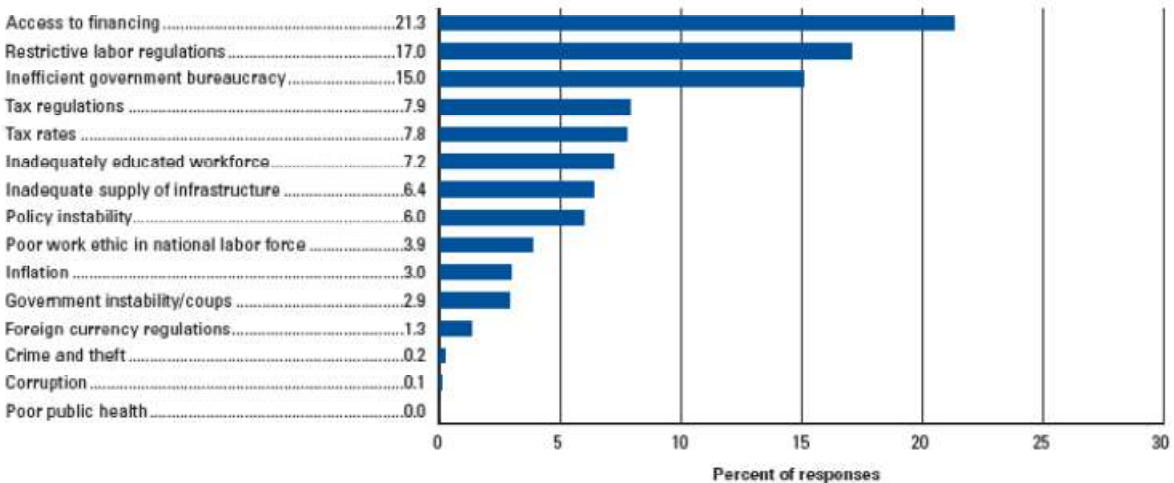
Global Competitiveness Index

	Rank (out of 139)	Score (1–7)
GCI 2010–2011	8	5.3
GCI 2009–2010 (out of 133)	10	5.3
GCI 2008–2009 (out of 134)	8	5.4
Basic requirements	9	5.8
1st pillar: Institutions	12	5.5
2nd pillar: Infrastructure	7	5.9
3rd pillar: Macroeconomic environment	25	5.3
4th pillar: Health and primary education	8	6.5
Efficiency enhancers	8	5.2
5th pillar: Higher education and training	10	5.6
6th pillar: Goods market efficiency	8	5.2
7th pillar: Labor market efficiency	23	4.8
8th pillar: Financial market development	26	4.7
9th pillar: Technological readiness	3	6.0
10th pillar: Market size	19	5.1
Innovation and sophistication factors	8	5.2
11th pillar: Business sophistication	5	5.6
12th pillar: Innovation	13	4.8

Stage of development



The most problematic factors for doing business



Note: From a list of 15 factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing business in their country and to rank them between 1 (most problematic) and 5. The bars in the figure show the responses weighted according to their rankings.

LEMBAGA YANG MENGURUSI PERGURUAN TINGGI



PERGURUAN TINGGI TERNAAMA DI BELANDA



Universiteit Leiden



Universiteit Utrecht



Universiteit Maastricht



Radboud University Nijmegen



14 PERGURUAN TINGGI DI BELANDA

Tradisi akademis yang sangat panjang di Universitas Belanda

Universitas Leiden (LEI) didirikan pada tahun 1575 oleh Willem van Oranje dan merupakan universitas tertua di Belanda. Saat ini terdapat 14 universitas di Belanda yang melakukan penelitian dan pendidikan tinggi.

Di Belanda terdapat 3 institut teknologi yaitu: (1) Technische Universiteit Delft (TUD), (2) Technische Universiteit Eindhoven (TUE), dan (3) Universiteit Twente (UT).

Selain itu ada satu universitas yang sangat spesifik dalam pengembangan ilmu-ilmu hayati, dan pertanian yaitu Universiteit Wageningen. Di Belanda juga terdapat 8 Universitas yang memiliki pusat medis.

Institut Teknologi

[Technische Universiteit Delft \(TUD\)](#)

[Technische Universiteit Eindhoven \(TUE\)](#)

[Universiteit Twente \(UT\)](#)

Universitas Umum

[Erasmus Universiteit Rotterdam \(EUR\)](#)

[Universiteit Leiden \(LEI\)](#)

[Universiteit Maastricht \(UM\)](#)

[Radboud Universiteit Nijmegen \(Radboud\)](#)

[Tilburg University](#)

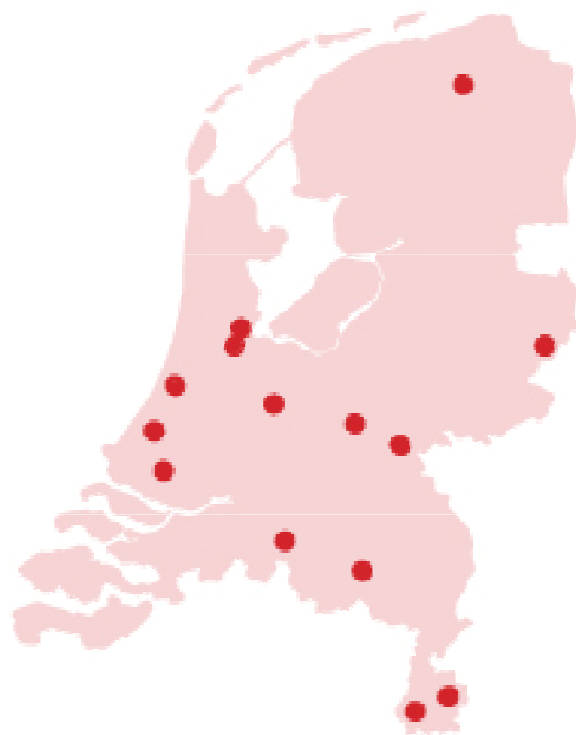
[Universiteit van Amsterdam \(UvA\)](#)

[Rijksuniversiteit Groningen \(RU\)](#)

[Universiteit Utrecht \(UU\)](#)

[Vrije Universiteit Amsterdam \(VU\)](#)

[Open Universiteit \(OU\)](#)



Universitas khusus ilmu hayati dan pertanian

[Wageningen University](#)

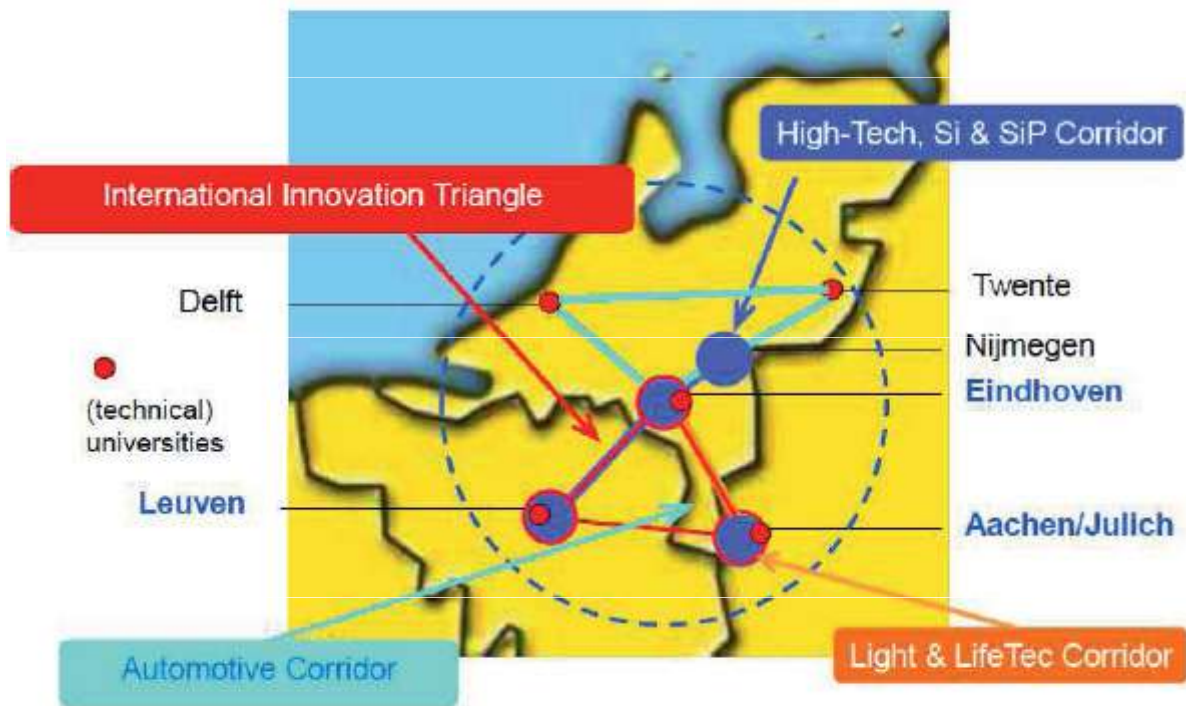
7. Rankings in 2010

	ARWU world top 500 (2010)	Leiden world top 500 (2010)	THE world top 200 (2010)
Utrecht University	50	133	143
Leiden University	70	122	124
University of Amsterdam	101-150	127	165
University of Groningen	101-150	167	170
University of Wageningen	101-150	169	144
vU University Amsterdam	101-150	113	139
Delft University of Technology	151-200	123	151
Erasmus University Rotterdam	151-200	83	159
Radboud University Nijmegen	151-200	164	-
University of Maastricht	301-400	176	-
University of Twente	301-400	143	185
Eindhoven University of Technology	401-500	106	114

Bron: www.arwu.org, www.timeshighereducation.co.uk en www.cwts.nl.

INDUSTRI STRATEGIS

International Innovation Triangle



FIGUUR 14: EMERGING EUREGIONAL HIGH-TECH ECOSYSTEM (BRON PHILIPS)¹³

OLAH RAGA DI BELANDA



study in
holland
open to
international
minds





Kelompok SSLN Belanda

22-28 Oktober 2011

Gembong Baskoro, Dr. Ir. M.Sc.

Budi Antoro, Drs. MBA

FFJ Mirah, Drs.

Xu Xiaobin

A.W.J. Crisanthe De Silva

Ambar Rahayu, Ir. MNS

Rosmaya Hadi, SH M.Si.

I Made Agra

M. Thamrin Marzuki, S.Sos

Johny Lumban Tobing

Edy Rahmayadi

R. Gatot Suprpto

Supartono, Dr. Ir. MM

Gutomo, S.IP

Aris Sugiarto, SE MM

Petrus Hardana, Drs. SH

M. Zaini, Drs. SH

Supriyanto Tarah, Drs. MM

RD. Ludgerius Lusi, S.Ag. Lic. Theol

Feri Setiawan Samad, SH MH